



PROFIL DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TIM PENYUSUN

Penulis :

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
Meiliyana, S.IP., MA

Editor :

Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si

Pengolah Data:

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si
Tia Panca Rahmadhani, S.Hub. I

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2020

KATA PENGANTAR

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender (dalam laporan ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Penyusunan data terpilah gender ini dimaksudnya sebagai isu pemantik dan bahan awal bagi OPD – OPD terkait dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Anak di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

Akhir kata, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penulisan laporan akhir ini, terutama kepada seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah atas data-data sekunder yang telah diberikan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan atas buku ini, namun demikian semoga penyusunan data terpilah gender dan anak ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah.

Lampung Tengah, Maret 2020

KEPALA DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

HELENA RUSWATI, SH.
NIP. 19620927 198903 2004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR GRAFIK.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUANG LINGKUP.....	2
C. SISTEMATIKA.....	2
BAB II KONSEP DAN METODE SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3
A. KONSEP DAN METODE PENGUMPULAN DATA.....	3
B. WAKTU PENYUSUNAN.....	3
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	3
D. SUMBER DATA.....	5
E. PENGELOMPOKAN DATA.....	5
F. ANALISIS DATA.....	7
BAB III PENYAJIAN DATA TERPILAH	8
A. DATA GENDER BIDANG DEMOGRAFI.....	8
1) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	8
2) Penduduk Berdasarkan Umur: Bonus Demografi	13
3) Administrasi Kependudukan	15
B. DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN.....	19
1) Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan.....	19
2) Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia	20
3) Angka Melek Huruf Latin dan Lainnya	21
4) Sebaran Siswa di Bawah Satuan Pendidikan Kementrian Agama RI.....	22
5) Pendidikan Kesetaraan	26
6) Kualifikasi Pendidik	27
7) Sarana dan Prasarana: Perpustakaan.....	28
C. DATA GENDER BIDANG KESEHATAN.....	29
1) Angka Kematian Ibu.....	29
2) Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil	30
3) Sumber Daya Kesehatan.....	32
4) Kepesertaan Keluarga Berencana	33

5) Jenis Alat Kontrasepsi	37
6) Pasangan Usia Subur dan Status Sosial Ekonomi.....	38
7) Penderita HIV/AIDS.....	40
D. DATA GENDER BIDANG EKONOMI.....	41
1) Ketenagakerjaan dan Pencari Kerja	42
2) Kepemilikan Usaha dan Penanaman Modal	46
3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.....	47
4) Industri dan Perdagangan.....	54
5) Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	60
6) Usahan Transportasi dan Perhubungan	70
7) Pariwisata.....	71
E. DATA GENDER BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK	73
1) Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur Negara	73
2) Perangkat dan Kader Pembangunan Desa.....	88
4) Politik	89
F. DATA GENDER BIDANG HUKUM DAN HAM	90
G. DATA GENDER BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN	94
H. DATA TERPILAH ANAK	96
1) Kluster Hak Sipil dan Kebebasan.....	97
2) Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	101
3) Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	105
4) Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.....	108
5) Kluster Perlindungan Khusus.....	113
I. OVERVIEW	126
BAB IV ANALISIS GENDER DAN ANAK.....	128
A. ANALISIS GENDER: GAP DAN POP.....	128
B. ANALISIS ANAK: KERANGKA KEBUTUHAN ANAK	136
BAB V REKOMENDASI	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pengelola, Pengunjung Dan Peminjam Di Perpustakaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	28
Tabel 2.	Data Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan, Tujuan, Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	44
Tabel 3.	Data Umum Tenaga Kerja Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 .	45
Tabel 4.	Aparat Desa Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	88
Tabel 5.	Tenaga Pendamping Desa Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	89
Tabel 6.	Kader Penggerak Desa Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	89
Tabel 7.	Hubungan Pelaku Kekerasan Dan Korban Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	91
Tabel 8.	Penjaga Dan Penghuni Lapas Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	94
Tabel 9.	Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	95
Tabel 10.	Kerangka Analisis Gender Gap Dan Pop.....	129
Tabel 11.	Matrik Analisis Pembangunan Anak Dengan Pendekatan Perlindungan Anak	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah 2019	8
Gambar 2.	Kualifikasi Pendidikan Guru (S1/D-Iv) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	28
Gambar 3.	Jumlah Tutor Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	28
Gambar 4.	Peserta Kb Baru Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	34
Gambar 5.	Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Penduduk Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	42
Gambar 6.	Anggota Dprd 2019-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	90
Gambar 7.	Angka Penyalahgunaan Napza Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.	91
Gambar 8.	Data Murid Pada Setiap Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	109
Gambar 9.	Sdm Yang Dilatih Anggaran Ramah Anak (Ara) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	110
Gambar 10.	Fasilitator Anggaran Ramah Anak (Ara) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	111
Gambar 11.	Masyarakat Yang Dilatih Anggaran Ramah Anak (Ara) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	111
Gambar 12.	Pengakuan Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	113

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	9
Grafik 2.	Indeks Paritas Gender Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	10
Grafik 3.	Penduduk Kempok Usia 0 – 14 Tahun Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	11
Grafik 4.	Penduduk Kempok Usia 15— 64 Tahun Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	12
Grafik 5.	Penduduk Kempok Usia <65 Tahun Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	13
Grafik 6.	Penduduk Berdasarkan 3 Kelompok Usia Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	14
Grafik 7.	Piramdida Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	14
Grafik 8.	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	16
Grafik 9.	Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	17
Grafik 10.	Kepemilikan Akta Kelahiran Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	18
Grafik 11.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	19
Grafik 12.	Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Penduduk Usia <5 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	20
Grafik 13.	Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Penduduk Usia 7 -24 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	20
Grafik 14.	Kemampuan Membaca Dan Menulis Huruf Latin & Lainnya Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	21
Grafik 15.	Data Siswa Di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	22
Grafik 16.	Data Siswa Raudhatul Athfal (Ra) Di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	23
Grafik 17.	Data Siswa Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	23
Grafik 18.	Data Siswa Madrasah Tsanawiyah (Mts) Di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	24
Grafik 19.	Data Siswa Madrasah Aliyah (Ma) Di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	24
Grafik 20.	Indeks Paritas Gender Siswa Di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	25
Grafik 21.	Indeks Disparitas Gender Siswa Di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	25
Grafik 22.	Data Siswa Pada Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	26

Grafik 23.	Indeks Paritas Dan Disparitas Peserta Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	27
Grafik 24.	Penyebab Kematian Ibu Hamil Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.	29
Grafik 25.	Penyebab Kematian Ibu Pasca Melahirkan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	30
Grafik 26.	Cakupan Tablet Zat Besi (Fe3) Untuk Ibu Hamil Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	30
Grafik 27.	Jumlah Kunjungan K1 Ibu Hamil Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	31
Grafik 28.	Jumlah Kunjungan K4 Ibu Hamil Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	31
Grafik 29.	Sumber Daya Kesehatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	32
Grafik 30.	Sumber Daya Non Nakes Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	32
Grafik 31.	Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	33
Grafik 32.	Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Di Fasyankes Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	33
Grafik 33.	Peserta Kb Baru Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	35
Grafik 34.	Peserta Kb <i>Drop Out</i> Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	36
Grafik 35.	Prevelansi Peserta Kb Aktif Per Kecamatan (Dalam Persen) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	37
Grafik 36.	Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Masyarakat Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	38
Grafik 37.	Pasangan Usia Subur Peserta Aktif Kb Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	39
Grafik 38.	Peserta Aktif Kb Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	40
Grafik 39.	Penderita Hiv/Aids Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	40
Grafik 40.	Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	42
Grafik 41.	Data Pekerja Berdasarkan Bidang Pekerjaan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	44
Grafik 42.	Penanam Modal Dalam Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	46
Grafik 43.	Jumlah Pemilik Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	46
Grafik 44.	Gambaran Umkm Dan Koperasi Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	47
Grafik 45.	Pelaku Umk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	48
Grafik 46.	Indeks Paritas Pelaku Umk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	48
Grafik 47.	Indeks Dispartitas Gender Pelaku Umk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	49
Grafik 48.	Pengurus Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	50

Grafik 49.	Indeks Paritas Pengurus Koperasi Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	51
Grafik 50.	Disparitas Gender Pengurus Koperasi Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	52
Grafik 51.	Anggota Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	52
Grafik 52.	Indeks Paritas Anggota Koperasi Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	53
Grafik 53.	Disparitas Gender Anggota Koperasi Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	54
Grafik 54.	Jumlah Ikm Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	54
Grafik 55.	Sebaran Ikm Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	55
Grafik 56.	Pekerja Ikm Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	56
Grafik 57.	Jumlah Pemilik Kios Dan Los Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	56
Grafik 58.	Indeks Paritas Dan Disparitas Gender Kepemilikan Kios Dan Los Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	57
Grafik 59.	Pemilik Los Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	57
Grafik 60.	Pemilik Kios Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	58
Grafik 61.	Data Jumlah, Pelaku Dan Pekerja Udkm Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	59
Grafik 62.	Petani Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	61
Grafik 63.	Indeks Paritas Petani Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	62
Grafik 64.	Jumlah Dan Jenis Kelamin Kelompok Tani Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	63
Grafik 65.	Indeks Paritas Anggota Kelompok Tani Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	64
Grafik 66.	Data Kelompok Wanita Tani (Kwt) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	65
Grafik 67.	Petugas Penyukuh Lapangan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	66
Grafik 68.	Indeks Paritas Ppl Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	67
Grafik 69.	Petani Perkebunan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	67
Grafik 70.	Peternak Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	68
Grafik 71.	Data Kelompok Perikanan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 ..	69
Grafik 72.	Usaha Transportasi Dan Perhubungan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	70
Grafik 73.	Kunjungan Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	71
Grafik 74.	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	72

Grafik 75.	Pelaksanaan Pprg Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	74
Grafik 76.	Pelebagaan Pug Dan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	74
Grafik 77.	Regulasi Dan Kebijakan Daerah Yang Berbasis Pug Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	75
Grafik 78.	Pns Lulusan Sd Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	76
Grafik 79.	Pns Gol I Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	76
Grafik 80.	Pns Gol Ii Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	77
Grafik 81.	Indeks Paritas Gender Pns Gol Ii Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	77
Grafik 82.	Disparitas Gender Pns Gol Ii Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	78
Grafik 83.	Pns Gol Iii Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	78
Grafik 84.	Indeks Paritas Gender Pns Gol Iii Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	79
Grafik 85.	Disparitas Gender Pns Gol Iii Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	79
Grafik 86.	Pns Gol Iv Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	80
Grafik 87.	Indeks Paritas Gender Pns Gol Iv Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	80
Grafik 88.	Disparitas Gender Pns Gol Iv Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	81
Grafik 89.	Pejabat Eselon Iii Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	81
Grafik 90.	Pejabat Eselon Iv Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	82
Grafik 91.	Indeks Paritas Pejabat Eselon Iv Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	83
Grafik 92.	Disparitas Gender Pejabat Eselon Iv Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	83
Grafik 93.	Pns Guru Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	84
Grafik 94.	Indeks Paritas Pns Guru Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	84
Grafik 95.	Disparitas Gender Pns Guru Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	85
Grafik 96.	Pns Tenaga Medis Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	86
Grafik 97.	Indeks Paritas Pns Tenaga Medis Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	86
Grafik 98.	Disparitas Gender Pns Tenaga Medis Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	87
Grafik 99.	Hakim Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	87

Grafik 100.	Jaksa Dan Petugas Pembantuan Kejaksaaan Negeri Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	88
Grafik 101.	Pelayanan Publik Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	89
Grafik 102.	Korban Seksual Dan Fisik Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 ...	92
Grafik 103.	Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Berdasarkan Status Pernikahan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	92
Grafik 104.	Pelayanan Medis/Visum Pada Korban Dan Pelaku Kekerasan/Tppo Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	93
Grafik 105.	Keluarga Rawan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	94
Grafik 106.	Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	95
Grafik 107.	Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	96
Grafik 108.	Rekapitulasi Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	96
Grafik 109.	Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Gender Dan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	97
Grafik 110.	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	99
Grafik 111.	Indeks Paritas Gender Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	100
Grafik 112.	Indeks Disparitas Gender Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	100
Grafik 113.	Data Pernikahan Pertama Usia < 21 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	101
Grafik 114.	Indeks Paritas Gender Usia Pernikahan Pertama < 21 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	102
Grafik 115.	Indeks Disparitas Gender Usia Pernikahan Pertama < 21 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	103
Grafik 116.	Sebaran Panti Asuhan Anak Per-Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	104
Grafik 117.	Data Persalinan Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	105
Grafik 118.	Kasus Kematian Bayi Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	106
Grafik 119.	Kasus Bayi Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	107
Grafik 120.	Instansi Layak Anak Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	109
Grafik 121.	Anggaran Ramah Anak Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	110
Grafik 122.	Tenaga Ppt/P2tp2a Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	112
Grafik 123.	Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Atau Diperlakukan Salah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah	114
Grafik 124.	Usia Korban Kekerasan < 18 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	115
Grafik 125.	Indeks Paritas Korban Kekerasan < 18 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	115
Grafik 126.	Indeks Disparitas Gender Korban Kekerasan < 18 Tahun Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	116

Grafik 127.	Tingkat Pendidikan Korban Kekerasan (Sd) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	116
Grafik 128.	Tingkat Pendidikan Korban Kekerasan (Smp) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	117
Grafik 129.	Tingkat Pendidikan Korban Kekerasan (Sma) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	118
Grafik 130.	Tingkat Pendidikan Pelaku Kekerasan (Sd, Smp, Sma) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	120
Grafik 131.	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Per-Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	121
Grafik 132.	Perlindungan Khusus Per-Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	122
Grafik 133.	Anak Terlantar Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah	123
Grafik 134.	Pekerja Anak Di Kabupaten Lampung Tengah	124
Grafik 135.	Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	126
Grafik 136.	Indeks Pembangunan Gender Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 .	127
Grafik 137.	Indeks Pemberdayaan Gender Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender.

Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai hasil ratifikasi *Convention on the Right on the Child* (CRC) yang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Berbagai upaya untuk penyediaan data terpilah di kementerian/lembaga dan daerah telah banyak dilakukan antara lain melalui nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan pimpinan kementerian/lembaga, dan seluruh kepala daerah provinsi. Hal yang sama juga dilakukan nota kesepahaman bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penyediaan data dan informasi gender dan anak. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Dalam rangka melaksanakan Permen PPA No 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah membentuk tim penyusunan data terpilah gender dan anak tahun 2019.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian analisis data gender dan anak ini, meliputi konsep dan definisi data terpilah termasuk anak, statistik gender dan anak. Dalam implementasinya meliputi seluruh aspek kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data terpilah, serta saran pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender dan anak di Kabupaten Lampung Tengah.

C. SISTEMATIKA

Laporan ini ditujukan terutama bagi penyelenggaraan sistem data gender dan anak serta pemanfaat lainnya. Adapun sistematikanya dimulai dengan menguraikan latar belakang dan ruang lingkup, bagian berikutnya adalah pokok-pokok pelebagaan sistem data gender dan anak, selanjutnya adalah implementasinya berupa pengumpulan dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatan data terpilah dan analisis gender.

BAB II

KONSEP DAN METODE

SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

A. KONSEP DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Prinsipnya konsep dan metode yang dipakai harus menghindari bias gender. Bias gender disini diartikan sebagai pendapat, pandangan, perlakuan terhadap sesuatu atas dasar prasangka yang belum tentu benar. Konsep bahwa kepala keluarga itu laki-laki adalah konsep yang bias gender. Memandang kepala keluarga sebagai responden atas nama keluarganya itu juga dianggap metode yang bias gender. Karena sebagai perempuan dan sebagai laki-laki bisa berbeda dalam kebutuhan memandang keadaan sesuatu, dalam kebutuhan, kesempatan, tantangan. Ini berarti konsep dan definisi serta metode pengumpulan data yang digunakan harus dikembangkan agar dapat “menangkap” perbedaan-perbedaan itu.

Konsep dan metode pengumpulan data yang bias gender membuka kemungkinan adanya *underreporting* atau bisa juga informasi yang dicari tidak terungkap (hidden statistics). Misalnya isu berkaitan dengan konsep “kekerasan terhadap perempuan” bagi sebagian orang/budaya kita dianggap sebagai bagian menjadi perempuan. Sementara dikebudayaan lain kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan.

Dari perspektif gender, data agregate juga disebut bias gender karena mengabaikan kenyataan masyarakat itu beragam, antara lain terdiri dari perempuan dan laki-laki.

Metode pengumpulan data terpilah dapat dilakukan melalui berbagai cara pengumpulan data. Namun dalam keseluruhan proses pengumpulan data harus selalu dengan lensa gender, misalnya dalam perumusan masalah (ada mengandung isu gender, rencana penelitian (informan dan sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan), data dipilah menurut jenis kelamin dan umur dan harus selalu memandangnya dari perspektif gender, artinya sejak semula pemilahan data menurut jenis kelamin dan umur adalah keharusan.

B. WAKTU PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah 2020 ini dilakukan dalam kurun waktu Februari – Maret 2020.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian berperspektif gender dan anak ini antara lain: sensus, survei, wawancara mendalam, pencatatan dan pelaporan,

- 1) Sensus adalah pencacahan lengkap dari unit amatan. Dalam sensus, pengintegrasian isu gender dimulai sejak perumusan tujuan dan penyusunan kuesioner. Sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.
- 2) Survei adalah pencacahan yang dilakukan melalui sampel dari unit amatan. Dalam survei, pengintegrasian isu gender dimulai sejak merumuskan tujuan penelitian dan penyusunan kuesioner. Didukung oleh pilihan variabel dan sub-variabel yang bisa mendapatkan data dan informasi spesifik perempuan dan spesifik laki-laki. Untuk pendalaman isu gender, dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang cocok/relevan, lebih bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam.
- 3) Wawancara mendalam merupakan bentuk penelitian yang fokus pertanyaannya ditujukan pada responden individu untuk mendorong responden lebih ‘terbuka’ menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa dipengaruhi, dan tidak merasa terintimidasi. Keterampilan interviewer (yang mewawancarai) diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan kondusif, menciptakan kepercayaan, sehingga responden bisa mengungkapkan jawabannya dengan leluasa. Wawancara mendalam merupakan metode yang paling baik untuk ‘menggali’ data dan informasi yang detail, sensitif, dan kontroversial (seperti halnya dengan isu yang berkaitan dengan gender).
- 4) Pencatatan dan pelaporan. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat dikumpulkan melalui formulir yang sudah ada yang dikumpulkan/dilaksanakan/dicatat secara rutin oleh kementerian/lembaga dan daerah, misalnya administrasi kepegawaian. Jika tidak ada data terpilah menurut jenis kelamin, bisa ditambahkan satu kolom untuk jenis kelamin pada formulir yang sudah ada. Dalam Pelaporan data dan informasi yang dipisahkan dengan jelas untuk masing-masing jenis kelamin, dianalisa dengan menambah variabel-variabel/sub-sub variabel misalnya (1) tingkat pendidikan, (2) disiplin ilmu, (3) tingkat eselon, (4) lama kerja, dst. Jika ada kesenjangan gender, disebutkan juga apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kesenjangan; bisa juga ditambahkan bagaimana mengatasinya.
- 5) Penelitian/kajian, keduanya bisa mendapatkannya data langsung dan responden, tetapi juga melalui review publikasi/laporan yang sudah ada (dari data sekunder). Tetapi dalam menjalankan kedua metode ini tetap dari perspektif gender (lihat bagian survei).
- 6) Metode observasi merupakan cara yang efektif untuk melengkapi data yang sudah ada. Agar terfokus pada data dan informasi yang dicari dan tidak bias gender, pengamatan dilengkapi dengan panduan sebagai instrumen. Data dan informasi tentang kejadian atau tingkah laku digambarkan secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Jadi mengumpulkan data dengan metode observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi peneliti melakukan observasi harus tidak subjektif dan impresionistik dan tidak bias (termasuk bias gender).

- 7) Data terpilah juga bisa diambil dari FGD. Misalnya (1) jumlah partisipasi peserta perempuan dan peserta laki-laki; (2) data yang berkaitan dengan opini perempuan dan opini laki-laki (jika ada perbedaan) terhadap isu yang menjadi fokus; (3) data yang memperlihatkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki peserta FGD terhadap pilihan fokus.
- 8) Dokumen review. Pengumpulan data terpilah juga dapat dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang telah dihasilkan, seperti: (1) produk kebijakan berupa peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah, MoU, dll) apakah peraturan perundang-undangan tersebut responsif terhadap isu gender dan permasalahan hak anak. Demikian halnya dengan produk-produk lainnya seperti bahan ajar, kurikulum, dan KIE. Cara mudah melakukan gender review dokumen adalah dengan mempersiapkan check list yang berisi beberapa variabel/sub-sub variabelnya/indikator yang dipakai untuk mengukur misalnya sampai seberapa jauh dokumen itu (1) responsif gender; (2) memberi kesetaraan gender; (3) menghasilkan kesetaraan gender; dan (4) memberi pemberdayaan.

Untuk kepentingan pengumpulan data pada penelitian ini, tim peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 4 dan 5, yaitu pencatatan dan pelaporan serta penelitian/kajian.

D. SUMBER DATA

Data primer, yaitu data yang bersumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Tengah, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Tengah.

E. PENGELOMPOKAN DATA

Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosialekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan status

perlindungan anak, latar belakang budaya, kecacatan. Kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas diantara kehidupan kelompok perempuan dan diantara kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006) mendefinisikan Statistik Gender sebagai statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi **perempuan** dan laki-laki dalam bidang kehidupan. Konsep dan definisi tersebut diatas sejalan dengan Platform Tindak Lanjut Kesepakatan Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing (Beijing Platform for Action, 1995); dan meminta layanan statistik ditingkat nasional (sub-nasional), regional dan internasional menghasilkan statistik dan informasi: (1) yang berkaitan dengan individu, dikumpulkan, disusun, dianalisa dan disampaikan menurut jenis kelamin dan umur; dan (2) yang mencerminkan masalah/isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan kehidupan laki-laki dalam masyarakat (United Nations, 1995, para 206(a)). Di Indonesia mengenai data terpilah ini tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

Dalam upaya meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan kesetaraan gender, serta penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seluruh sektor pembangunan baik pusat maupun daerah, diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur. Selanjutnya data terpilah itu harus dianalisa dengan variabel-variabel yang relevan dan spesifik sesuai dengan kebutuhan.

Jenis data gender dalam penelitian ini dikelompokkan dalam:

- a) Data gender bidang demografi
- b) Data gender bidang pendidikan
- c) Data gender bidang ekonomi
- d) Data gender bidang pemerintahan dan politik
- e) Data gender bidang hukum dan HAM
- f) Data gender bidang sosial kemasyarakatan

Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi:

- a) Hak sipil dan kebebasan
- b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d) Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- e) Perlindungan khusus.

F. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 secara umum menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Langkah pertama adalah menghitung indeks paritas dan disparitas kinerja perempuan dan laki-laki.

Langkah kedua adalah analisis data gender dan anak menggunakan kerangka *Gender Analysis Pathways and Policy Outlook for Planning* (GAP dan POP) dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dibantu para ahli gender. GAP dan POP terdiri dari dua komponen yaitu (1) komponen GAP dipandu 5 langkah untuk menganalisa dengan perspektif gender dan (2) komponen POP dipandu 4 langkah untuk memformulasikan kegiatan aksi kedepan; menentukan piranti pemantauan dan pengukuran hasil.

Untuk analisis data anak menggunakan kerangka analisis pemenuhan hak anak. Beberapa metode analisis pemenuhan hak anak yang dapat digunakan antara lain: Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA), Pendekatan Anak Berbasis Sistem (*System Based Approach*), dan saat ini sedang dikembangkan GAP-Plus.

BAB III

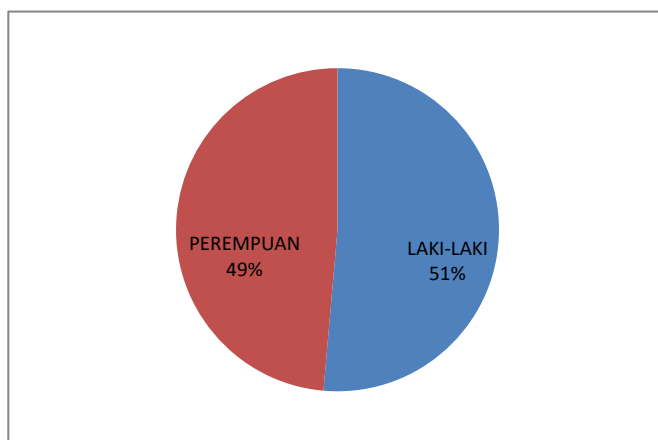
PENYAJIAN DATA TERPILAH

A. DATA GENDER BIDANG DEMOGRAFI

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demografi.

1) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Lampung Tengah 2019



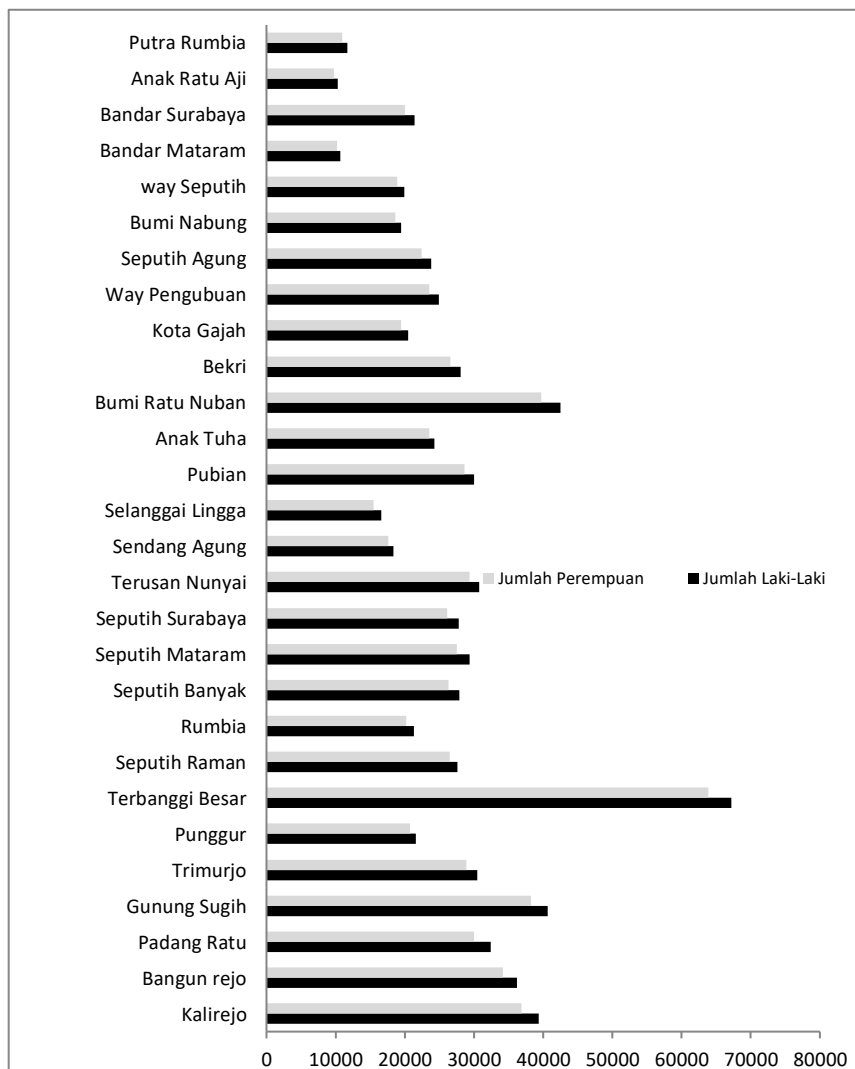
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah seluruhnya berjumlah 1.469.537 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 755.134 jiwa atau 51,39 % dan jumlah penduduk perempuan sebesar 714.403 jiwa atau 48,61 persen (lihat Gambar 1). Komposisi jumlah penduduk ini, indeks paritas gender **0,946** di mana terdapat kesenjangan kinerja, yaitu kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kinerja laki-laki. Sedangkan analisis disparitas menghasilkan angka minus 2,77 % untuk kinerja perempuan.

Mengetahui komposisi jenis kelamin penduduk di suatu daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan stakeholder yang ada dalam menyusun rencana pembangunan. Pada

dasarnya, pembangunan suatu negara jelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam setiap proses pembangunan mempunyai beragam pendekatan. Namun demikian, capaian pembangunan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali -laki-laki dan perempuan-, pada kenyataannya seringkali belum bisa dinikmati secara merata, dalam artian pembangunan belum memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang semula diasumsikan akan bermanfaat secara keseluruhan – netral- baik kepada laki-laki maupun perempuan, pada kenyataannya memberi kontribusi bagi timbulnya ketidakadilan dan kesenjangan gender (Subiyantoro 2005:1).

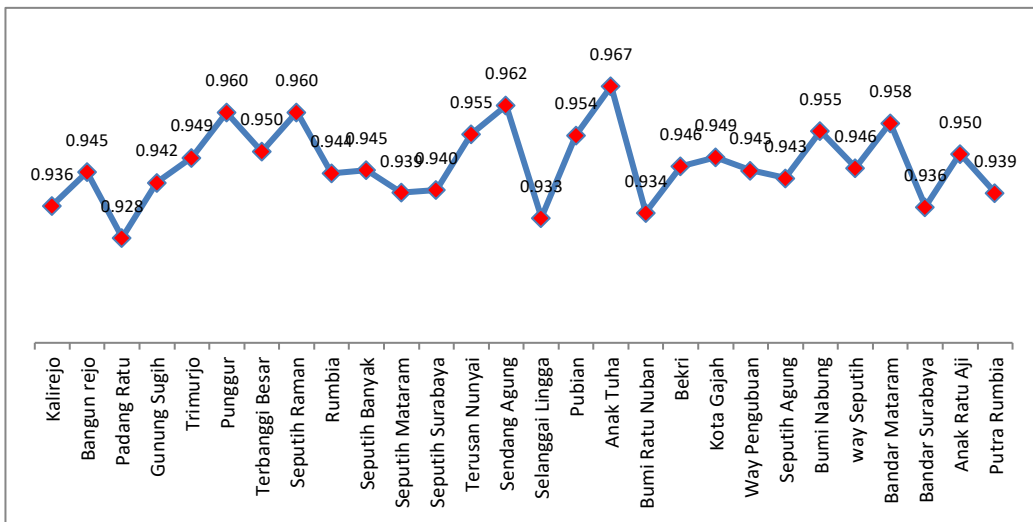
Grafik 1. Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Terdapat 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, dengan persebaran penduduk paling tinggi adalah di Kecamatan Terbanggi Besar, dengan jumlah penduduk 131.049 jiwa atau 8,92%; diikuti oleh Kecamatan Bumi Ratu Nuban sebanyak 82.256 jiwa atau 5,60 % dan Kecamatan Gunung Sugih sebanyak 78.878 jiwa atau 5,37%. Jika dilihat lebih cermat, Grafik 1 menunjukkan pada kita bahwa pada seluruh kecamatan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi.

Grafik 2. Indeks Paritas Gender Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019

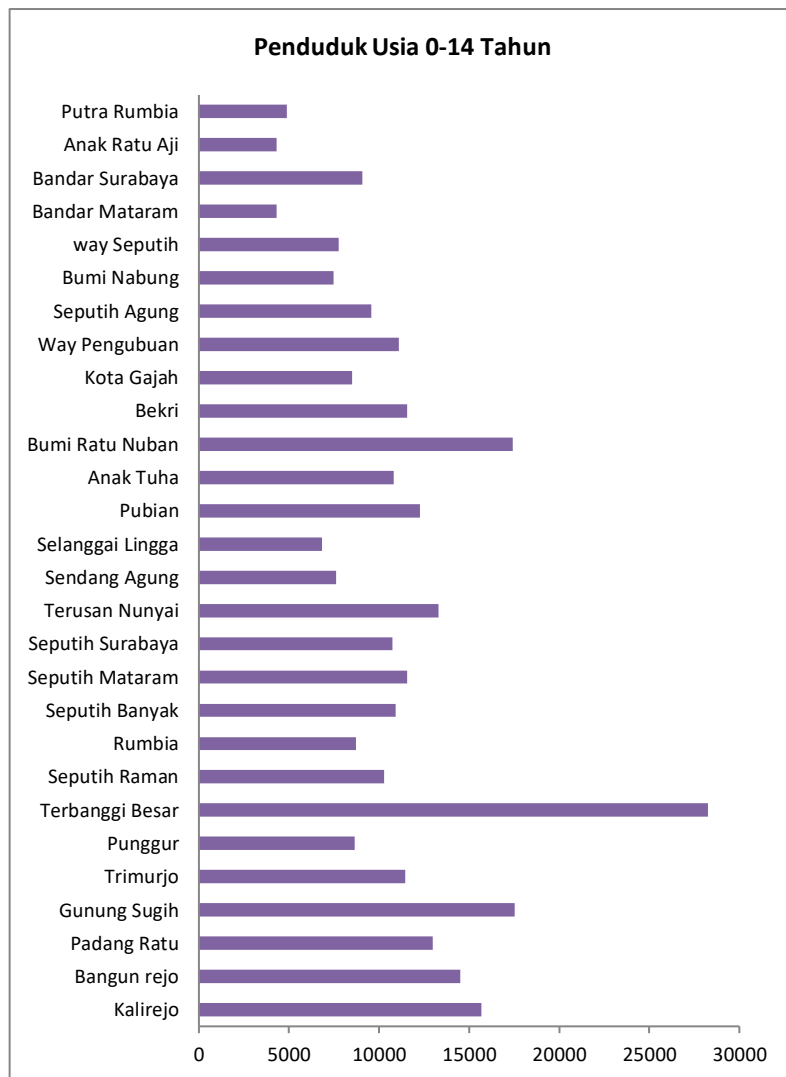


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 2 memperlihatkan indeks paritas gender jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pada data terlihat beberapa kecamatan menunjukkan tidak ada kesenjangan yang signifikan antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki antara lain Kecamatan Punggur (0,96), Kecamatan Terbanggi Besar (0,95), Kecamatan Seputih Raman (0,96), Kecamatan Terusan Nunyai (0,955) Kecamatan Sendang Agung (0,962), Kecamatan Pubian (0,954), Kecamatan Anak Tuha (0,967), Kecamatan Bumi Nabung (0,955), Kecamatan Bandar Mataram (0,958), dan Kecamatan Anak Ratu Aji (0,95).

Seperti trend pada jumlah penduduk secara umum, Kecamatan Terbanggi besar juga memiliki penduduk usia 0-14 tahun tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya (sejumlah 28.260 jiwa). Kecamatan berikutnya dengan jumlah penduduk usia 0-14 tahun adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban (17. 510 jiwa) dan Kecamatan Gunung Sugih (17.405 jiwa) (selengkapnya lihat Grafik 3).

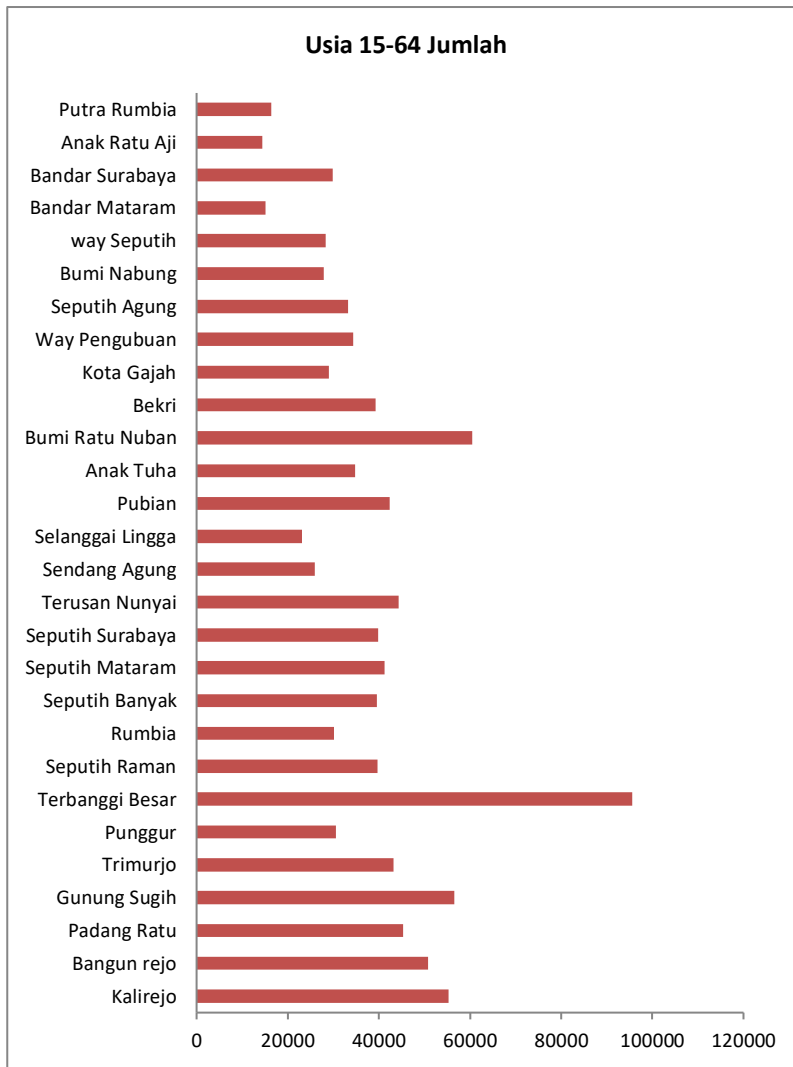
Grafik 3. Penduduk Kempok Usia 0 – 14 Tahun per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Selain mendominasi jumlah penduduk usia 0-14 tahun, Kecamatan Terbanggi Besar juga memiliki usia produktif (15-64 tahun) yang tertinggi yaitu 95.656 jiwa, kemudian Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan jumlah 60.535 jiwa, serta Kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah 56.506 jiwa (lihat Grafik 4).

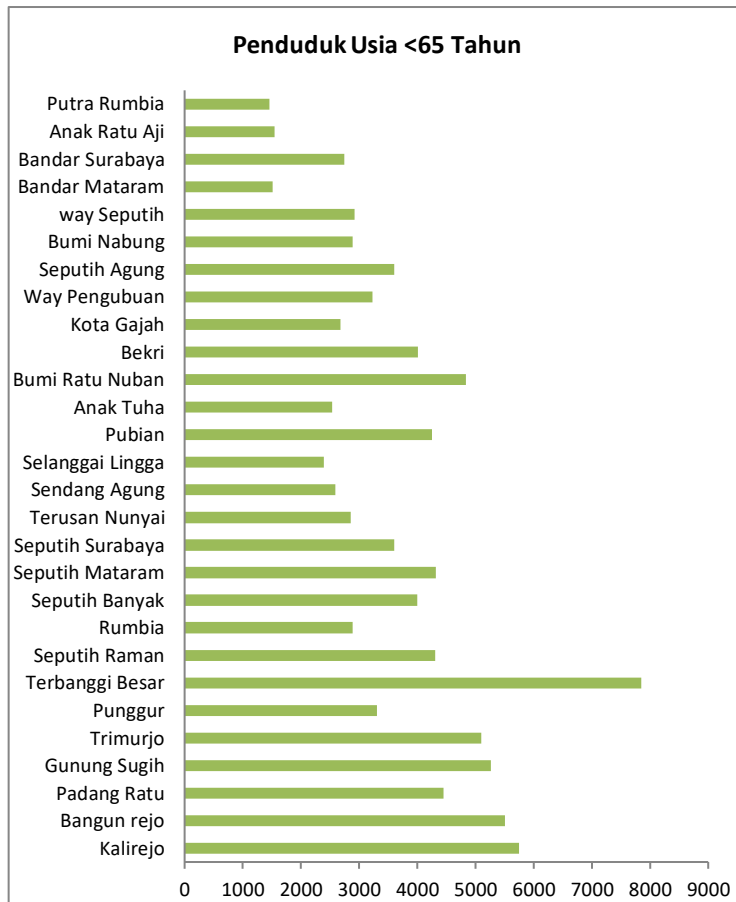
Grafik 4. Penduduk Kempok Usia 15— 64 Tahun per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Komposisi penduduk usia lanjut (< 65 tahun) per Kecamatan juga masih ditempati oleh Kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah 7.853 jiwa. Sedikit pengecualian terjadi pada peringkat kedua yaitu Kecamatan Kalirejo dengan jumlah penduduk usia lanjut sebanyak 5.747 jiwa. Ketiga yaitu Kecamatan Bangun Rejo yang memiliki penduduk usia lanjut sebanyak 5502 jiwa (lihat Grafik 5).

Grafik 5. Penduduk Kempok Usia <65 Tahun per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

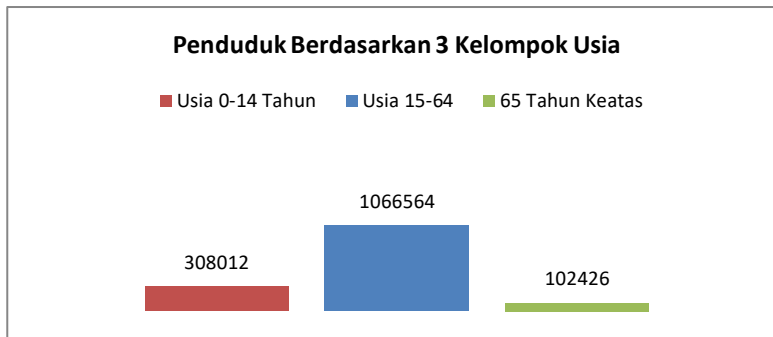


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

2) Penduduk Berdasarkan Umur: Bonus Demografi

Di dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15 – 64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas (Tjiptoherijanto, 2001). Jika penduduk di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan kembali dalam struktur umur tersebut maka akan diperoleh komposisi kelompok umur muda dan produktif didominasi oleh laki-laki, sedangkan kelompok umur usia tua didominasi oleh perempuan (Grafik 6).

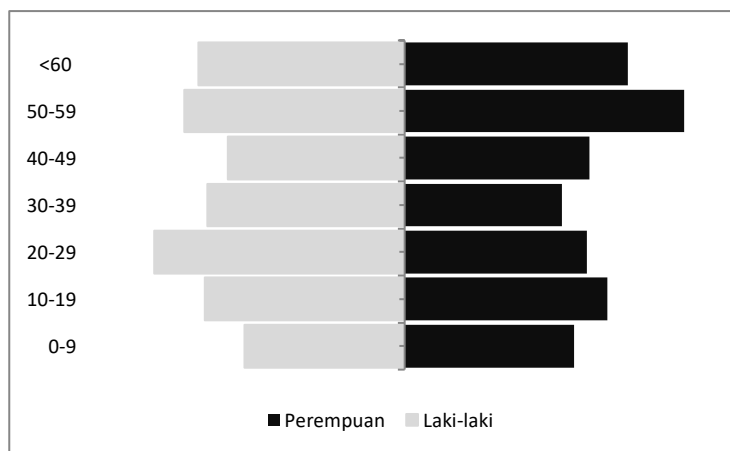
Grafik 6. Penduduk Berdasarkan 3 Kelompok Usia di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Bentuk piramida penduduk ini menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda atau berciri ekspansif. Menilik Grafik 7, maka komposisi usia penduduk Kabupaten Lampung Tengah dapat dikategorikan jenis ekspansif, di mana usia produktif mendominasi struktur penduduknya.

Grafik 7. Piramida Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Jika usia produktif 15-64 tahun (lihat Grafik 6) mendominasi piramida penduduk lebih dari 70 persen maka disebut sebagai bonus demografi. Kabupaten Lampung Tengah berada pada angka 72,58 persen. Fenomena ini tidak hanya di Kabupaten Lampung Tengah, namun secara keseluruhan Indonesia sedang berada pada posisi bonus demografi. Menurut

Noor (2015:1), dengan kondisi ini harapan adalah munculnya kesadaran akan peran strategis penduduk usia produktif, terutama kaum muda sebagai ‘motor penggerak’ bangsa. Pada dasarnya ada syarat untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi yaitu, terwujudnya penduduk berkualitas dengan tersedianya pendidikan yang baik, kemudian tersedianya layanan kesehatan yang baik, memiliki etos kerja, dan kebijakan yang menopang usia produktif agar berdaya guna. Bonus demografi ini dapat dinikmati jika:

- a) Pertama, suplai tenaga kerja produktif yang besar harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan perkapita naik dan bisa menabung yang akan meningkatkan tabungan nasional.
- b) Kedua, tabungan rumah tangga diinvestasikan untuk kegiatan produktif.
- c) Ketiga, jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan.
- d) Keempat, anggaran yang sebelumnya dipakai untuk anak usia 0-15 tahun karena jumlah berkurang, bisa dialihkan untuk peningkatan sumber daya manusia untuk usia 15 tahun ke atas seperti untuk traning, pendidikan, dan upaya pemeliharaan kesehatan remaja terutama kesehatan reproduksi dan penanggulangan perilaku tidak sehat seperti alkohol, narkoba, rokok dan seks bebas (Gunadi 2014).

Jika tidak mampu dimanfaat dengan baik, yaitu diikuti dengan langkah-langkah persiapan dan perencanaan di atas, maka bonus demografi ini akan menjadi ancaman. Idris (2014) menuliskan beberapa ancaman bonus demografi:

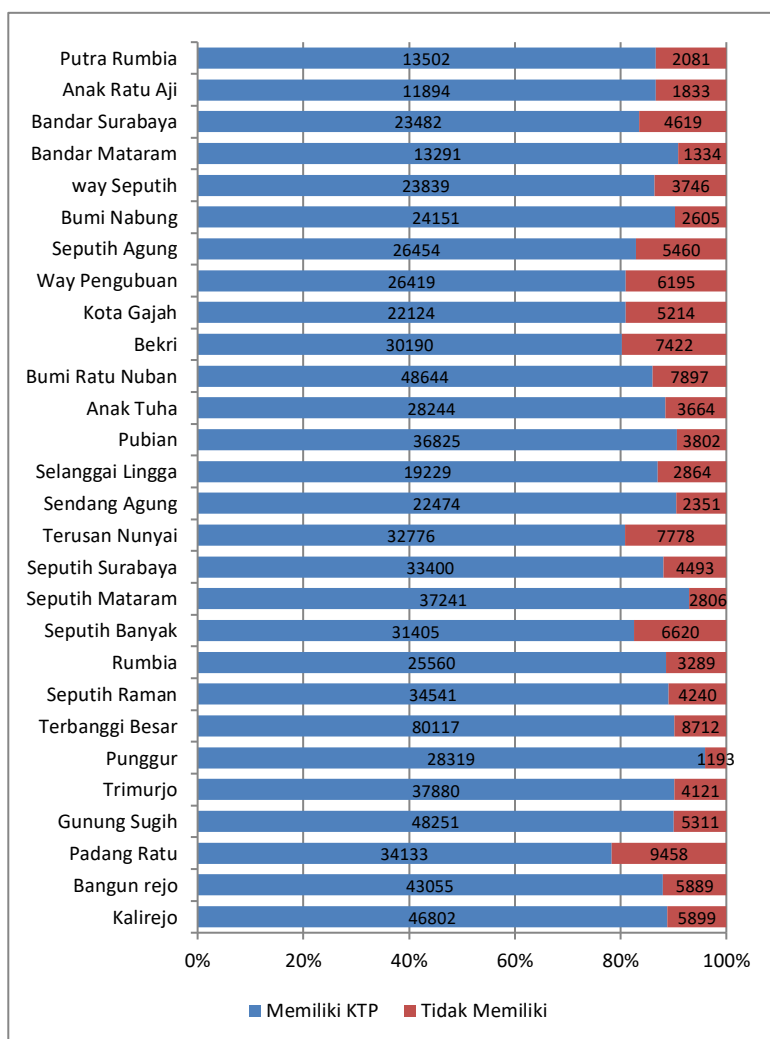
- a) Pengangguran besar-besaran. kekhawatiran yang lumrah mengingat bonus demografi itu sendiri adalah menonjolnya jumlah angkatan kerja. Pengangguran akan menciptakan kemiskinan. Dan kemiskinan akan menciptakan kejahatan.
- b) Banyak penduduk berpendidikan rendah. Hal ini bisa disebabkan karena kurang meratanya fasilitas pendidikan, pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
- c) Produktivitas nasional menurun. Ancaman ini terkait dengan dua ancaman sebelumnya. Ketika pengangguran dan banyak penduduk berpendidikan rendah, maka hampir pasti produktivitas nasional menurun. Selain karena banyak pengangguran, juga disebabkan lebih banyaknya angkatan pekerja berpendidikan rendah.
- d) Penduduk usia muda tergerus oleh 'budaya luar'. Kita tidak lagi peduli dengan kearifan budaya lokal. Hal ini juga yang dikhawatirkan oleh Prof. Sri Edi Swasono terkait ancaman bonus demografi. Ketika generasi muda kita sudah memegang teguh 'budaya luar', bukan hal yang tidak mungkin bahwa kelak kita seolah tidak memiliki identitas diri untuk dibanggakan.

3) Administrasi Kependudukan

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Menurut Abdullah et

al (2018) Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk diantaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan memperoleh status kewarganegaraan.

Grafik 8. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



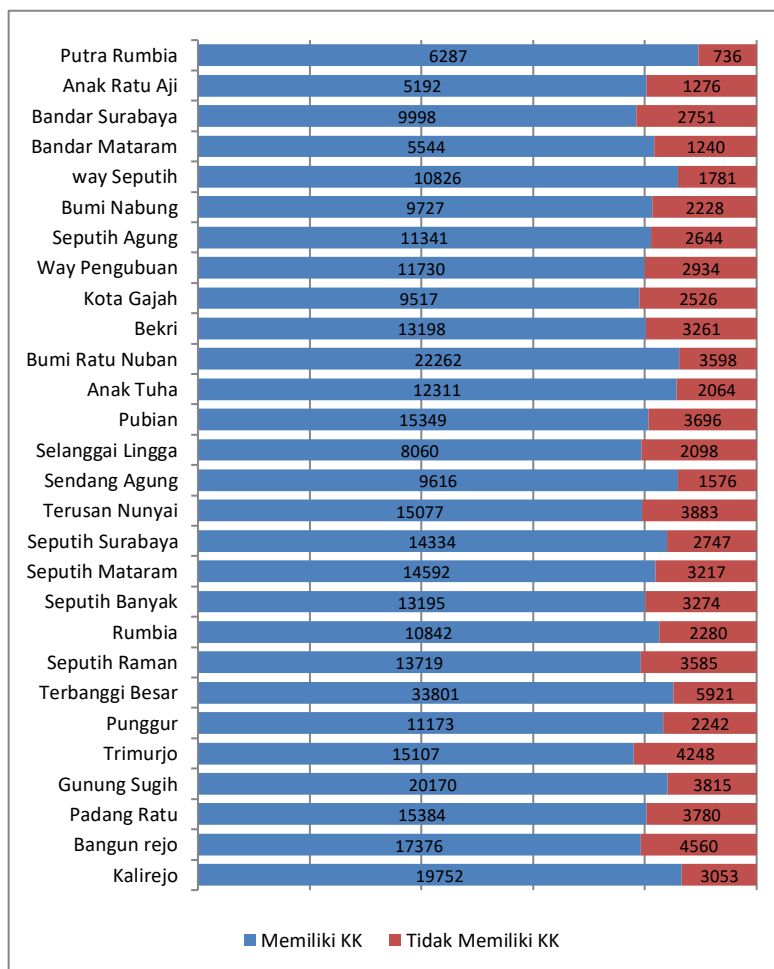
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan telah dimiliki oleh 87% dari total seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP (lebih dari 17 tahun).

Untuk data per kecamatan, tiga kecamatan dengan persentase kepemilikan KTP paling tinggi yaitu Kecamatan Punggur (95,96 %), Kecamatan Seputih Mataram (92,99%) dan Kecamatan Bandar Mataram (90,88%). Sedangkan tiga Kecamatan dengan persentase kepemilikan KTP terendah adalah Kecamatan Padang Ratu (78,3%), Kecamatan Bekri (80,27 %) dan Kecamatan Kota Gajah (80,93 %). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 8.

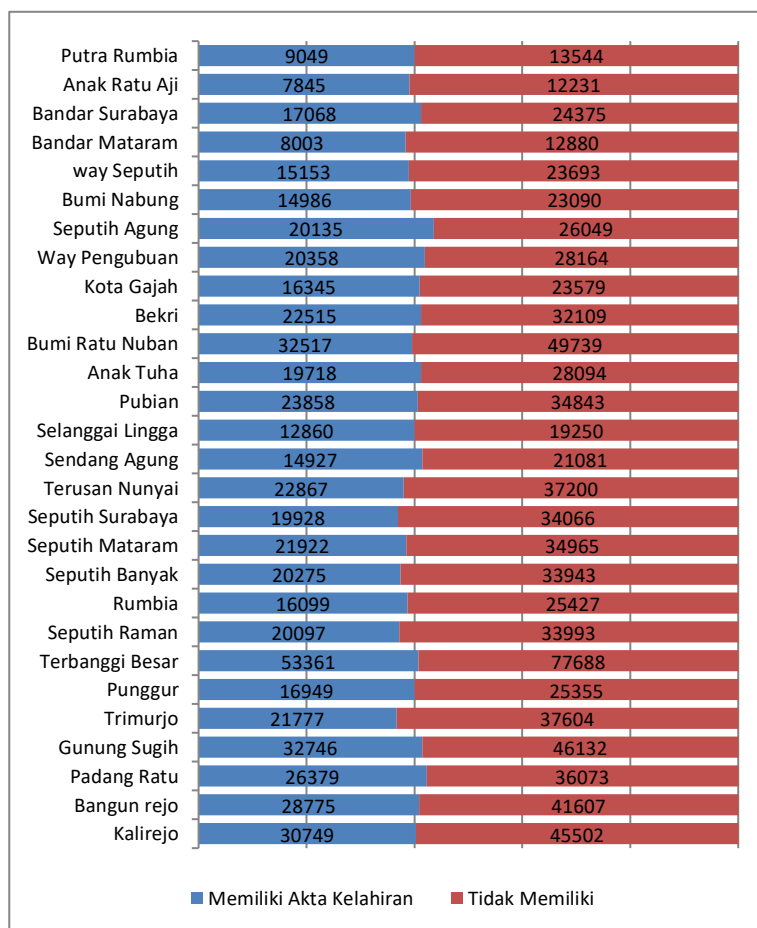
Grafik 9. Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Secara umum kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Lampung Tengah mencapai angka 82,62 % dari total seluruh KK yang ada (456.494 KK). Persentase kepemilikan KK paling tinggi di Kecamatan Anak Ratu Aji (90,92 % atau 5.192 KK), Kecamatan Putra Rumbia (90,01 % atau 6.287 KK), dan Kecamatan Bandar Surabaya (89,52 % atau 9.998 KK). Untuk kecamatan dengan persentase kepemilikan KK paling rendah yaitu Kecamatan Trimurjo (78,05 % atau 15.384 KK), Kecamatan Way Seputih (78,41 % atau 10.828 KK), dan Kecamatan Bumi Ratu Nuban (79,03 % atau 22.262 KK). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 9.

Grafik 10. Kepemilikan Akta Kelahiran Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Akta kelahiran secara umum baru dimiliki oleh 39,92 % atau 587.261 jiwa dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah. Tiga kecamatan dengan kepemilikan akta kelahiran paling tinggi di Kecamatan Seputih Agung (43,6 % atau 20.135 jiwa), Kecamatan Gunung Sugih (42,51 % atau 32.746 jiwa) dan Kecamatan Padang Ratu (42,24 % atau

26.379 jiwa). Sedangkan tiga kecamatan dengan kepemilikan akta kelahiran terendah yaitu Kecamatan Trimurjo (36,67 %), Kecamatan Seputih Surabaya (36,91 %) dan Kecamatan Seputih Raman (37,15 %). Selengkapnya sebaran persentase kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat pada Grafik 10.

Merefleksikan kembali data pada Grafik 8, 9 dan 10 salah satu kendala yang mungkin dialami oleh penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan antara lain tingkat pengetahuan dan pemahaman arti penting dan manfaat dokumen kependudukan, kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan syarat pengurusan, letak geografis yang tersebar, terpencil, dan jauh dari instansi berwenang, serta tidak ada kepentingan mendesak (Abdullah et al 2018).

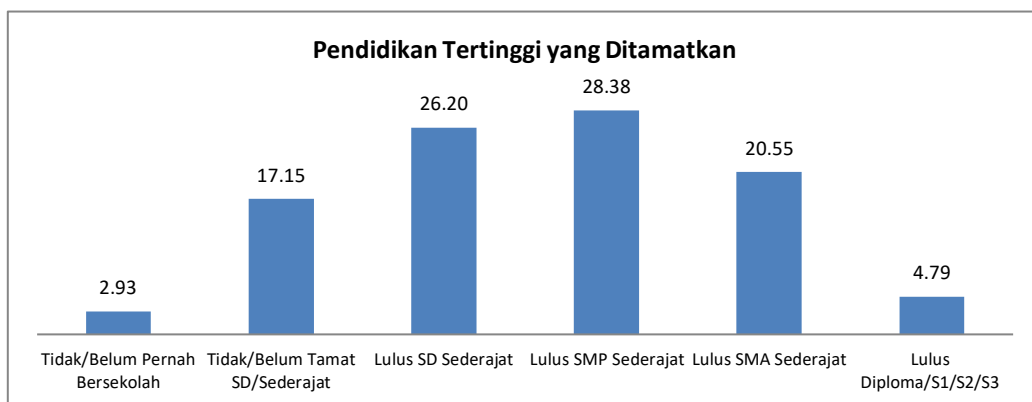
B. DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial, yang dapat berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan juga memiliki kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan dapat tercapai (Aini etl al. 2018).

Pendidikan juga merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik dan masyarakat pada umumnya (Ilma 2015).

1) Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Grafik 11. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

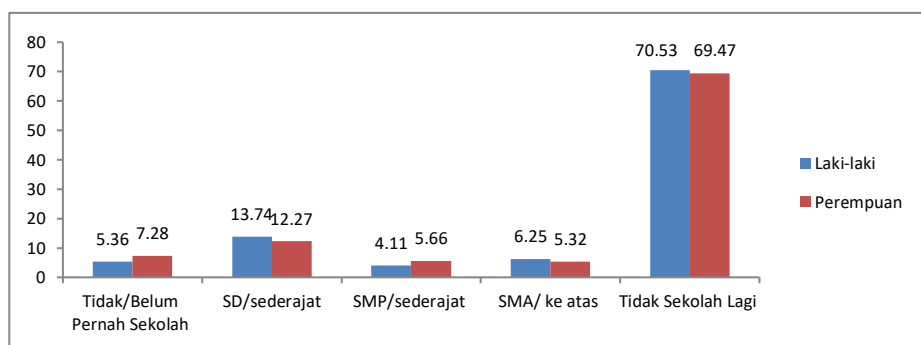


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Di Kabupaten Lampung Tengah, trend yang terlihat adalah tingkat pendidikan masyarakatnya adalah menengah pertama dan menengah atas, yaitu sebanyak 48,93 persen. Kemudian masyarakat dengan tingkat pendidikan dasar dan tidak sekolah/tidak menamatkan pendidikan dasar juga cukup tinggi, yaitu 46,28 persen. Sedangkan pendidikan tinggi (diploma dan sarjana) hanya dicapai oleh 4,79 persen penduduk (lihat Grafik 11).

2) Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia

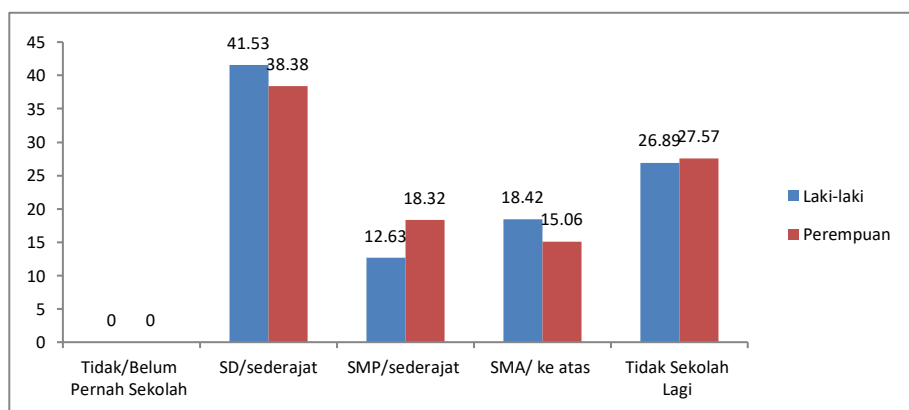
Grafik 12. Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia <5 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: BPS Kab Lampung Tengah, 2020.

Jika dikategorisari dalam usia (< 5 tahun) dan jenis kelamin, maka diperoleh presentase penduduk dengan jenis kelamin perempuan pada semua kategori pendidikan lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan penduduk jenis kelamin laki-laki yang berusia <5 tahun (lihat Grafik 12).

Grafik 13. Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 7 -24 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

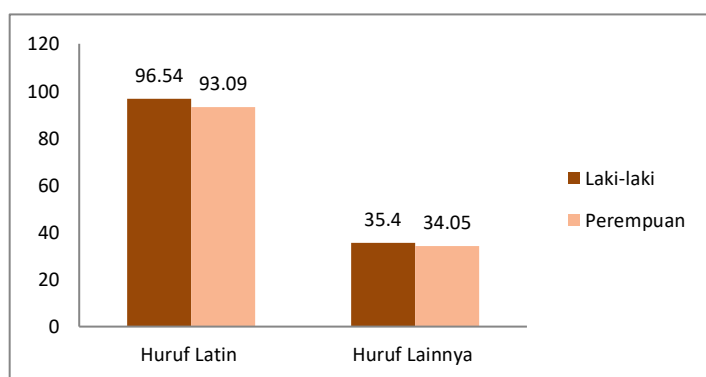
Sumber: BPS Kab Lampung Tengah, 2020. Pada kategorisasi rentang umur yang lebih sempit yaitu 7 – 24 tahun maka terdapat data yang menarik. Usia 7 -24 tahun adalah usia sekolah, dimana seseorang mulai memasuki jenjang Sekolah Dasar (usia 7 tahun) dan menamatkan pendidikan tingginya (usia 24 tahun). Grafik 13 menunjukkan pada kita, bahwa pada persentase jumlah penduduk perempuan pada usia Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun, data ini tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerja pendidikan perempuan tingkat SMP/ sederajat lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, karena tidak ada ada usia lebih rinci persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi.

3) Angka Melek Huruf Latin dan Lainnya

Angka melek huruf/kemampuan membaca dan menulis ini bersama-sama faktor lainnya, secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah (Jolianis et al. 2013; Anggadini 2015) dan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (Hajji dan Nugroho 2013) daerah tersebut.

Tahun 2012 melalui penelitiannya, Bakti dan Kodoatie (2012) tidak menemukan pengaruh antara desentralisasi fiskal dan angka melek huruf pada perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, Mujiati dan Purbasari (2014) dua tahun kemudian menemukan bahwa ada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat melek huruf di Provinsi Jawa Tengah. Setelah lima tahun berlalu dari penelitian Mujiyati dan Purbasari (2014), angka 93,09 persen perempuan melek huruf di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 dapat diduga karena adanya pengaruh desentralisasi fiskal ke daerah.

Grafik 14. Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin & Lainnya di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



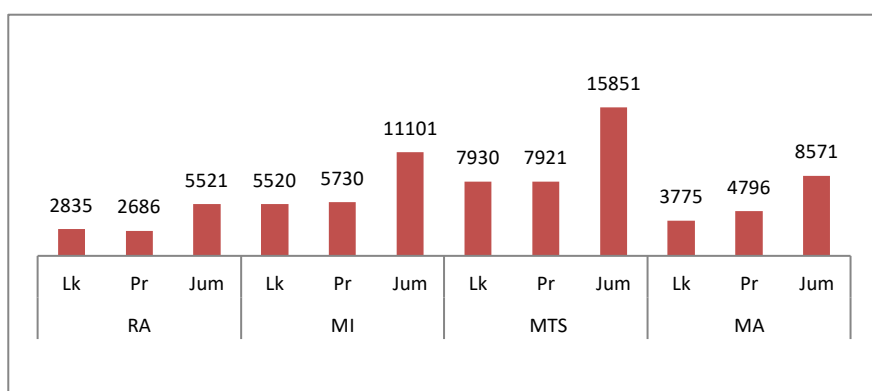
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Berkesinambungan dengan Grafik 7, sebanyak 2,93 persen penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang tidak/belum pernah tamat SD. Kondisi ini terkonfirmasi dengan distribusi kemampuan membaca dan menulis yang belum seratus persen, dengan distribusi sebanyak 96,54 persen laki-laki mampu membaca dan menulis. Angka ini lebih rendah pada perempuan yaitu sebanyak 93,09 persen perempuan mampu membaca dan menulis (lihat Grafik 14).

4) Sebaran Siswa di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama RI

Secara keseluruhan terdapat 41.044 siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama RI. Siswa paling banyak adalah pada jenjang Madrasah Tsanawiyah/MTS (atau setingkat SMP) sebanyak 15.851 siswa. Kemudian siswa Madrasah Ibtidaiyah/MI (setingkat SD) sebanyak 11.101 siswa. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 15.

Grafik 15. Data Siswa di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

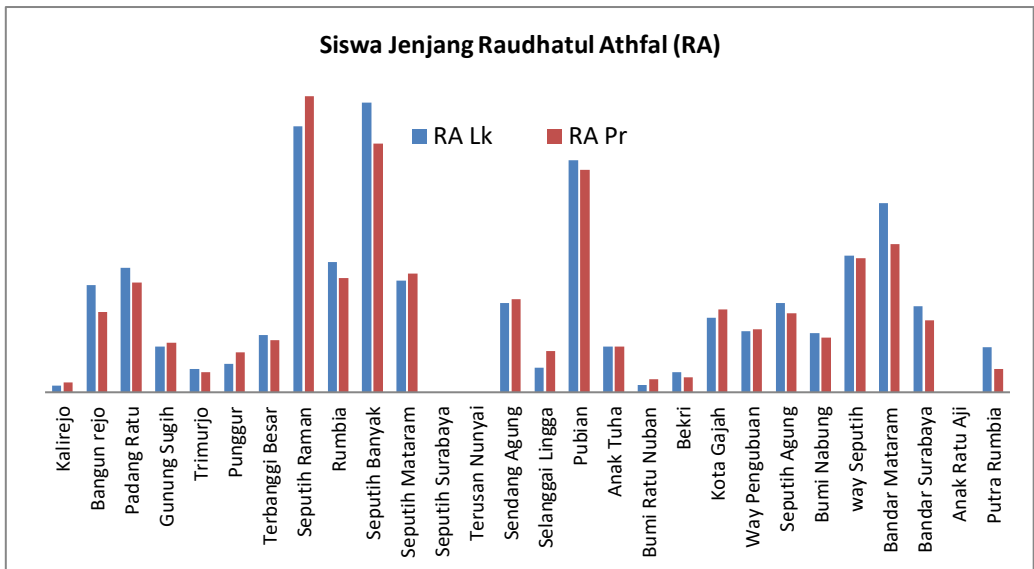


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pada Grafik 16 terlihat sebaran siswa RA (setingkat TK) pada 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dengan jumlah siswa paling tinggi ada di Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak dan Kecamatan Pubian. Tiga kecamatan yang tidak memiliki RA adalah Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Anak Ratu Aji.

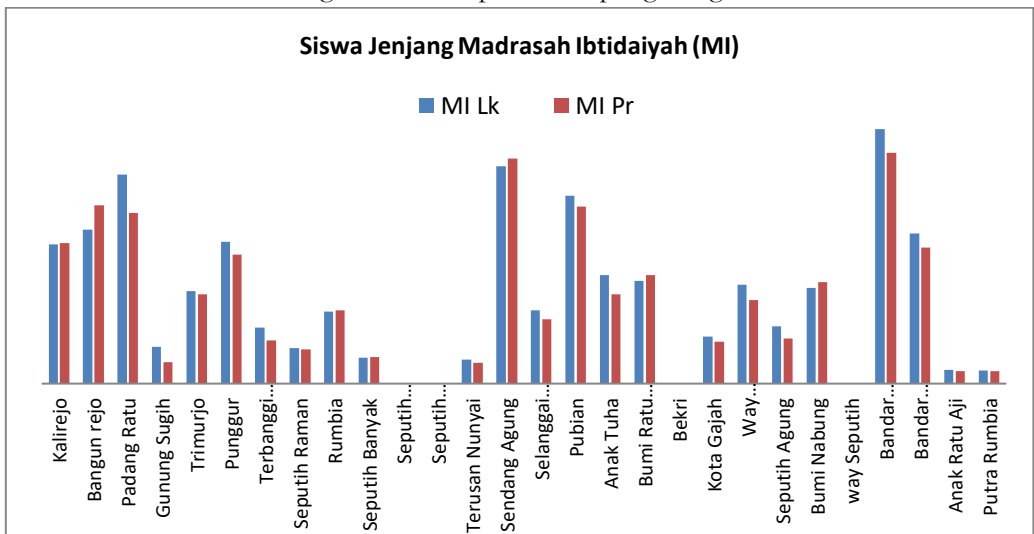
Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) terbanyak ada di Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Padang Ratu. Sedangkan ada empat kecamatan yang tidak memiliki Madrasah Ibtidaiyah yaitu Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bekri dan Kecamatan Way Seputih. Selengkapnya lihat Grafik 17.

Grafik 16. Data Siswa Raudhatul Athfal (RA) di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



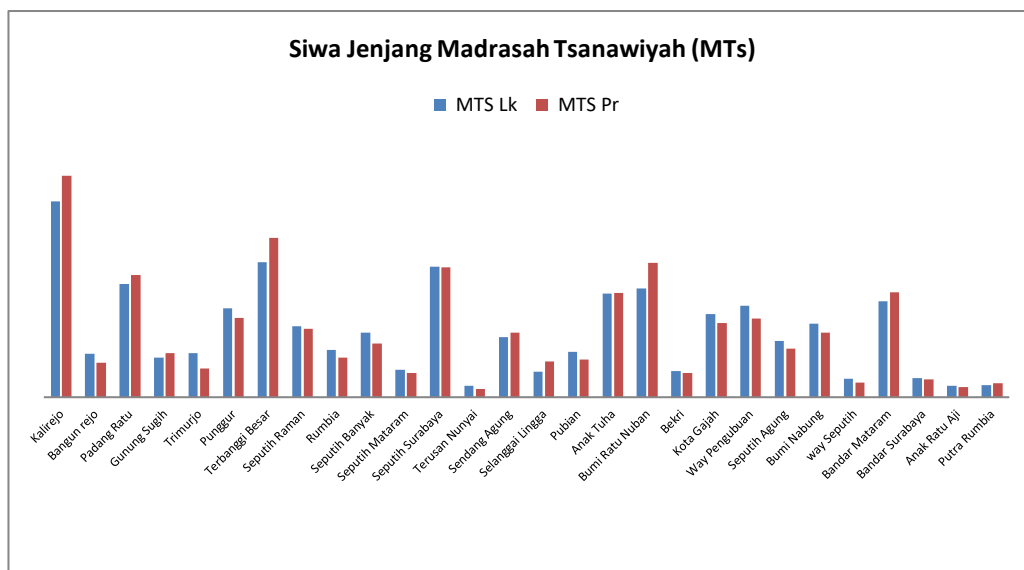
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 17. Data Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



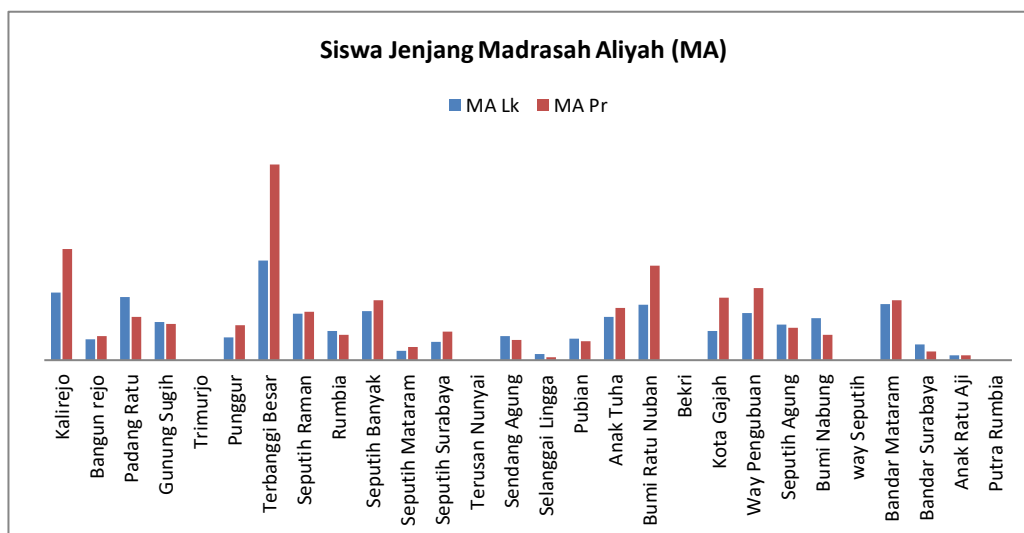
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 18. Data Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 19. Data Siswa Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 18 menunjukkan pada kita bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki Madrasah Tsanawiyah dengan berbagai keadaannya. Tiga kecamatan

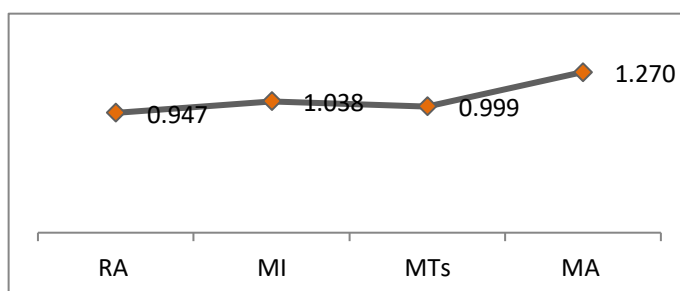
dengan siswa MTs terbanyak adalah Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Seputih Surabaya.

Hal yang menarik dari Grafik 21 adalah adanya lima kecamatan yang tidak memiliki Madrasah Aliyah, yaitu Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Seputih, dan Kecamatan Putra Rumbia. Komposisi siswa paling tinggi ada di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Kesimpulan cepat yang bisa diambil dari sajian Grafik 15 – 18 keberadaan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama belum merata diseluruh Kabupaten Lampung Tengah.

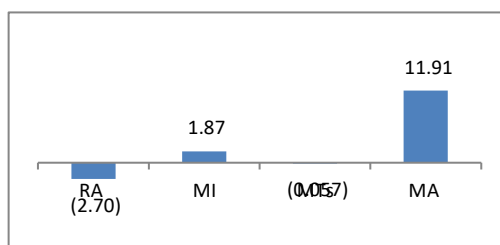
Indeks paritas gender terlihat pada sebaran siswa di lingkungan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Grafik 20) menunjukkan pada kita pada tingkatan Madrasah Ibtidaiyah (1,038) dan Madrasah Tsanawiyah (0,999) menunjukkan keseimbangan kinerja gender siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Grafik 20. Indeks Paritas Gender Siswa di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 21. Indeks Disparitas Gender Siswa di Bawah Satuan Pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

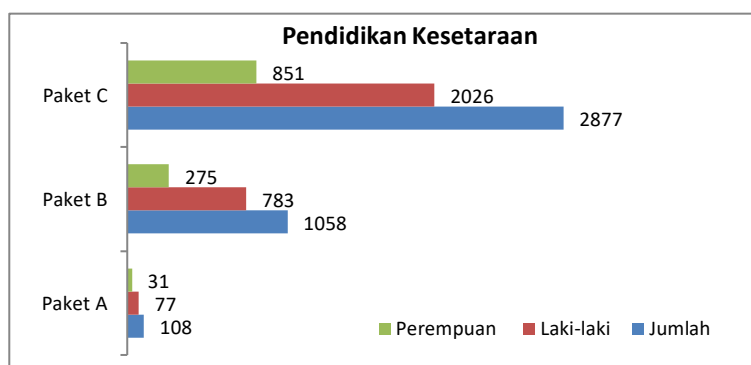
Analisis disparitas gender menunjukkan angka disparitas tertinggi di jenjang Madrasah Aliyah dengan kinerja murid perempuan lebih baik dari kinerja murid laki-laki. Sedangkan mendekati disparitas nol adalah pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 21).

5) Pendidikan Kesetaraan

Pasal 13 (tiga belas) ayat 1 (satu) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Sehingga jelas bahwa, kita harus memahami dengan baik pengertian dan segala hal yang berkaitan dengan jalur pendidikan yang telah diakui oleh negara.

Bagaimana efektivitas pendidikan kesetaraan ini? Winata (2011) dan Haruna (2018) menyimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan paket B dan C yang mereka teliti berjalan dengan efektif, meski ada hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyelenggara.

Grafik 22. Data Siswa pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

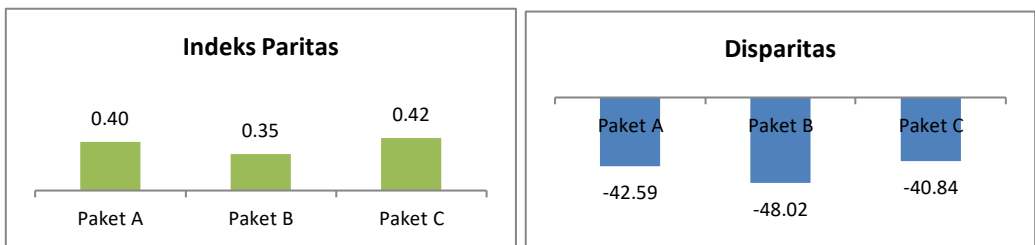
Pada Grafik 22 tersaji data siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C di Kabupaten Lampung Tengah. Secara keseluruhan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan ini berjumlah 4.043 siswa. Komposisi terbanyak adalah siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C. Dari data yang tersaji, jumlah siswa laki-laki lebih banyak dari siswa perempuan.

Grafik 23 menunjukkan bahwa indeks paritas gender pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lampung Tengah rendah, baik pada paket A, B maupun C. Namun data ini tidak bisa dikonfirmasi mengapa kinerja pendidikan kesetaraan perempuan lebih rendah. Ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah, misalnya apakah pada rentang umur tertentu ada hambatan psikologis dan sosial bagi perempuan untuk

mengikuti pendidikan kesetaraan. Indeks paritas paling rendah adalah pada Paket B, yaitu pendidikan setara sekolah menengah pertama (SMP). Keadaan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan khusus pendidikan kesetaraan yang berpihak pada perempuan. Lusiyan (2018) menyimpulkan bahwa efikasi diri dapat membuat siswa dengan kendala internal maupun eksternal bertahan dalam pendidikannya. Meski banyak hal positif dari pendidikan kesetaraan, namun Kinasih (2015) menemukan bahwa ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hak menyelenggarakan pendidikan kesetaraan untuk kepentingan pribadinya.

Grafik 23 juga menyajikan data disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan kesetaraan yang semuanya bernilai negatif, artinya kinerja perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan kinerja laki-laki baik di pada Paket A, B maupun C.

Grafik 23. Indeks Paritas dan Disparitas Peserta Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



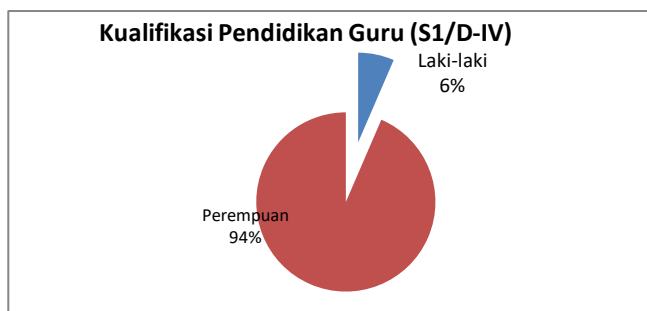
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

6) Kualifikasi Pendidik

Kualifikasi pendidikan guru di Kabupaten Pringsewu yang memiliki ijazah Sarjana Strata 1 atau Diplodma IV sebanyak 1.356 orang, dengan komposisi guru laki-laki sebanyak 88 orang dan guru perempuan sebanyak 1.268 orang guru (lihat Gambar 2). Komposisi ini menghasilkan indeks paritas gender sebesar 14,41 yang menunjukkan ada kesenjangan yaitu kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan indeks disparitas sebesar 87,02 % kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

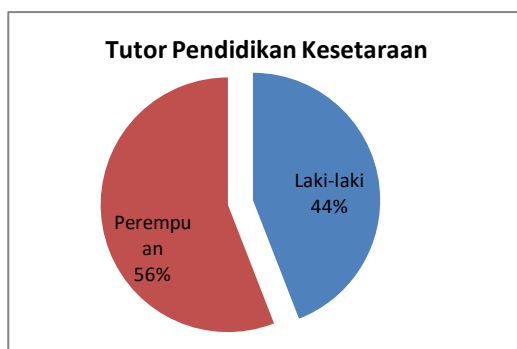
Pada kualifikasi tutor untuk pendidikan kesetaraan, data pada Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah tutor perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan jumlah 90 orang tutor perempuan dan 71 tutor laki-laki dengan jumlah keseluruhan 161 tutor. Kondisi ini menimbulkan indeks paritas gender sebesar 1,27 dengan arti bahwa kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Indeks disparitas gender yang tercipta yaitu sebesar 11,80 persen perbedaan kinerja perempuan dan laki-laki.

Gambar 2. Kualifikasi Pendidikan Guru (S1/D-IV)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Gambar 3. Jumlah Tutor Pendidikan Kesetaraan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

7) Sarana dan Prasarana: Perpustakaan

Tabel 1. Pengelola, Pengunjung dan Peminjam di Perpustakaan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2019

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	IP	IDG
1	Pengelola	21	20	0,95	-2,44
2	Pengunjung	676	1478	2,19	37,23
3	Peminjam Buku	182	498	2,74	46,47

Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Perpustakaan adalah suatu institusi yang mengelola materi perpustakaan yang diorganisir secara sistematis dengan aturan baku, dilayankan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para penggunanya. Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender (BSN -tanpa tahun: 2).

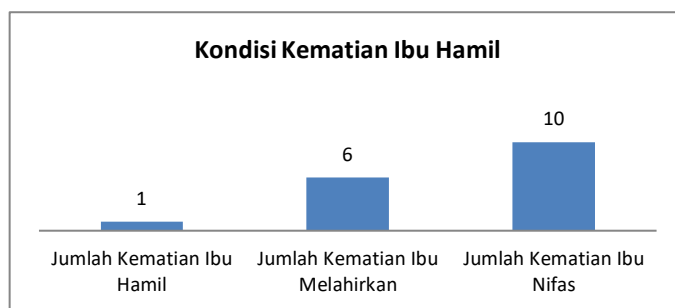
Secara umum kunjungan dan peminjaman buku di perpustakaan daerah di dominasi oleh perempuan (lihat Tabel 1). Total kunjungan perpustakaan selama tahun 2019 adalah 2.154 orang. Sehingga rasio kunjungan perpustakaan dengan jumlah penduduk 1:683. Hayuni Nurizzati (2017) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengunjung di Perpustakaan Daerah lokasinya tidak strategis dan tidak banyak dikenal oleh masyarakat; koleksi buku tidak lengkap dan pengunjung sulit menemukan buku-buku itu. Selanjutnya, fasilitas di perpustakaan tidak memadai. Hayuni Nurizzati (2017) kemudian menyarankan beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengunjung di Perpustakaan Daerah yaitu para pustakawan harus melakukan kegiatan promosi, menambah koleksi sesuai dengan kebutuhan pengunjung, memperbaiki ruangan dengan menata ulang buku di sekitar meja baca ke rak-rak yang telah disediakan.

C. . DATA GENDER BIDANG KESEHATAN

1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI), bersalin dan nifas juga merupakan bagian dari isu perempuan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kebijakan Departemen Kesehatan dalam upaya mempercepat penurunan AKI pada dasarnya mengacu kepada intervensi strategis "Empat Pilar Safe Motherhood", yaitu pilar pertama Keluarga Berencana (Ekarini 2008).

Grafik 24. Penyebab Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

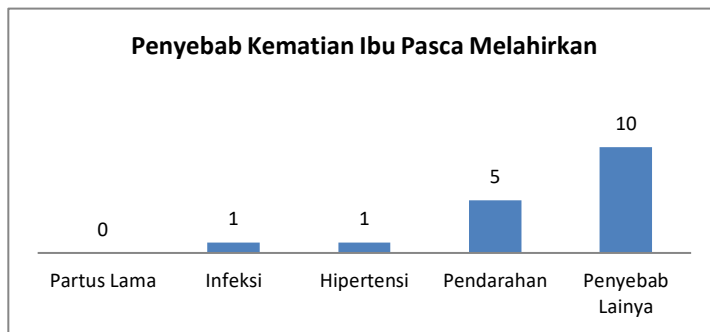


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Jumlah lahir hidup selama tahun 2019 adalah 20.141 kelahiran. Terdapat total 17 kematian ibu, yaitu saat kondisi ibu hamil 1 kasus, saat persalinan 6 kasus, dan saat nifas 10 kasus (lihat Grafik 24).

Selain kematian ibu hamil, ada klasifikasi kematian ibu pasca melahirkan yaitu sejumlah 17 kasus (lihat Grafik 25). Penyebab paling banyak kematian ibu pasca melahirkan adalah penyebab lain-lain sebanyak 10 kasus, disebabkan oleh infeksi dan hipertensi masing-masing satu kasus dan disebabkan pendarahan sebanyak lima kasus.

Grafik 25. Penyebab Kematian Ibu Pasca Melahirkan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

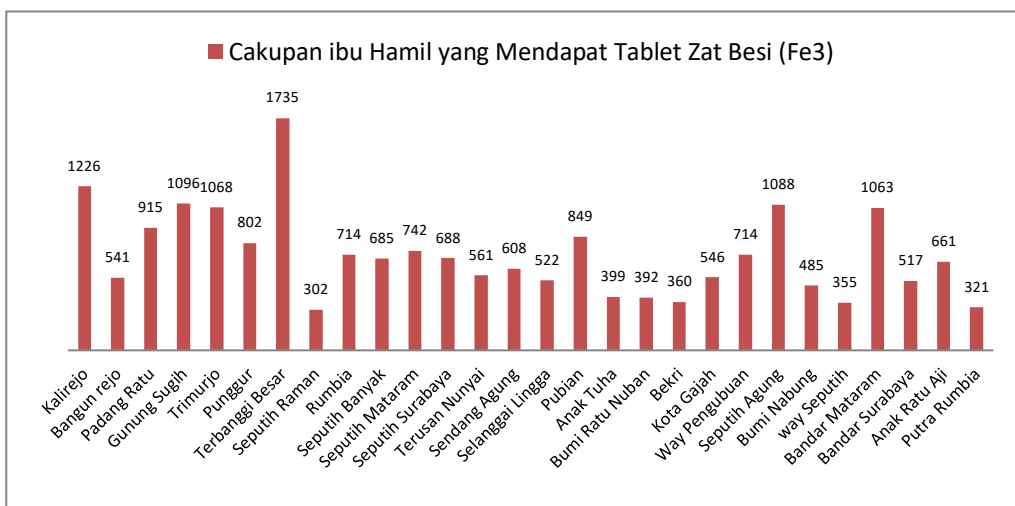


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

2) Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil adalah dengan memberikan tablet zat besi. Angka cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi tahun 2019 paling tinggi di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Seputih Agung. Selengkapnya lihat Grafik 26.

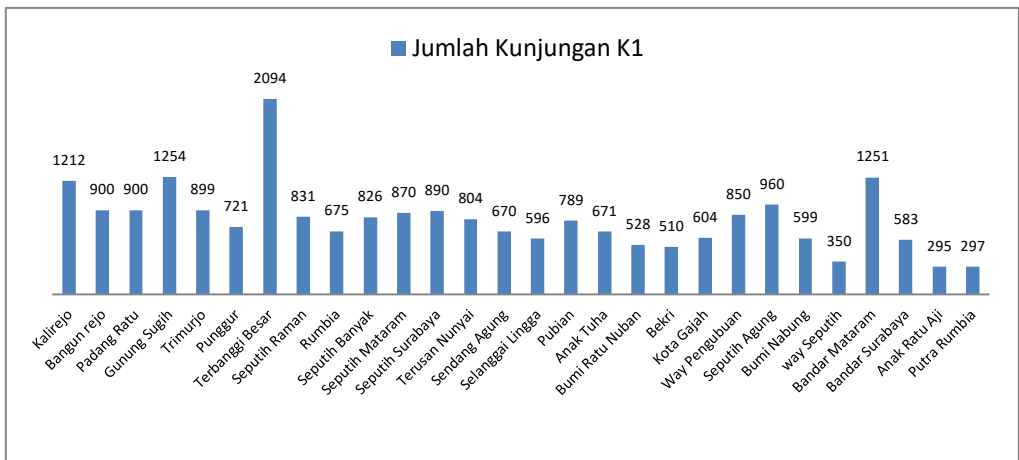
Grafik 26. Cakupan Tablet Zat Besi (Fe3) untuk Ibu Hamil di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Selain pemberian zat besi, jumlah kunjungan K1 ibu hamil juga merupakan hal perlu diungkapkan. Dari Grafik 27 terlihat tiga Kecamatan dengan jumlah kunjungan K1 tertinggi adalah Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Bandar Mataram.

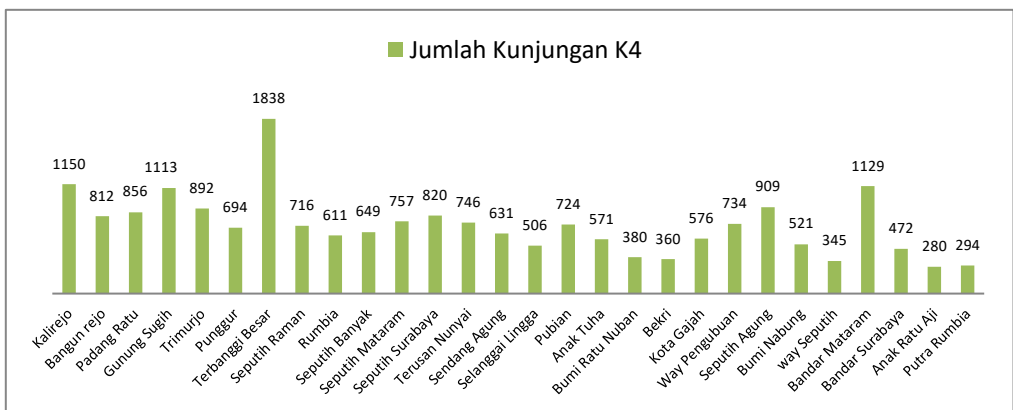
Grafik 27. Jumlah Kunjungan K1 Ibu Hamil di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pendataan pada kunjungan K4 ibu hamil ke fasilitas kesehatan dapat dilihat pada Grafik 28. Terdata tiga Kecamatan dengan jumlah kunjungan K1 tertinggi adalah Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan Kalirejo.

Grafik 28. Jumlah Kunjungan K4 Ibu Hamil di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

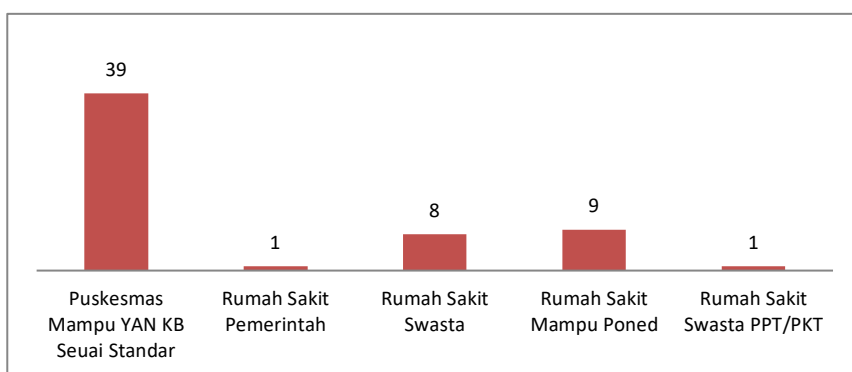


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

3) Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikatakan kurang. Mengingat wilayah yang cukup luas, fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes) berupa Puskesmas hanya berjumlah 39 buah yang tersebar di 28 kecamatan. Selain itu terdapat satu rumah sakit pemerintah, delapan rumah sakit swasta, sembilan rumah sakit mampu poned dan satu rumah sakit swasta PPT/PKT. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 29.

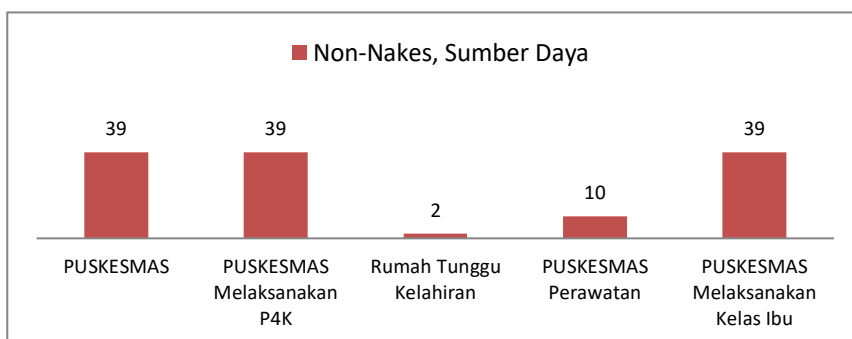
Grafik 29. Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Adapun sumber daya non tenaga kesehatan berupa Puskesmas (39 unit), Puskesmas melaksanakan P4K (39 unit), rumah tunggu kelahiran (2 unit), puskesmas perawatan (10 unit) dan puskesmas melaksanakan kelas ibu sebanyak 39 unit (lihat Grafik 30).

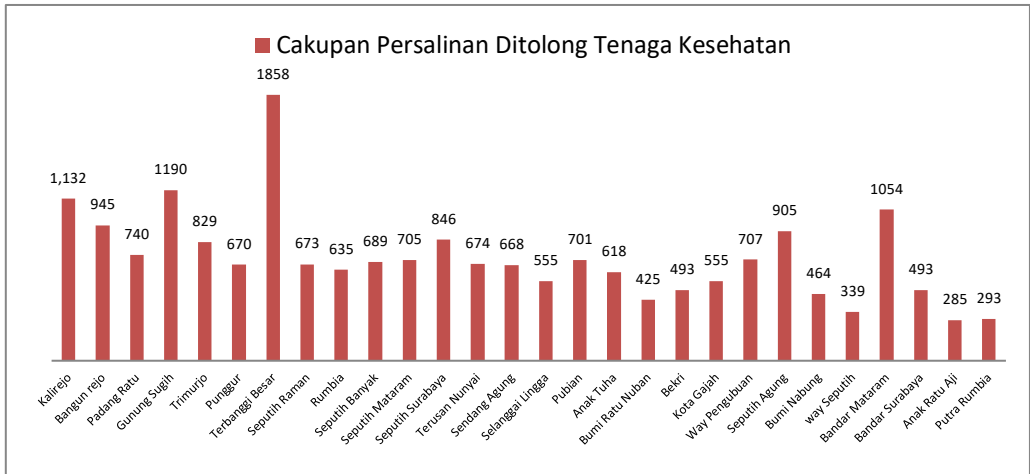
Grafik 30. Sumber Daya Non Nakes di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

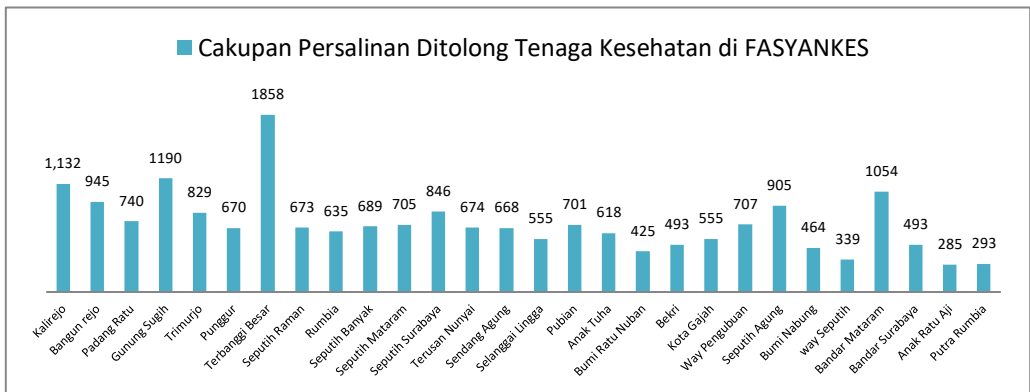
Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (Grafik 31) dan di fasilitas Yankes (garfik 32) Kecamatan dengan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan paling tinggi di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan Gunung Sugih.

Grafik 31. Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 32. Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di FASYANKES di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

4) Kepesertaan Keluarga Berencana

Dalam Keluarga Berencana masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah rendahnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi (Ekarini 2008). Pernyataan tersebut terkonfirmasi pada Gambar 4 yang menyajikan data peserta KB baru di Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh perempuan sebanyak 32.363 orang

atau setara dengan 97 persen, sedangkan kaum laki-laki yang mengikuti KB hanya sebesar 3 persen atau 1.136 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Peserta KB Baru
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

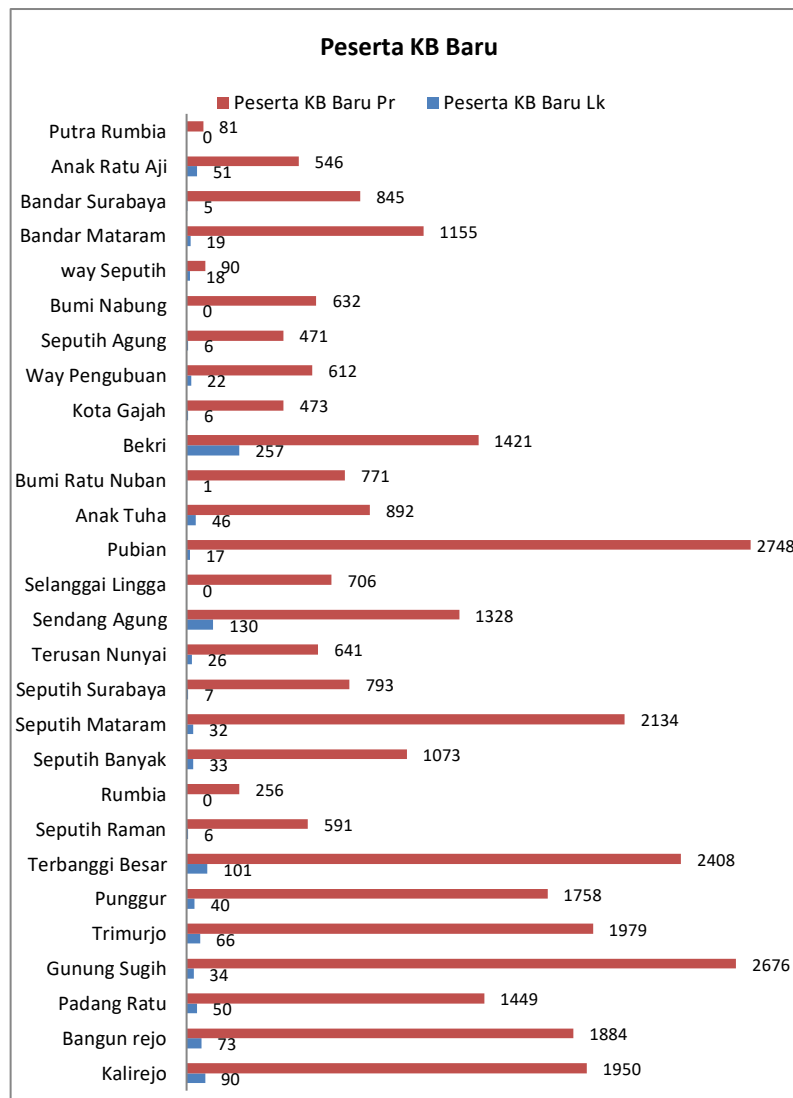


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Berdasarkan data tersebut indeks paritas gender KB baru sebesar 28 yang berarti terjadi kesenjangan gender dimana kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Sedangkan indeks disparitas 93,22 persen. Rata-rata persentase laki-laki yang telah menjadi peserta KB hingga tahun 2019 sebesar 4,59. Sedangkan rata-rata presentase keluarga yang ikut KB per kecamatan sebesar 77,62 %.

Persebaran peserta KB baru per kecamatan dapat dilihat pada Grafik 33. Peserta KB baru laki-laki paling banyak adalah di Kecamatan Beker, Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Terbanggi Besar. Menurut penelitian Ekarini (2008), ada hubungan bermakna antara pengetahuan terhadap KB sikap, sosial budaya terhadap KB, akses pelayanan KB, kualitas pelayanan dengan partisipasi laki-laki dalam Keluarga Berencana. Kemudian temuan lainnya adalah ada pengaruh antara variabel pengetahuan terhadap KB, kualitas pelayanan KB, sikap terhadap, akses pelayanan KB, sosial budaya terhadap KB terhadap partisipasi pria dalam Keluarga Berencana. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi melalui paguyuban atau kelompok KB pria tentang alat kontrasepsi pria untuk meningkatkan pengetahuan pria tentang alat kontrasepsi.

Grafik 33. Peserta KB Baru Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

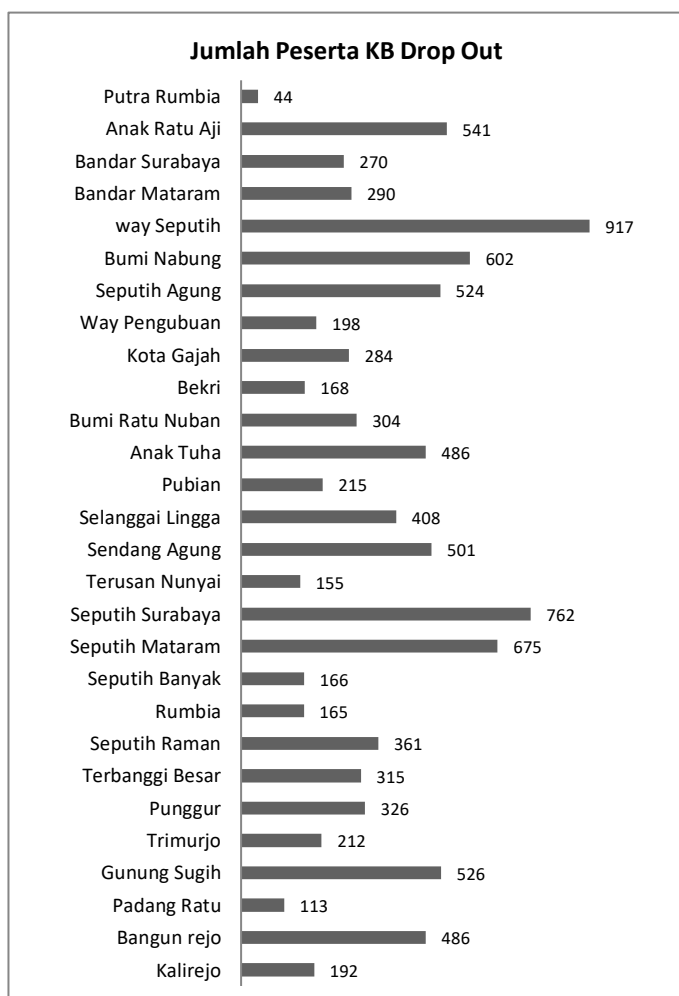


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Kepesertaan laki-laki (sebagai suami) sebagai akseptor KB menurut Maharyani dan Handayani (2010) tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan. Namun ada hubungan signifikan dengan jumlah anak dan pendapatan keluarga. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan program dan kegiatan yang berhubungan dengan keluarga berencana. Jika tingkat pengetahuan dan pendidikan tidak signifikan berhubungan dengan karakteristik akseptor KB, maka pendekatan yang bersifat sosial dan budaya dapat digunakan untuk memberikan kesadaran bagi laki-laki agar bersedia menjadi akseptor KB.

Tantangan terbesar dalam program keluarga berencana lainnya adalah angka *drop out* (atau keluar) yang cukup tinggi. Grafik 34 menunjukkan angka *drop out* pada tahun 2019 sebanyak 10.206 orang. Angka tersebut disumbang oleh Kecamatan Way Seputih sebanyak 917 orang, Kecamatan Seputih Surabaya 762, dan Kecamatan Seputih Mataram 675 orang.

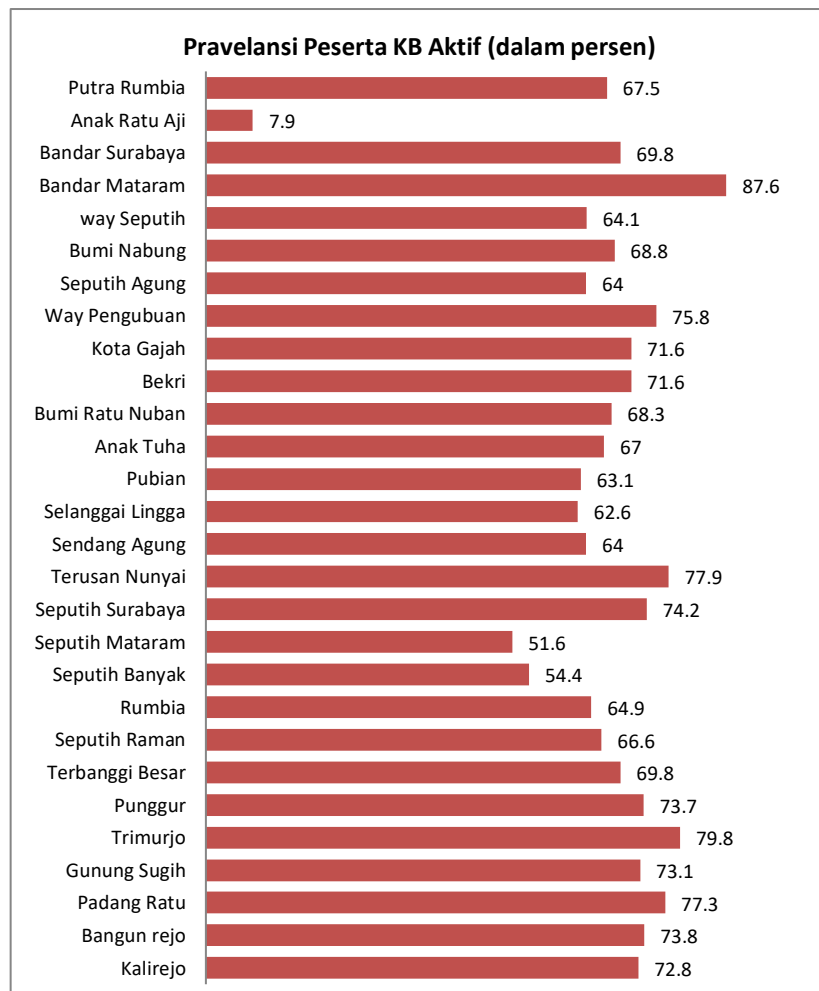
Grafik 34. Peserta KB *Drop Out* per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Meski tantangan untuk drop out cukup besar, namun angka prevalansi peserta KB aktif tahun 2019 cukup tinggi dengan angka rata-rata 67,27 %. Presentase prevalansi paling tinggi adalah Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Trimurjo dan Kecamatan Terusan Nunyai. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 35.

Grafik 35. Prevelansi Peserta KB Aktif per Kecamatan (dalam persen)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

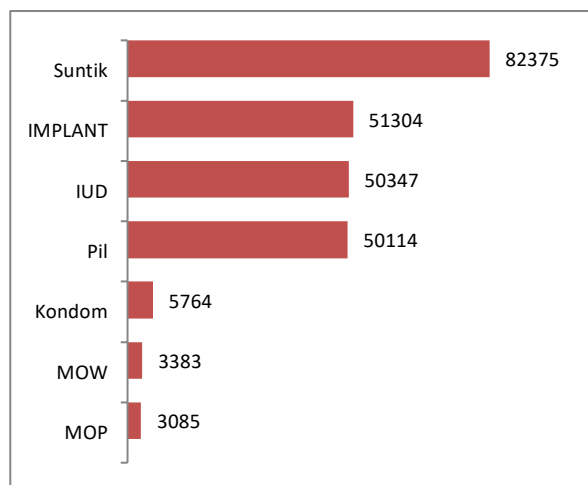


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

5) Jenis Alat Kontrasepsi

Terdapat tujuh alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Alat kontrasepsi paling banyak digunakan adalah jenis suntik yaitu sebanyak 82.375. Suntik adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan. Sedangkan alat lain yang cukup populer dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pringsewu adalah implan dan IUD. Pada posisi tiga besar, semuanya merupakan alat kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan (lihat Grafik 36).

Grafik 36. Alat Kontrasepsi yang Digunakan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

MOW (metode operasi wanita) dan MOP (metode operasi pria) merupakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dibeberapa daerah, seperti Mojokerto (Misti, 2020) dan Palembang (Linggau Pos, 2019) terdapat program gratis untuk pelaksanaan kontrasepsi MOW dan MOP. Di Mojokerto dari 292 peserta kegiatan 97,3 % merupakan perempuan yang menjadi peserta MOW, sedangkan hanya 3,7 % atau sebanyak 8 orang yang merupakan laki-laki peserta MOP.

Secara khusus Haryanto (2017) mengungkapkan bahwa laki-laki yang menggunakan kontrasepsi mengalami perubahan positif setelah menerima informasi dan dukungan dari kelompok sebaya mereka. Pria yang menggunakan kontrasepsi mulai dengan pandangan (mitos) yang mirip dengan masyarakat sekitar. Secara tegas Haryanto (2017) menyimpulkan bahwa perspektif kesetaraan gender adalah faktor kunci yang mempengaruhi pengambilan keputusan kontrasepsi di kalangan pria.

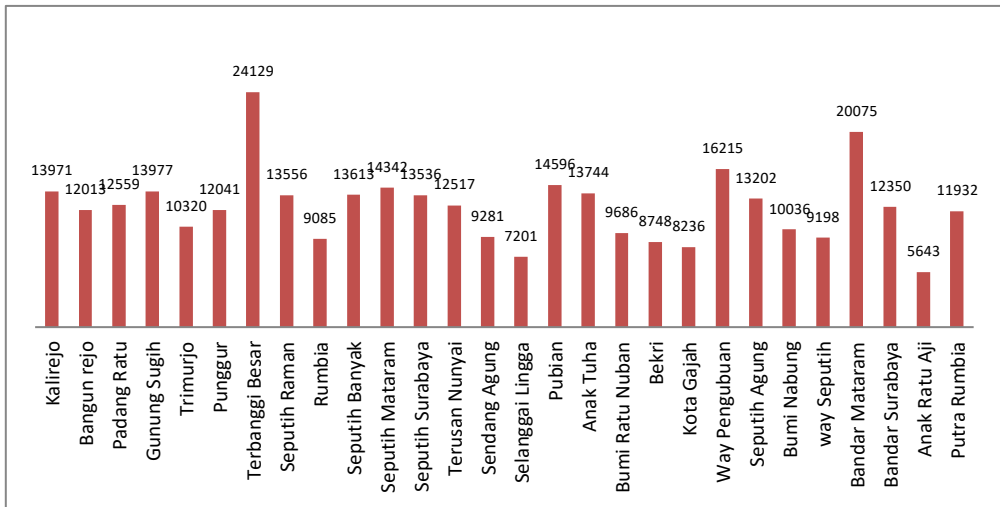
6) Pasangan Usia Subur dan Status Sosial Ekonomi

Hasil penelitian Winarni et al. (2013) yang dilakukan di Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi wanita. Sedangkan faktor umur wanita PUS, tingkat pendidikan, pekerjaan, paritas, dan dukungan suami tidak berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi. Penelitian ini akhirnya menyarankan petugas lapangan KB (PLKB) sebaiknya bekerja sama dengan bidan swasta agar siap dalam membantu calon akseptor dalam memilih metode kontrasepsi yang rasional. Akseptor KB juga harus meminta saran kepada bidan dengan memperhitungkan resiko yang baik dalam memilih metode kontrasepsi serta lebih aktif

mencari informasi melalui media cetak ataupun elektronik tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Winarni et al 2013).

Untuk Kabupaten Lampung Tengah, pasangan usia subur (PUS) peserta keluarga berencana tersebar paling banyak di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bandar Mataram, dan Kecamatan Way Pengubuan (selengkapnya lihat Grafik 37).

Grafik 37. Pasangan Usia Subur Peserta Aktif KB di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

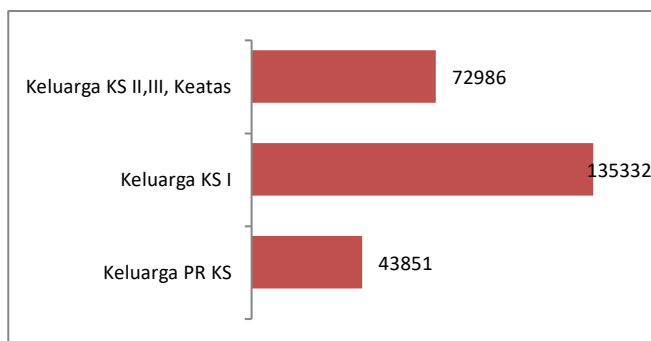


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Peserta keluarga berencana di Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh keluarga dengan status sosial Keluarga Sejahtera I yaitu sebanyak 135.332 keluarga. Selanjutnya urutan nomor dua adalah keluarga dengan status Keluarga Sejahtera II, III ke atas. Keluarga pra sejahtera hanya berjumlah 43.851 keluarga (lihat Grafik 38). Angka ini patut menjadi bahan evaluasi, mengapa keluarga pra sejahtera (Pra KS) yang menjadi peserta keluarga berencana cukup rendah. .

Membandingkan kondisi di Kabupaten Lampung Tengah (lihat Grafik 38) dimana dengan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Rizka dan Hamam (2014), maka kondisi tersebut dapat dimengerti. Rizka dan Hamam (2014) menyebutkan ada hubungan antara pengeluaran keuangan per bulan dengan keikutsertaan KB pada Pasangan Usia Subur. Jadi, PUS dengan pengeluaran per bulan $\geq$ UMR kemungkinan 1,4 kali lebih besar mengikuti KB dari pada PUS yang pengeluaran per bulan $<$ UMR. Penelitian yang dilakukan oleh Syahban et al (2018) pun menguatkan hasil temuan Rizka dan Hamam (2014), bahwa ada hubungan yang signifikan antara hubungan status sosial ekonomi dengan penggunaan KB (dalam hal ini jenis implan di wilayah kerja Puskesmas Loa Buah).

Grafik 38. Peserta Aktif KB Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

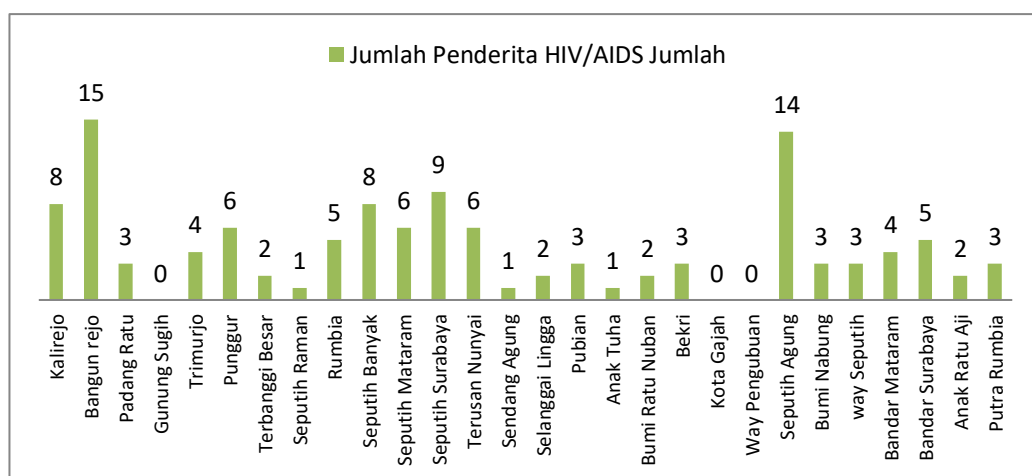


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

7) Penderita HIV/AIDS

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah jenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh maka orang tersebut sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal (Kemenkes RI, 2014).

Grafik 39. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Per November 2019, data Komunitas Jaringan ODHA Berdaya (JOB) menyebutkan jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Lampung sebanyak 4.170 orang (Pratama, 2019).

Kabupaten Lampung Tengah sendiri pada tahun 2019 ini memiliki penderita HIV/AIDS sebanyak 119 orang, namun angka ini tidak menampilkan komposisi jenis kelamin para penderita. Secara keseluruhan, sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki penderita HIV/AIDS dengan jumlah yang bervariasi. Angka paling tinggi di Kecamatan Seputih Agung sebanyak 14 orang, di Kecamatan Bangun Rejo 15 orang, dan di Kecamatan Seputih Surabaya sebanyak 9 orang (selengkapnya lihat Grafik 39).

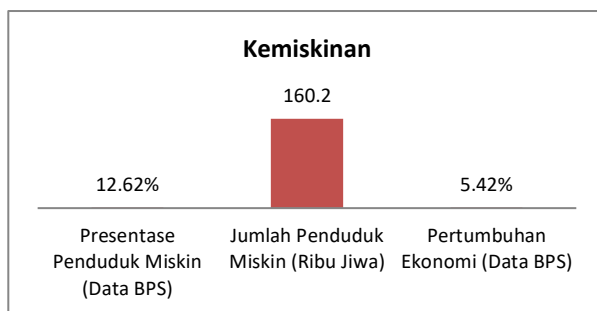
Salah satu hambatan paling besar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Stigma berasal dari pikiran seorang individu atau masyarakat yang memercayai bahwa penyakit AIDS merupakan akibat dari perilaku amoral yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Stigma terhadap ODHA tergambar dalam sikap sinis, perasaan ketakutan yang berlebihan, dan pengalaman negatif terhadap ODHA. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang terinfeksi HIV/AIDS layak mendapatkan hukuman akibat perbuatannya sendiri. Mereka juga beranggapan bahwa ODHA adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penularan HIV/AIDS (Maman et al 2008). Di Grogan Jawa Tengah ditemukan bahwa pemberian stigma terhadap ODHA di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh sikap keluarga terhadap ODHA dan persepsi responden terhadap ODHA. Responden yang berasal dari keluarga dengan sikap negatif terhadap ODHA memiliki kemungkinan empat kali lebih besar memberikan stigma terhadap ODHA, sedangkan responden dengan sikap negatif terhadap ODHA memiliki kemungkinan dua kali lebih besar dalam memberikan stigma terhadap ODHA (Shaluhiah et al 2015).

Penelitian Brown et al (2003) menguji intervensi untuk meningkatkan kemauan untuk mengobati ODHA di antara penyedia layanan kesehatan atau meningkatkan strategi mengatasi untuk menangani stigma AIDS di antara ODHA atau kelompok berisiko. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa intervensi pengurangan stigma tampaknya berhasil, setidaknya dalam skala kecil dan dalam jangka pendek, tetapi banyak kesenjangan tetap terutama terkait dengan skala dan durasi dampak dan dalam hal dampak gender dari intervensi pengurangan stigma. Sehingga usaha-usaha pengurangan stigma ini harus secara masif dilakukan oleh pemerintah maupun *civil society*.

D. DATA GENDER BIDANG EKONOMI

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dalam temuan penelitiannya Siregar dan Wahyuniarti (2007) mengatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitudo yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, *share* sektor pertanian dan sektor industri. Namun, variabel yang signifikan dan relatif besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin adalah sektor pendidikan. Grafik 40 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah adalah 12,62%, dengan jumlah penduduk miskin 160.200 jiwa dan pertumbuhan ekonomi 5,42 %.

Grafik 40. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

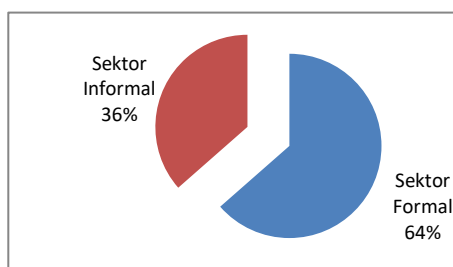
Masih menurut Siregar dan Wahyuniarti (2007) berdasarkan temuan penelitian yang mereka lakukan kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengurangi penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang merupakan syarat keharusan. Disamping itu diperlukan pula syarat kecukupan dengan mempercepat industrialisasi pertanian/perdesaan, akumulasi modal manusia, pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dan pengendalian secara efektif pertumbuhan penduduk terutama masyarakat miskin.

Data bidang ekonomi berikut ini, akan memberikan gambaran kepada kita kinerja perempuan dan laki-laki pada setiap sub sektornya.

1) Ketenagakerjaan dan Pencari Kerja

Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 662.539 jiwa atau sekitar 45.08 % dari seluruh total penduduk (lihat Gambar 1). Penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja di sektor formal yaitu sebanyak 420.932 orang (64 %) dan mereka yang bekerja di sektor informal sebanyak 241.607 jiwa (36%) (lihat Gambar 5).

Gambar 5. Jenis Pekerjaan yang Dilakukan oleh Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

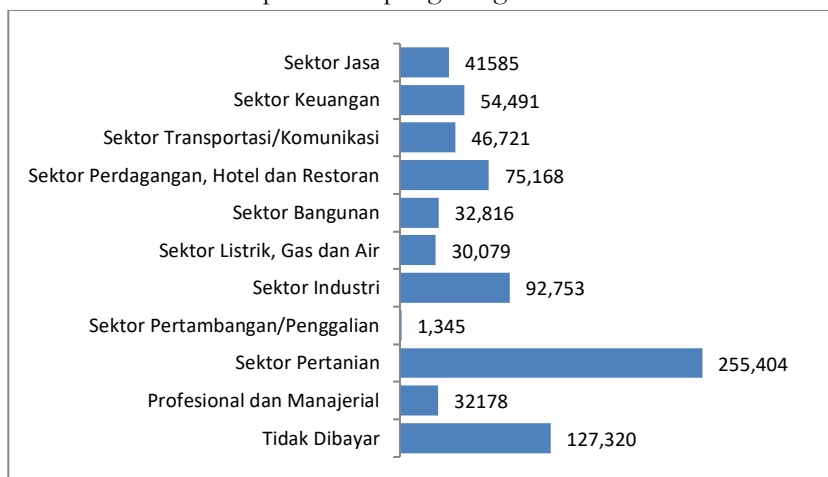
Menurut Sinaga (2013) banyaknya tenaga kerja di sektor informal membuat upaya untuk menaikkan penghasilan kelompok lapisan bawah menghadapi banyak kesulitan. Hasil penelitian Sinaga (2013) secara serentak menunjukkan bahwa variabel modal usaha, upah, pendidikan dan pengalaman usaha berpengaruh terhadap permasalahan tenaga kerja. Meski jumlah tenaga kerja di sektor informal hanya berkisar 36 % namun keadaan juga perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan di sektor ketenagakerjaan. Sinaga (2013) melanjutkan bahwa perlu upaya yang lebih konkrit dari pihak pemerintah dan mitra untuk membantu modal usaha masyarakat. Perlunya dukungan berbagai pihak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sektor informal terutama dalam hal pendidikan, sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan.

Grafik 41 menunjukkan pada kita terdapat 127.320 orang pekerja tidak dibayar di Lampung Tengah. Pekerja tidak dibayar ini merupakan fenomena yang dapat ditemui pada bidang pekerjaan informal. Namun sayangnya data yang dimiliki tidak secara jelas menunjukkan komposisi jensi kelamin pekerja tidak dibayar ini. Didasarkan penelitian Hamdan (2019) dan Simangunsong et al (2019) pekerja tidak dibayar diterima oleh kelompok yaitu perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun .

Hamdan (2019) mengungkapkan pekerja perempuan di Indonesia lebih rentan menjadi pekerja tidak dibayar dibanding pekerja laki-laki. Perempuan yang berpendidikan rendah, bekerja di sektor pertanian dan tinggal di daerah perdesaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pekerja tidak dibayar. Hal serupa juga berlaku pada pekerja laki-laki. Kelompok umur 15-24 tahun berpeluang paling tinggi untuk menjadi pekerja tidak dibayar. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterampilan mereka dan membuka peluang yang lebar untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam lapangan pekerjaan. Selain itu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi juga dapat memberikan otonomi bagi mereka dalam pekerjaan dan rumah tangga. Perlu adanya kebijakan untuk mengurangi jumlah pekerja tidak dibayar (*unpaid workers*) terutama yang banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak dan pada sektor pertanian. Dengan pemberlakuan upah pada *unpaid workers* akan meningkatkan nilai tambah bruto terutama pada kompensasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan output

Dampak pekerja perempuan tidak dibayar membuat perempuan tidak terlihat dan tidak diakui secara sosial serta tidak tercatat di data statistik negara sebagai tenaga kerja. Dengan adanya ketidakseimbangan antarusaha kerja perempuan baik kerja produksi maupun kerja reproduksi dengaberbagai kebijakan-kebijakan yang dianggap belum progender membuat perempuan tetap berada pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk hidup dalam keadilan dan sulit terbebas dari kemiskinan. Perempuan yang bekerja di sektor informal bekerja hanya berdasarkan kontrak sosial untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan itu sendiri dan sekitar lingkungannya (Simangunsong et al 2019).

Grafik 41. Data Pekerja Berdasarkan Bidang Pekerjaan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pada isu pencari kerja, sebanyak 5.657 orang sedang mencari kerja di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 (lihat Tabel 2). Dari data tersebut, 2.756 calon pekerja berjenis kelamin laki-laki (48,72 %) dan 2.901 calon pekerja berjenis kelamin perempuan (51,28 %). Jika dilihat dari daerah tujuan, laki-laki lebih cenderung untuk mencari pekerjaan di dalam negeri dan perempuan lebih cenderung untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Tabel 2. Data Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan, Tujuan, dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan	
		DN*	LN**	DN*	LN**
1.	SD	5	160	3	270
2.	SMP	60	534	25	900
3.	SMA	1421	373	840	630
4.	Diploma	63	0	61	0
5.	S1/S2/S3	140	0	172	0
Jumlah		1689	1067	1101	1800

Sumber: diolah dari data sekunder 2019
(Ket *DN : dalam negeri, **LN: luar negeri)

Secara umum, tanpa memperhitungkan tingkat pendidikan dan lokasi tujuan, indeks paritas gender pada isu pencari kerja sebesar **1,05**. Angka ini secara moderat dapat dikatakan bahwa tidak ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam pencari kerja. Meski demikian, kondisi ini tetap menunjukkan ada disparitas gender sebesar **2,56 %**.

Pada konteks yang lain, indeks paritas gender bisa dilihat berdasarkan daerah tujuan pencari kerja. Pada daerah tujuan dalam negeri, indeks paritas gender **0,65** berarti kinerja perempuan lebih rendah dari laki-laki dengan disparitas gender sebesar **-21,08 %**. Untuk

daerah tujuan luar negeri indeks paritas gender sebesar **1,69** yang berarti kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki dan disparitas gender sebesar **25,58 %**.

Tabel 3. Data Umum Tenaga Kerja
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pekerja Peserta Jamsostek (K3)	429.375
2.	Pekerja yang Terkena PHK	281
3.	Pekerja Tenaga Kerja Migran	1.256
4.	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	867
5.	Jumlah Pekerja Anak Usia 5 Tahun Keatas	325
6.	Presentase Pekerja Dibawah Umur	7,2%
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,6%

Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Melihat Tabel 3 secara umum perlindungan terhadap tenaga kerja melalui program Jamsostek baru sekitar 65 % dari total pekerja yang ada. Pada tahun 2019 terdapat 281 pekerja menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Penganggur terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Di Kabupaten Lampung Tengah angka pengangguran terbuka mencapai angka 2,6% angka ini jauh dari angka nasional yang mencapai angka 5,01 % pada Februari 2019 (Supriyanto, 2019).

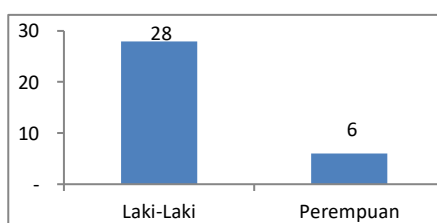
Penelitian Muslim (2014) di DI Yogyakarta menunjukkan bahwa secara simultan variabel laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan secara partial laju pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dan variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Data ini dapat dijadikan pijakan awal bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, untuk merumuskan kebijakan terkait dengan perempuan bekerja dan status pendidikan. Menurut hasil penelitian Majid (2012) menunjukkan bahwa variabel pendidikan, tingkat pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan berstatus menikah untuk bekerja. Secara dangkal dapat padankan, status tingkat pendidikan (rendah – menengah) perempuan di Kabupaten Lampung menjadi faktor penghambat perempuan dalam memasuki dunia kerja.

2) Kepemilikan Usaha dan Penanaman Modal

Pada Grafik 42 tergambar penanam modal dalam negeri sejumlah 28 orang atau 82,35 persen, dan penanam modal perempuan sebanyak 6 orang atau 17,65 persen. Indeks paritas adalah **0,21** yang berarti terdapat kesenjangan antara kinerja laki-laki dengan perempuan dengan kinerja laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan indeks disparitas perempuan dan laki-laki dalam penanam modal sebesar **-64,71 %**.

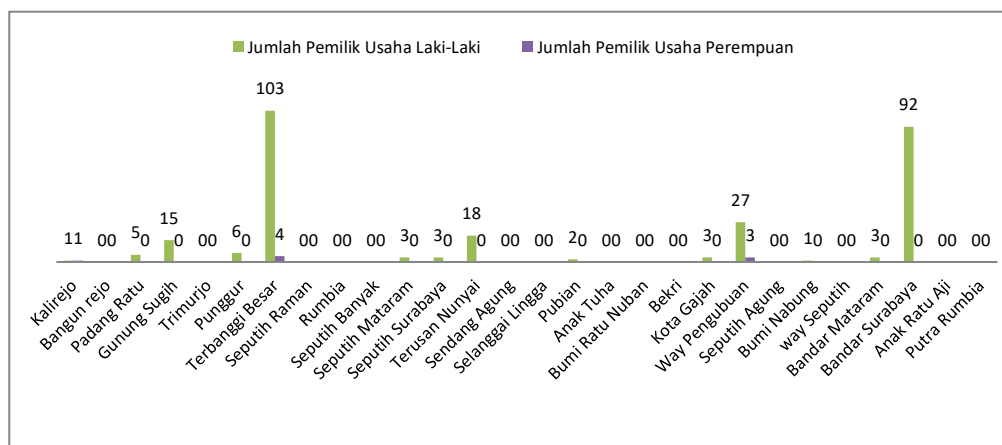
Grafik 42. Penanam Modal Dalam Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Secara umum, tanpa memperhitungkan jumlah dan sebaran modal dari penyedia modal dan sebaran, penanaman modal masih di dominasi oleh laki-laki. meskipun angka ini menunjukkan kesenjangan jumlah antara laki-laki maupun perempuan, namun kinerja gender tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada variabel ini. Berbagai kondisi dan situasi awal sangat berpengaruh dalam tingkat penanaman modal.

Grafik 43. Jumlah Pemilik Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

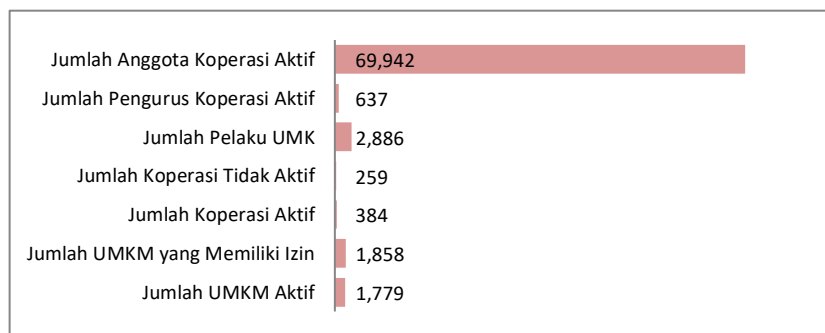
Jumlah pemilik usaha secara umum juga didominasi oleh laki-laki, dengan persebaran pemilik usaha terbanyak di Kecamatan Terbanggu Besar, Kecamatan Bandar Surabaya dan

Kecamatan Way Pengubuan (selengkapnya lihat grafik 43). Data-data ini dapat dijadikan tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk merumuskan kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi, karena menurut penelitian Awandari (2016) mengatakan bahwa variabel kesempatan kerja sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan, dimana kesempatan kerja yang baik dapat dibangun oleh masyarakat dengan modal yang berasal dari rakyat.

3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi

Secara umum, hadirnya koperasi sebanyak 384 unit di Kabupaten Lampung Tengah dapat memberikan stimulus dalam rangka mempertinggi kualitas hidup anggota koperasi yang ada sebanyak 69.942 jiwa. Jumlah ini masih dapat terus bertambah karena jika mengacu pada data yang ada masih terdapat 259 koperasi yang tidak aktif dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat memberikan dorongan pengembangan daya usaha bagi 1.858 UMKM yang memiliki izin usaha.

Grafik 44. Gambaran UMKM dan Koperasi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

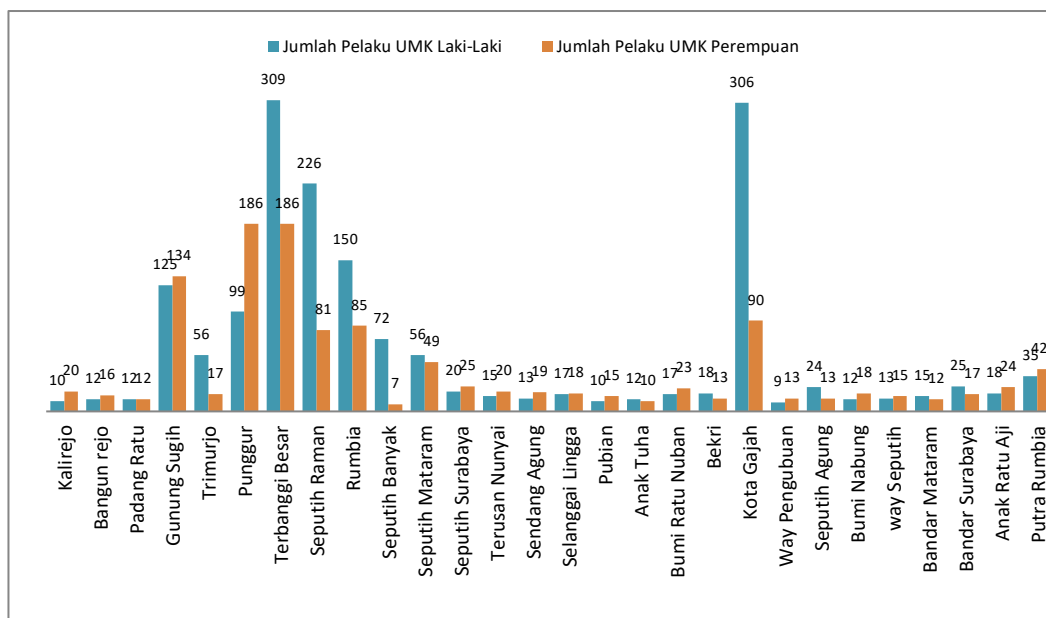


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Gambaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar dapat memperkuat perekonomian masyarakat Lampung Tengah sebagai dasar kekuatan agar dapat menopang perekonomian dasar. Secara umum koperasi dapat memberikan stimulus yang berperan sebagai badan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional atas dasar usaha bersama, kekeluargaan dan demokrasi.

Sebaran pelaku UMK di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel 45, yang menunjukkan pelaku UMK terbanyak di Kecamatan Terbangi Besar dan Gunung Sugih. Pada level Kabupaten, indeks paritas gender pelaku UMK sebesar 0,69 di mana terdapat kesenjangan gender pada kinerja perempuan dan laki-laki sebagai pelaku UMK dan disparitas gender sebesar - 18,23 %.

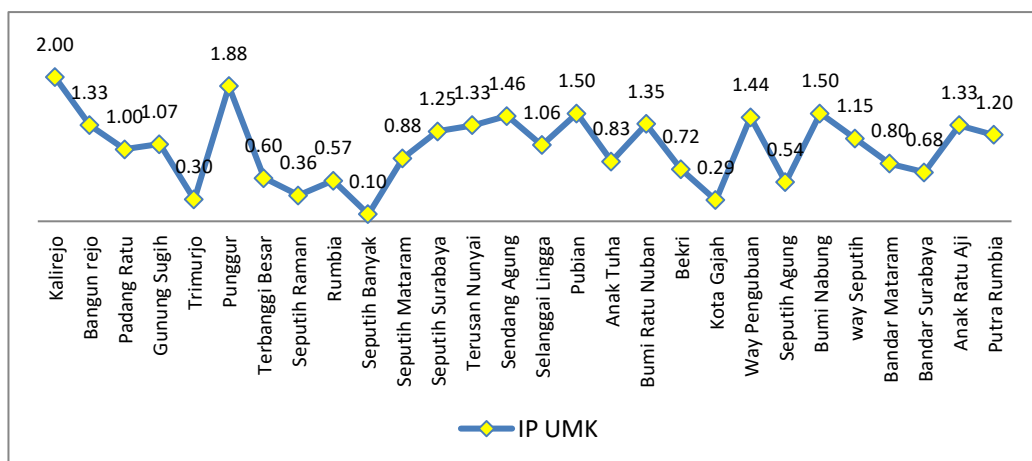
Grafik 45. Pelaku UMK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

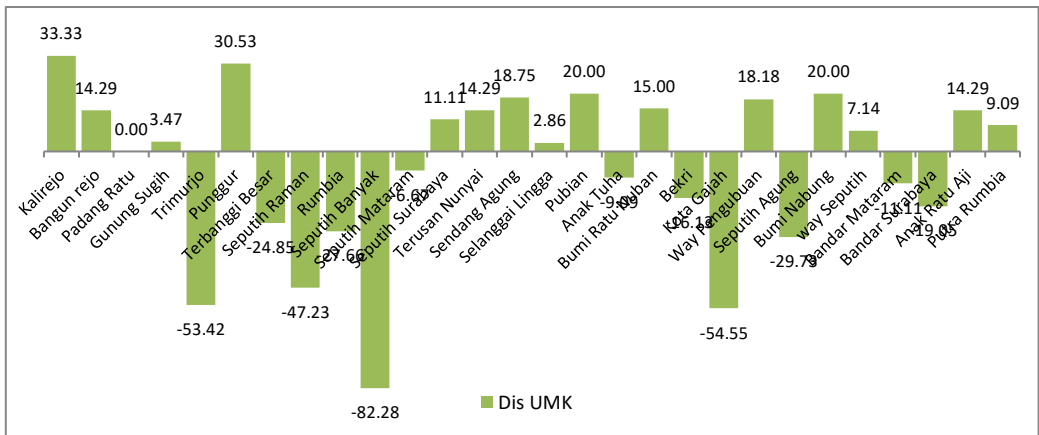
Kecamatan Kalirejo memiliki kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki sebesar 2,00 poin dan Kecamatan Seputih Banyak dengan kinerja perempuan terendah, begitupun pada analisis disparitas yang menunjukkan pada sebagian Kecamatan kinerja pelaku UMK perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki (lihat Grafik 46 dan 47).

Grafik 46. Indeks Paritas Pelaku UMK Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 47. Indeks Dispartitas Gender Pelaku UMK Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Indiworo (2016) mengatakan sektor UMKM yang didominasi oleh perempuan mempunyai peranan penting dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan ekspor Indonesia. Hal ini akan membantu menangani masalah pengangguran sebab keterlambatan menangani pengangguran akan menimbulkan masalah sosial baru yang semakin komplek ke depan. Mengatasi masalah pengangguran dapat dilakukan dengan pengembangan UMKM yang fokus pada beberapa sektor/komoditi tertentu dan dengan pendekatan yang terintegratif.

Berdasarkan hasil temuan Indiworo (2016) tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat memprioritaskan kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan UKM terutama yang melibatkan pelaku UMK perempuan. Sebab daya saing UKM perempuan lemah disebabkan kualitas SDM perempuan masih terbatas dan harga bahan baku fluktuatif (Mindarti dan Anggoro, 2016).

Menurut Hanoebioen et al (2012) beberapa kegiatan/program yang dapat diintegrasikan lintas sektoral untuk mengembangkan UMK perempuan antara lain: penguatan dan pengembangan pasar; efisiensi model promosi (membuat website, email atau iklan melalui internet, turut serta dalam pameran, desain kemasan); pendampingan dan pembinaan; membentuk keunikan atau kekhasan sebagai keunggulan produk (menciptakan manfaat, meningkatkan inovasi, menyediakan sesuatu yang berharga; selalu aktif secara kontinyu untuk memperkuat keunggulan produk; dan membentuk koperasi wanita sebagai wadah bagi perempuan pelaku UMKM (pengelolaan permodalan, hubungan antar pengusaha UMKM, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui jaminan kualitas; memperluas interaksi sosial untuk membentuk jaringan).

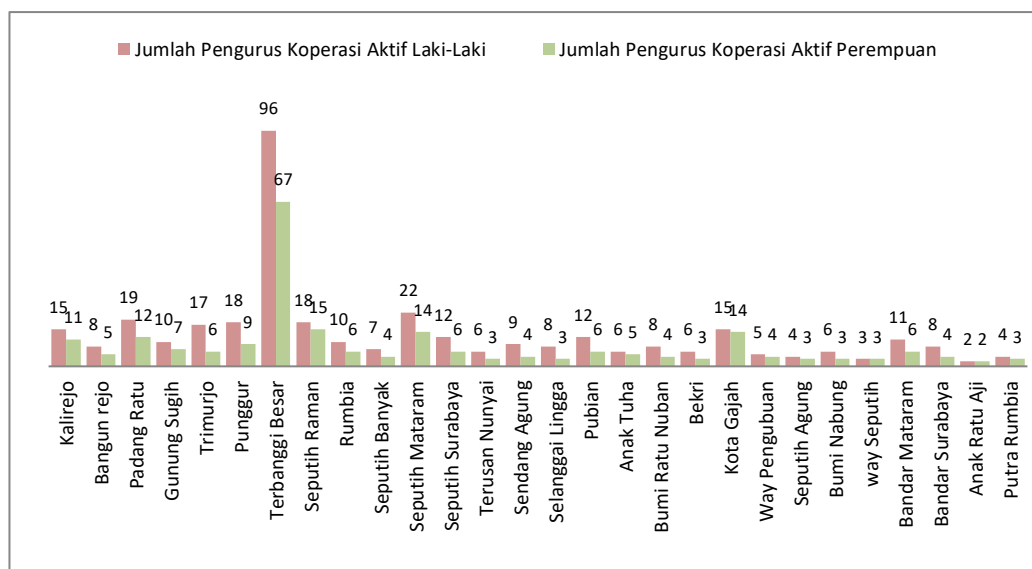
Perlu mendapat perhatian faktor-faktor yang menyebabkan daya saing UKM perempuan lemah, antara lain

Intervensi kebijakan dari juga dapat dilakukan pada koperasi. Selama ini, slogan koperasi sebagai *Soko Guru* perekonomian Indonesia terasa seperti fatamorgana yang tidak akan pernah terwujud. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam Pasal 4 yakni:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya;
- Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

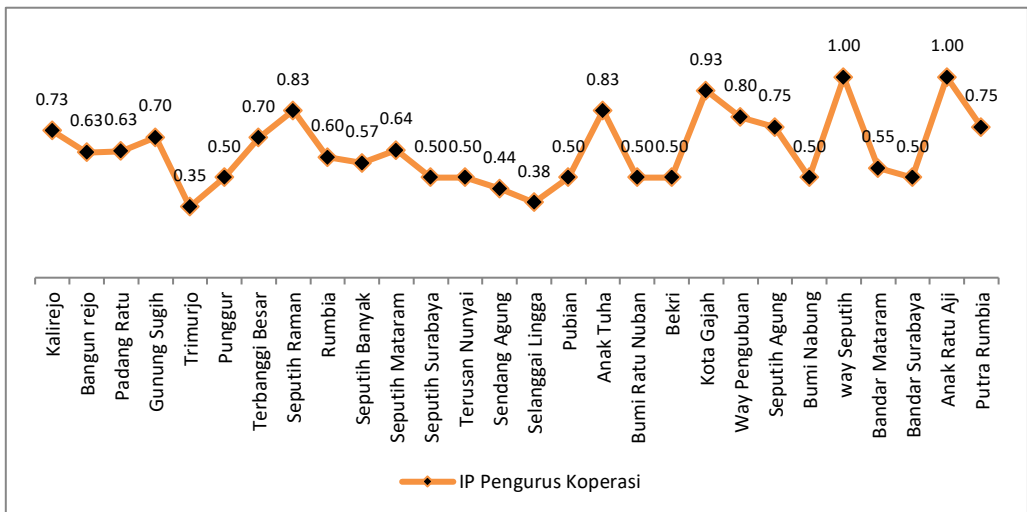
Grafik 48. Pengurus Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Secara keseluruhan terdapat 637 pengurus koperasi dengan sebaran 232 pengurus perempuan dan 365 pengurus laki-laki (sebaran per kecamatan lihat di Grafik 48). Hubungan Koperasi dan UMK sangat erat. Penelitian Nihayah (2015) menemukan bahwa Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) terbukti berpengaruh positif terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari penelitian ditemukan angka pengurang kemiskinan atau *poverty reduction* (PR) sebesar 20 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemberian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan belum berhasil dalam pengentasan kemiskinan, karena masih terdapat 80% dari keseluruhan masyarakat miskin yang belum keluar dari katagori miskin. Namun, tetap menjadi faktor yang mendorong pengentasan kemiskinan.

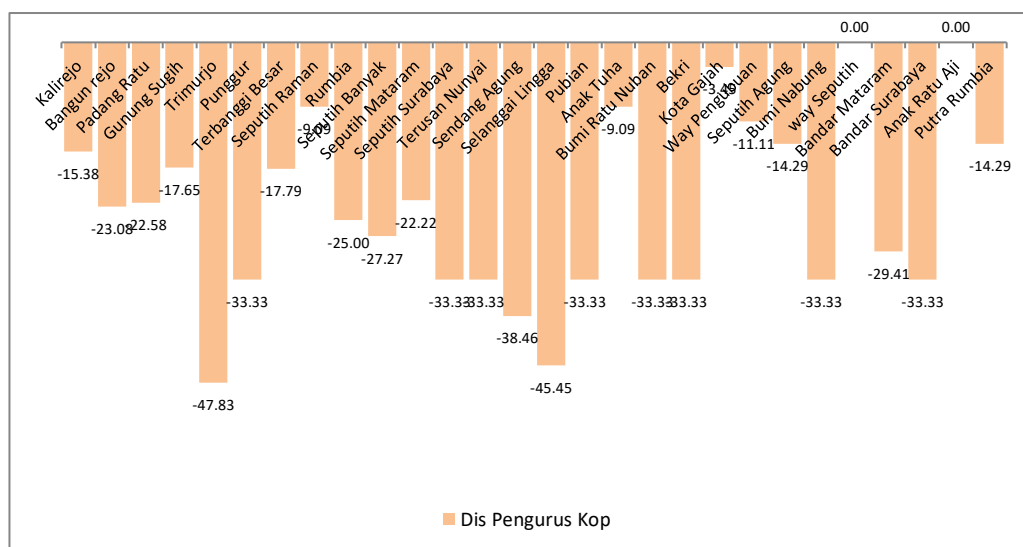
Grafik 49. Indeks Paritas Pengurus Koperasi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Pada skala kedaerahan, indeks paritas pengurus koperasi sebesar **0,48** yang berarti ada kesenjangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan nilai kinerja perempuan lebih rendah. Sedangkan analisis disparitas menunjukkan jangkauan kinerja perempuan dan laki-laki sebesar -20,88% dengan arti kinerja perempuan tertinggal sebesar angka tersebut. Indeks disparitas setiap kecamatan dapat dilihat pada Grafik 49 dan disparitas gender pengurus koperasi dapat dilihat pada Grafik 50.

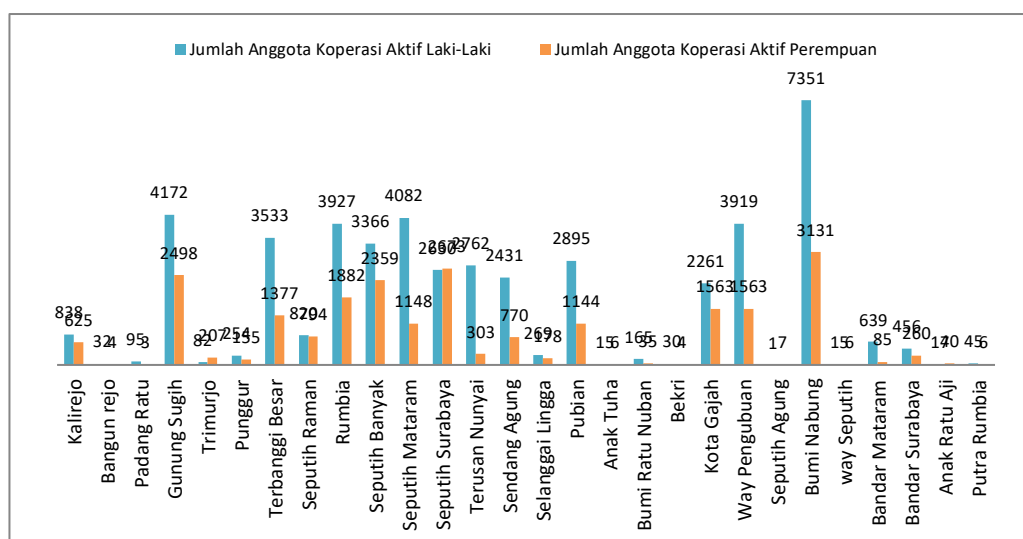
Grafik 50. Disparitas Gender Pengurus Koperasi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Di Kabupaten Lampung Tengah, anggota koperasi pun didominasi oleh laki-laki. Data tahun 2019 mencatat 69.942 anggota aktif koperasi terdistribusi pada anggota aktif laki-laki sebanyak 47.102 orang dan anggota aktif perempuan sebanyak 22.826 orang. Sebaran selengkapnya pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Grafik 51.

Grafik 51. Anggota Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

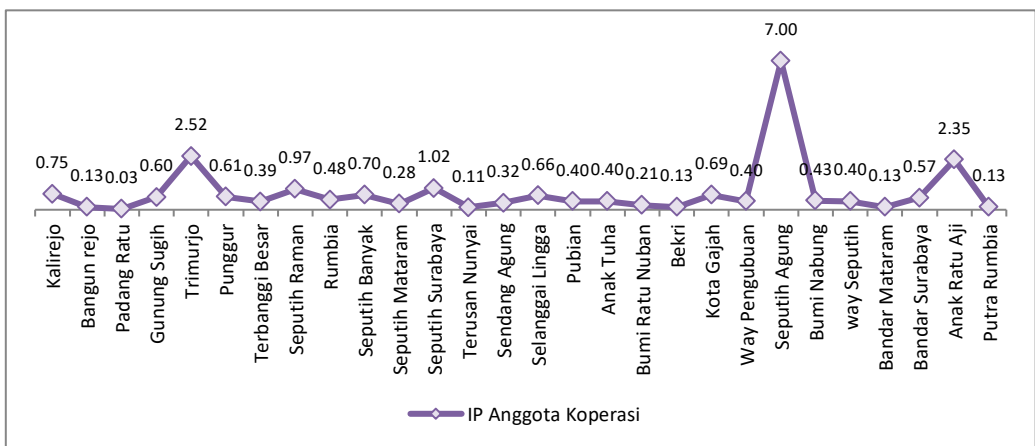


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Menurut Sulistiyan (2004) pemberdayaan adalah sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya. Pada tataran itu pemberdayaan bermakna memberikan kekuasaan, yanguntutannya bahwa pihak pemegang kekuasaan atau kekuatan itu hendaknya dengan sepenuh hati memberikan kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan/kaum miskin untuk terlibat mengakses sumberdaya yang tersedia, agar dapat berdaya baik dalam memenuhi kebutuhan hidup keseharian maupun menjalankan kegiatan kemasyarakatan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Sunartiningsih, 2004)

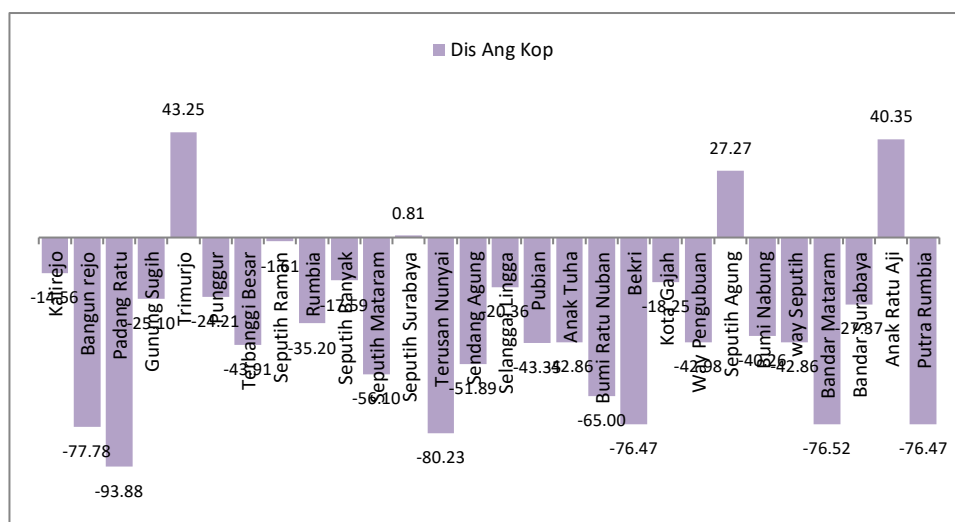
Penelitian Hernanik (2010) mengungkapkan model pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh objek penelitiannya adalah model sistim kelompok tanggung renteng. Di dalam ini ditetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dapat mengangkat kaum perempuan menjadi berkualitas, bermartabat, dan mempunyai kegiatan ekonomis yang dapat membantu ekonomi keluarga. Melalui wadah kelompok anggota dapat memenuhi hak dan kewajibannya, dapat mengaktualisasikan segala kemampuan dirinya, dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok dengan berpatokan pada nilai-nilai Solidaritas, kejujuran, keterbukaan, demokrasi dan disiplin dengan selalu memiliki sikap tanggung jawab, asah, asih dan asuh, saling memberi dan menerima, saling percaya, saling mengingatkan, toleransi, disiplin, harga diri dan kearifan.

Grafik 52. Indeks Paritas Anggota Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 53. Disparitas Gender Anggota Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

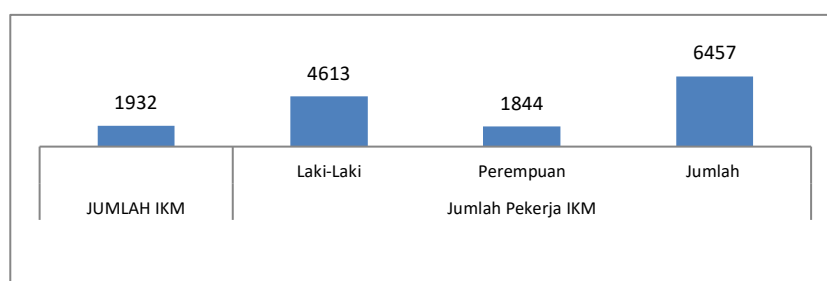


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Temuan dan data-data tentang UKM dan koperasi di Kabupaten Lampung Tengah seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu, dapat menjadi masukan bagi stakeholders yang terlibat. Perhatian pada UKM–Koperasi bukan merupakan hal yang berlebihan, sebab sejalan dengan *roadmap* pengembangan UMKM 2020 -2024 dari Kementerian UKM-K, yang diwujudkan dalam lima target yakni kenaikan ekspor UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB, rasio kewirausahaan, koperasi modern dan UMKM naik kelas. Kementerian UKM-K menargetkan pada akhir 2020 kontribusi UMKM terhadap ekspor meningkat menjadi 18% dari sebelumnya 14%. Begitu juga dengan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional meningkat menjadi 61% dan rasio kewirausahaan menjadi 3,55% (Purnama, 2019).

4) Industri dan Perdagangan

Grafik 54. Jumlah IKM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

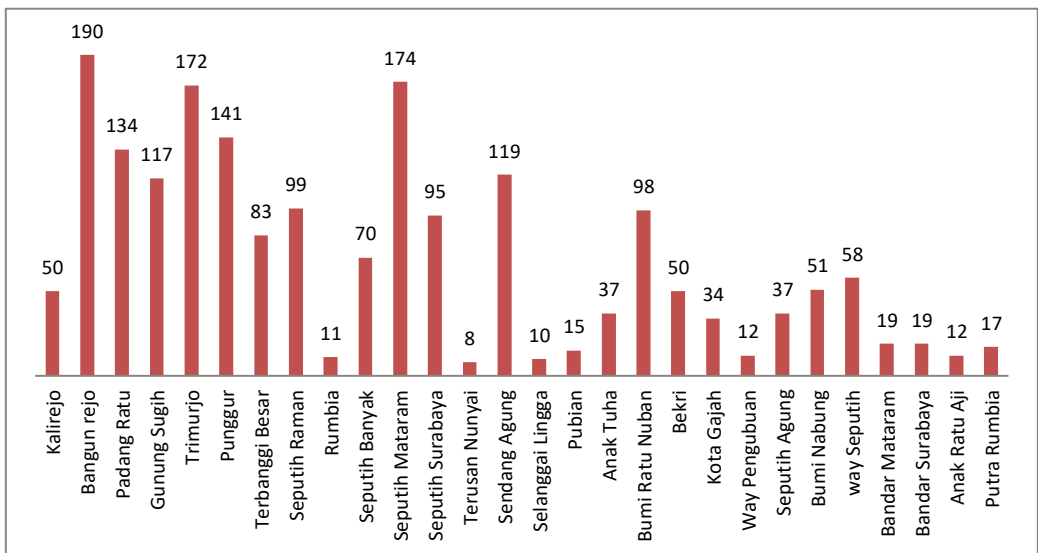


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 54 menunjukkan jumlah IKM dan sebaran kepemilikan IKM, secara umum di Lampung Tengah tenaga kerja IKM masih lebih banyak didominasi oleh laki-laki (4613) dibandingkan perempuan (1844), sehingga indeks disparitas pada pekerja IKM sebesar 2,50. Kinerja capaian laki-laki lebih dominan pada sektor pekerja IKM yang berada pada kisaran 1932 buah di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. 6457

Peran IKM dalam penyerapan tenaga kerja tidak dapat dianggap kecil karena IKM dapat menyerap sebanyak 6457 tenaga kerja di Lampung Tengah, selain itu IKM berperan sebagai pemerataan industri masyarakat karena keberadaan IKM yang ada di berbagai tempat dan dapat menyerap tenaga kerja dimapun IKM tersebut berada, maka sudah selayaknya pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap keberadaan IKM agar mampu menopang perekonomian dalam skala yang kecil di tataran mikro.

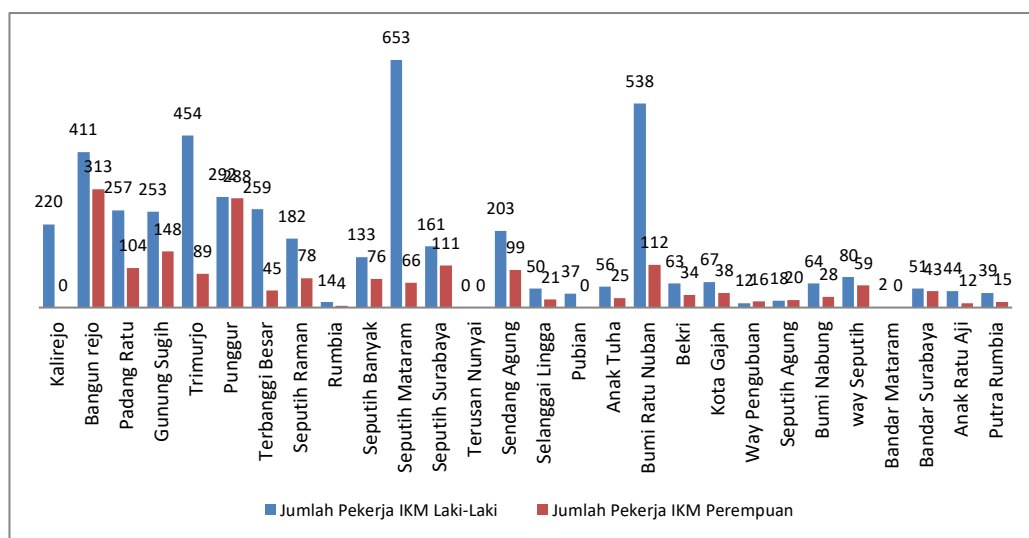
Grafik 55. Sebaran IKM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Selaras antara jumlah IKM dan jumlah pekerja terlihat pada Grafik 55 dan 456 , IKM dan jumlah pekerja paling banyak berada di Kecamatan Bangun Rejo (724 pekerja), Kecamatan Seputih Mataram (719 pekerja), dan Kecamatan Bumi Ratu Nuban (650 pekerja)

Grafik 56. Pekerja IKM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

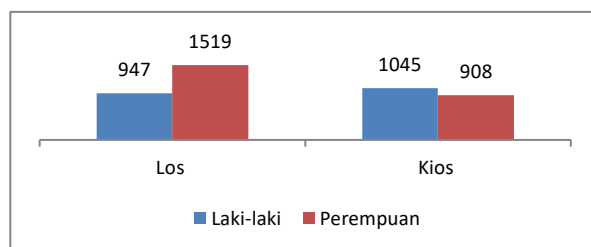


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Selain UMKM, roda perekonomian informal juga ditopang oleh kebedaraan pasar. Dama pasar, pedagang-pedagang nemempati los dan kios. Kios merupakan bangunan besar dan panjang, beratap namun tidak berdinding yang dibagi ke dalam sejumlah petak dan dipergukan sebagai area pasar. Masing-masing petak pada los pasar ini ditempati oleh penjual. Sedangkan los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.

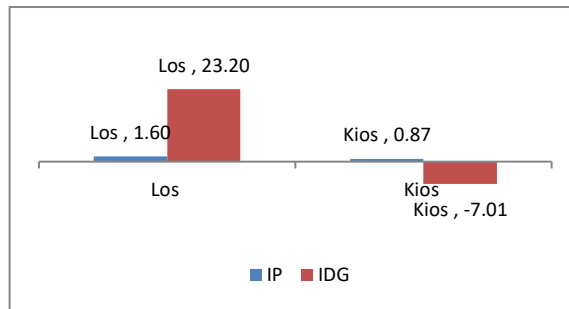
Jumlah pemilik los di pasar dan pemilik kios di Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan berjumlah 4.419 orang. Dengan komposisi pemilik los laki-laki berjumlah 947 orang dan perempuan 1.519 orang, sedangkan pemilik kios laki-laki 1.045 orang dan perempuan 908 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 57. Grafik 58 menggambarkan indeks paritas dan disparitas gener kepemilikan los dan kios.

Grafik 57. Jumlah Pemilik Kios dan Los Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

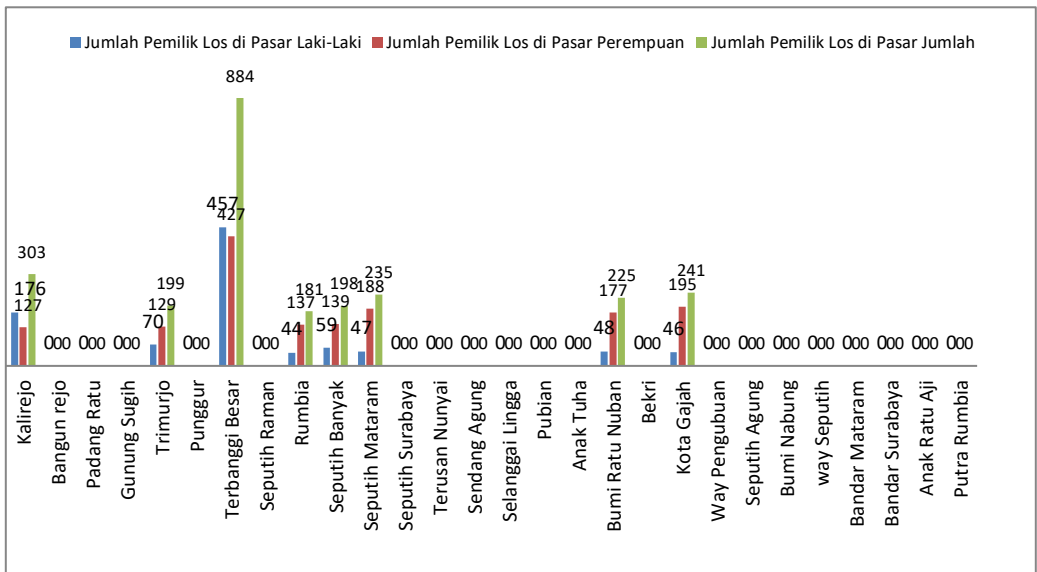
Grafik 58. Indeks Paritas dan Disparitas Gender Kepemilikan Kios dan Los di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

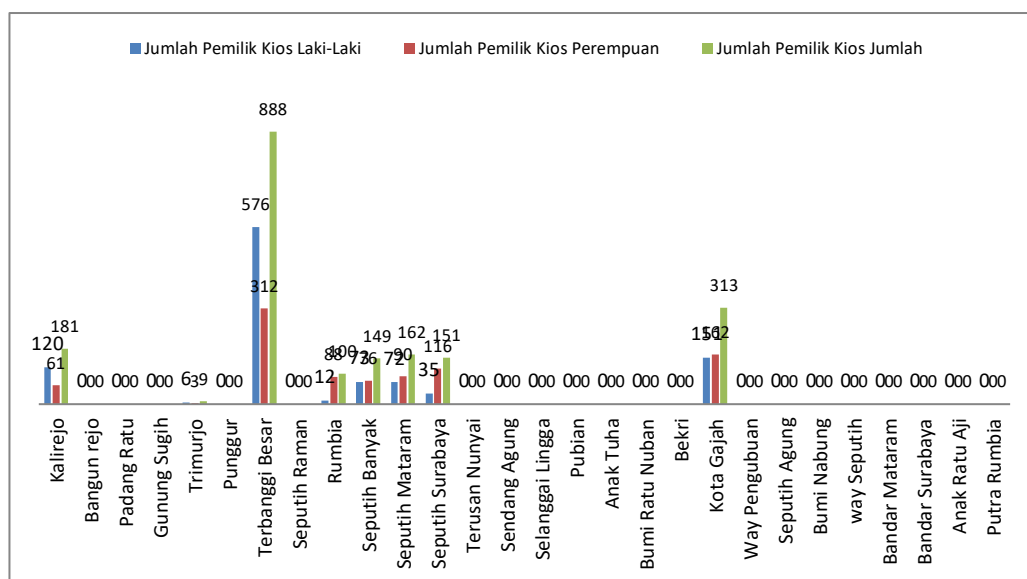
Sebaran per kecamatan kepemilikan los dapat dilihat pada Grafik 59, dan persebaran kepemilikan los dapat dilihat pada Grafik 60.

Grafik 59. Pemilik Los Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 60. Pemilik Kios Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

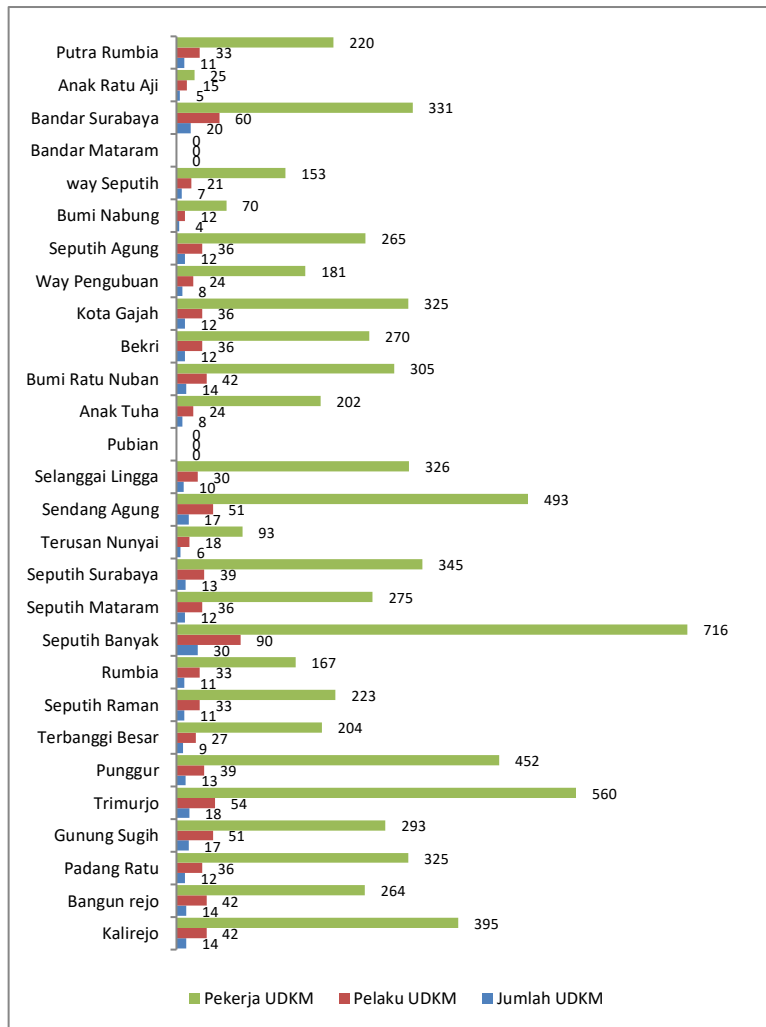


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Menurut Swastuti (2013) Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bentuk usaha yang tangguh, dan memiliki posisi strategis dalam pembangunan. Hal ini telah terbukti, selama masa krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia sekitar tahun 1998, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bentuk usaha yang tangguh dan mampu survive. Hal ini disebabkan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) mampu beradaptasi dalam hal biaya, produksi, dan pemasaran dengan cepat. Selain itu kemudahan memasuki pasar, membuat Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu usaha yang menarik dalam mencari solusi di masa krisis ekonomi yang telah banyak membuat usaha-usaha besar melakukan pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang terkena PHK banyak yang memasuki Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai sektor informal.

UDKM atau usaha dagang kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan terdapat 320 UDKM dengan jumlah pelaku sebanyak 960 orang dan pekerja 7478 orang. Baik pelaku dan pekerja UDKM yang terdata keseluruhannya adalah perempuan. Adapun persebaran UDKM tiap kecamatan dapat dilihat pada Grafik 61.

Grafik 61. Data Jumlah, Pelaku dan Pekerja UDKM Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Peranan strategis Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat ditunjukkan:

- 1) Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) lebih banyak daripada usaha besar, serta bersifat padat karya sehingga mampu menyerap jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada usaha besar yang cenderung bersifat padat modal dan padat teknologi;
- 2) Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) lebih banyak menggunakan bahan baku lokal dan memiliki dampak berganda bagi perkembangan unit-unit usaha pendukung lainnya, terutama hasil

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta perdagangan kecil dan menengah; dan

- 3) Perkembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki multiplier effect pengembangan industri kreatif di daerah, terutama usaha pengelolaan bahan makanan, rumah makan (kuliner), garment, fashion, karya seni, perhiasan dan lain-lain yang banyak menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal (Swastuti 2013).

Dengan demikian, keberadaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat memberikan suatu kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan efek negatif urbanisasi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan (Swastuti 2013). Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan sektor swasta untuk dapat mendukung pengembangan UDKM dan UMK-Koperasi di Kabupaten Lampung Tengah.

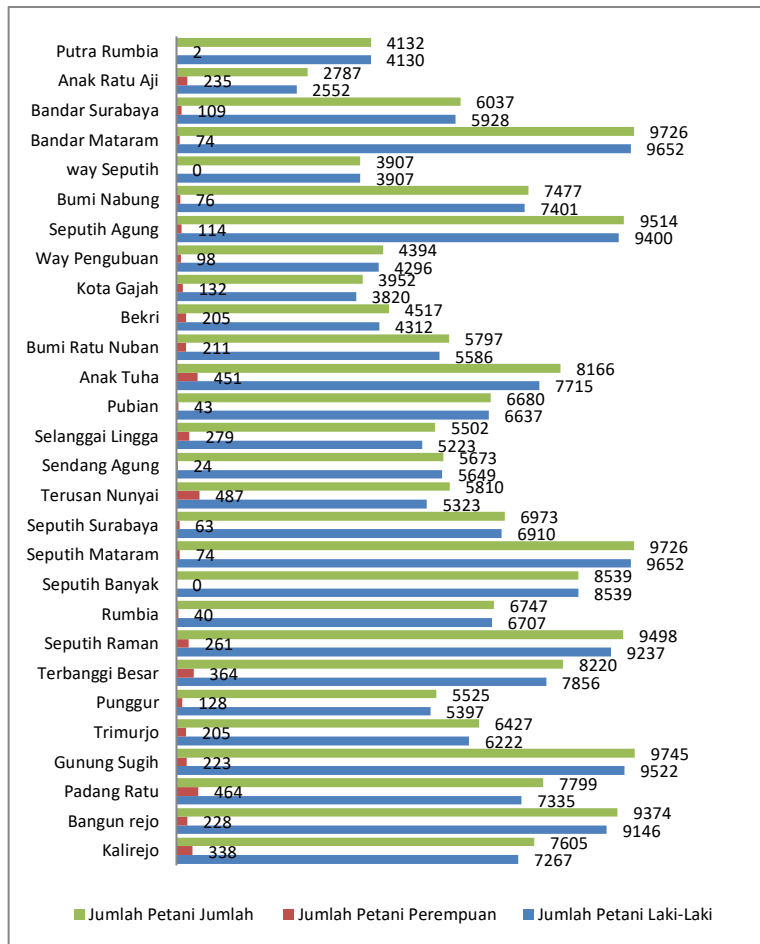
5) Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah propinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima yang berperan penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja dipedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya (Risnawati 2016).

Di Kabupaten Lampung Tengah, secara keseluruhan ada 190.249 petani, dengan komposisi laki-laki 185.321 orang dan perempuan 4.928 orang. Mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, berarti 12,95 % penduduk Lampung Tengah adalah petani dan merupakan 28,72 % dari jumlah penduduk yang bekerja.

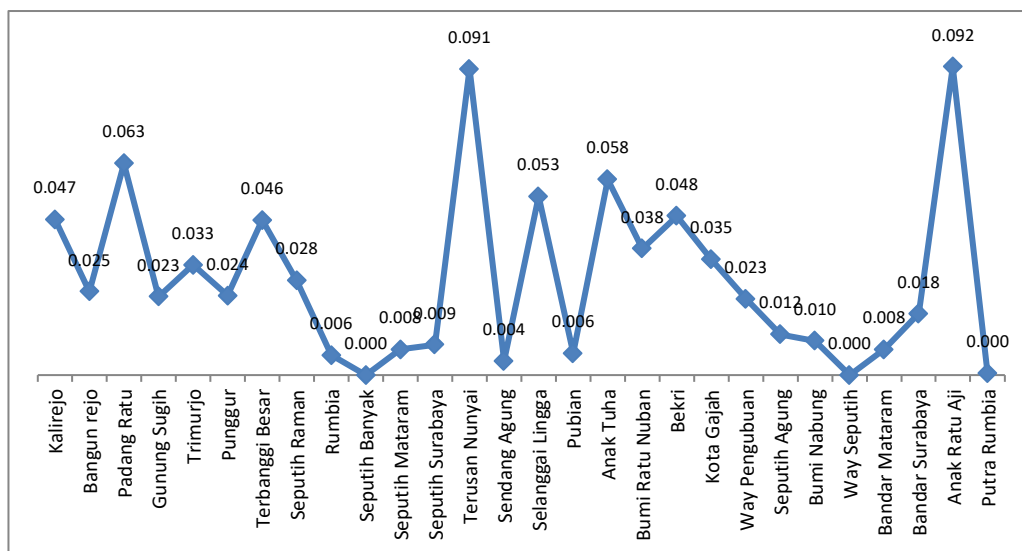
Grafik 62. Petani Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Berdasarkan data pada Grafik 63, indeks paritas sebesar 0,02 dimana terdapat kesenjangan kinerja antara perempuan dengan laki-laki, dimana kinerja perempuan lebih rendah. Sedangkan indeks disparitas gender yang tercipta sebesar **94,81 %**. Berdasarkan data pada Grafik 53 indeks paritas paling rendah ada di Kecamatan Way Seputih, Seputih Banyak dan Putra Rumbia.

Grafik 63. Indeks Paritas Petani
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

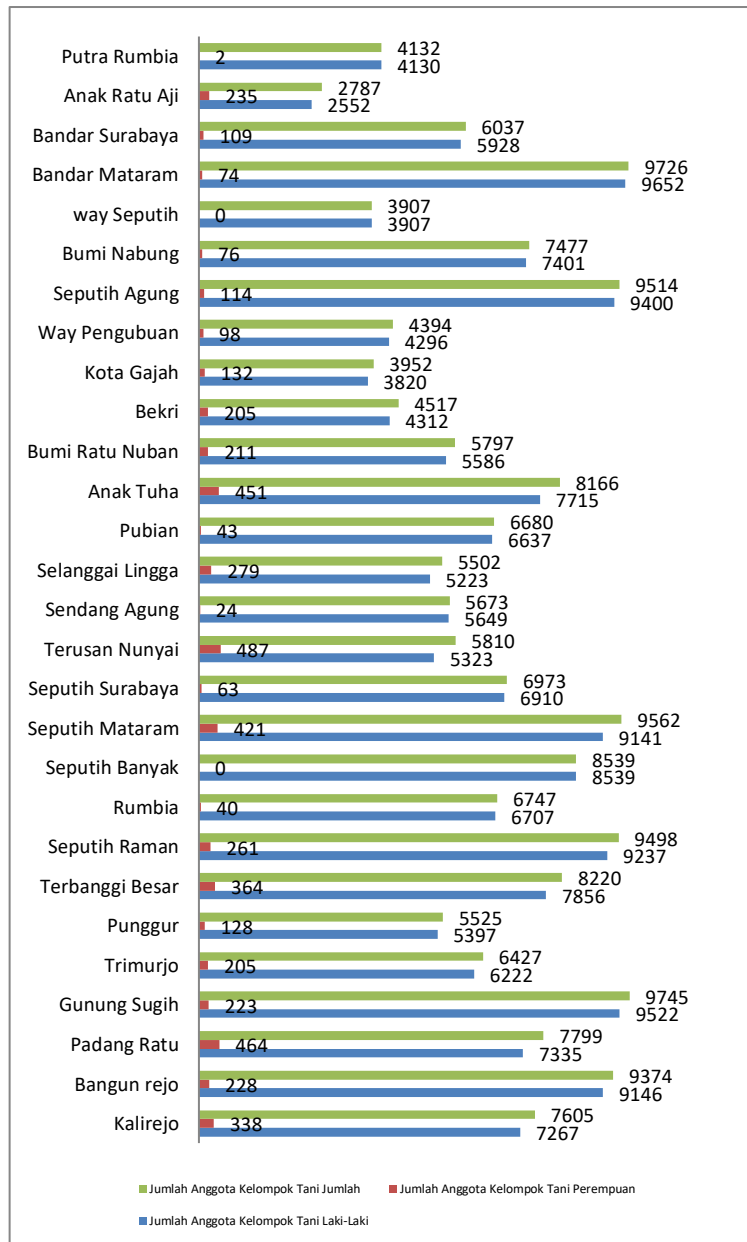


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Anggota kelompok tani (Poktan) didominasi oleh anggota laki-laki dengan persentase 97,22 persen. Adapun secara keseluruhan jumlah anggota paling banyak ada di Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Mataram, dan Kecamatan Seputih Agung (lihat Grafik 64). Dalam hal indeks paritas terjadi kesenjangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan nilai 0,03 dimana kinerja perempuan lebih rendah. Sedangkan indeks disparitas 94,45 %. Grafik 65 menyajikan data sebaran indeks paritas untuk masing-masing kecamatan.

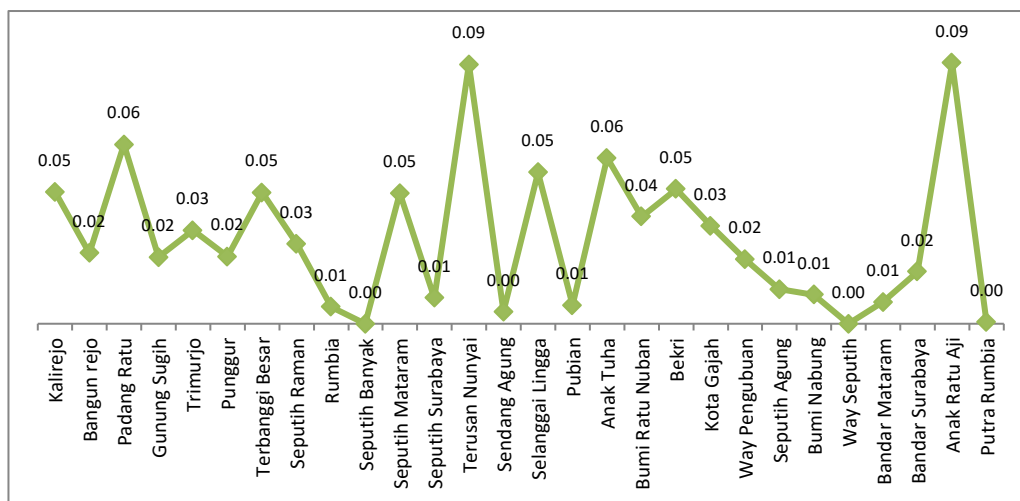
Menurut Arsanti (2013) peningkatan kapasitas perempuan sebagai bagian penting dari SDM sektor pertanian masih belum tergarap dengan optimal. Budaya lokal yang menempatkan perempuan sebagai 'konco wingking' menjadi hambatan tersendiri dalam penyebarluasan informasi dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan oleh petani perempuan pada sektor tersebut. Disadari bahwa peran perempuan dalam pertanian sangat besar pada kenyataannya, sebagian besar aktivitas pertanian senantiasa melibatkan perempuan didalamnya mulai dari persiapan bibit, penanaman dan perawatan bahkan sampai pada masa panen. Namun secara statistik, angka petani perempuan sangat rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan posisi perempuan yang terkadang tidak dihitung sebagai tenaga kerja (dan tidak dibayar) ketika memberikan bantuan tenaga kepada suami sebagai kepala rumah tangga yang bergerak di sektor pertanian.

Grafik 64. Jumlah dan Jenis Kelamin Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

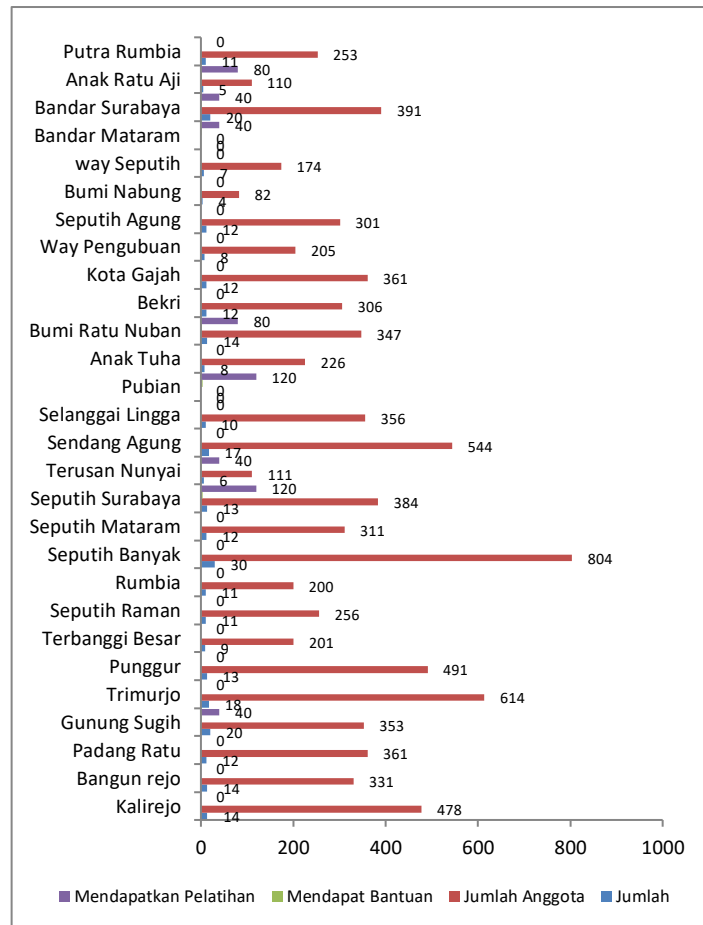
Grafik 65. Indeks Paritas Anggota Kelompok Tani
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 323 kelompok. Sebaran KWT ini belum merata di semua kecamatan, pun begitu jumlahlah juga tidak terdistribusi dengan merata (lihat Grafik 61). Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat memberikan pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif, tidak hanya dari sisi kuantitas bantuan permodalan, pendampingan dan pelatihan namun juga harus ditingkatkan kualitasnya. Sejauh ini bagaimana dampak bantuan permodalan, pendampingan dan pelatihan yang diterima oleh KWT juga perlu mendapat evaluasi, sehingga dapat disusun kerangka kebijakan yang lebih baik untuk masa datang. Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait dapat menggandeng kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung.

Grafik 66. Data Kelompok Wanita Tani (KWT)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

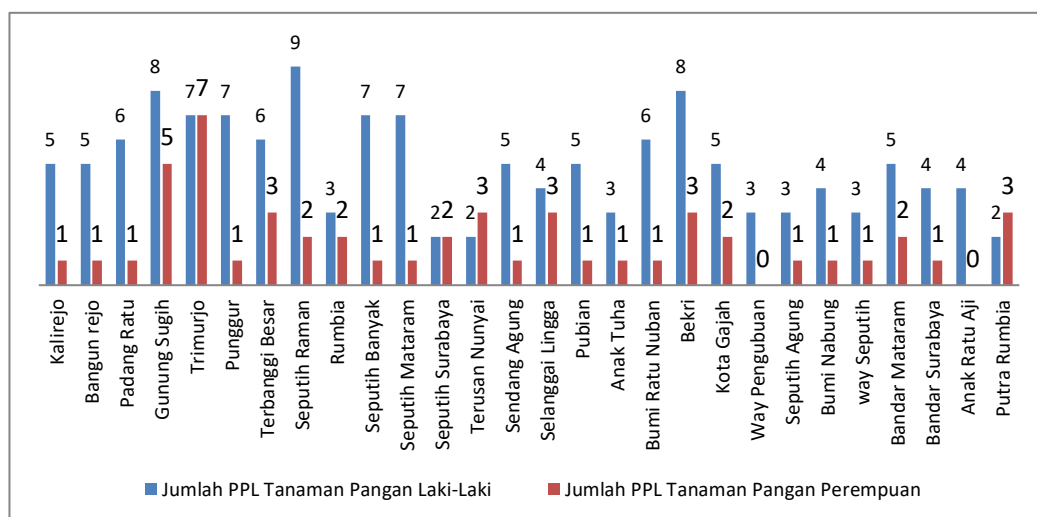
Meski secara statistik, baik sebagai petani maupun Kelompok Tani (Poktan) angka keterlibatan perempuan sangat rendah, namun Purnamawati (2009) menunjukkan pada kontribusi SDM petani perempuan terwujud pada kontribusi keuangan, kontribusi kepercayaan memperoleh kapital, kontribusi untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, kontribusi melanjutkan tradisi bertani/kearifan lokal, dan kontribusi tenaga kerja pertanian yang ulet dan disiplin, serta kontribusi ide/pikiran. Adapun proses kontribusi tersebut dibagi menjadi dua yaitu kontribusi dalam rumah tangga petani dan kontribusi dalam pertanian. Faktor pendukung yang mempengaruhi kontribusi SDM petani perempuan ini adalah: himpitan ekonomi; banyaknya kegiatan sosial yang diikuti; kerjasama yang harmonis antar sesama petani perempuan; interaksi yang terjalin dengan baik antara petani perempuan dengan pihak-pihak yang mendukung kegiatan pertanian; dan modal sosial yang dimiliki petani perempuan, sedangkan faktor penghambatnya adalah: rasa percaya diri yang rendah; fisik lemah; beban kerja ganda; posisi perempuan yang termarginalkan dalam

pengambilan keputusan dalam ranah publik pertanian; serta akses dan kontrol yang rendah terhadap sumber daya pertanian yang ada.

**

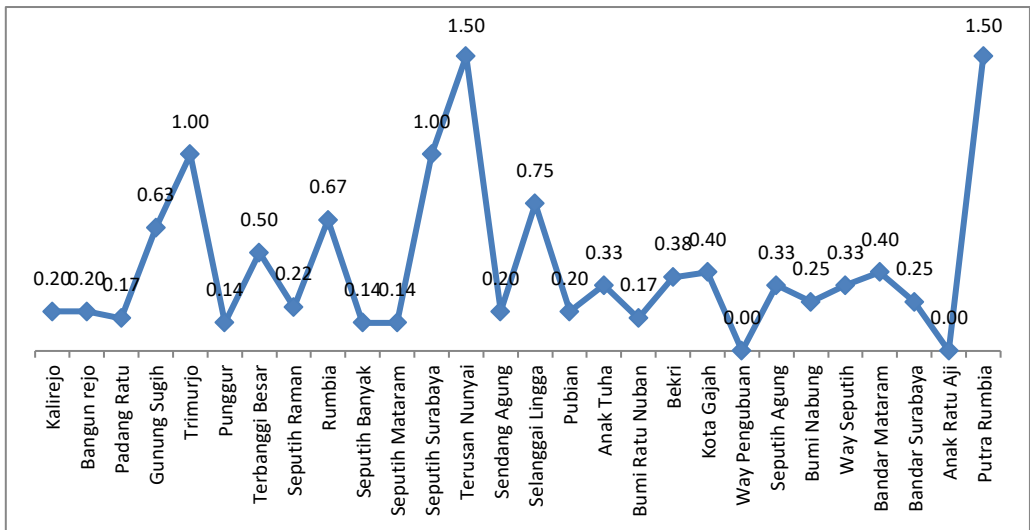
Berdasarkan data pada Grafik 66 jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian yaitu 189 orang, dengan jenis kelamin laki-laki 138 orang dan perempuan 31 orang. Jumlah PPL paling banyak ada di Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Trimurjo Indeks paritas yang terbentuk dari rasio kinerja perempuan dan laki-laki yaitu 0,37. Pada beberapa Kecamatan telah terjadi keseimbangan gender (lihat selengkapnya pada Grafik 67).

Grafik 67. Petugas Penyuluh Lapangan Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

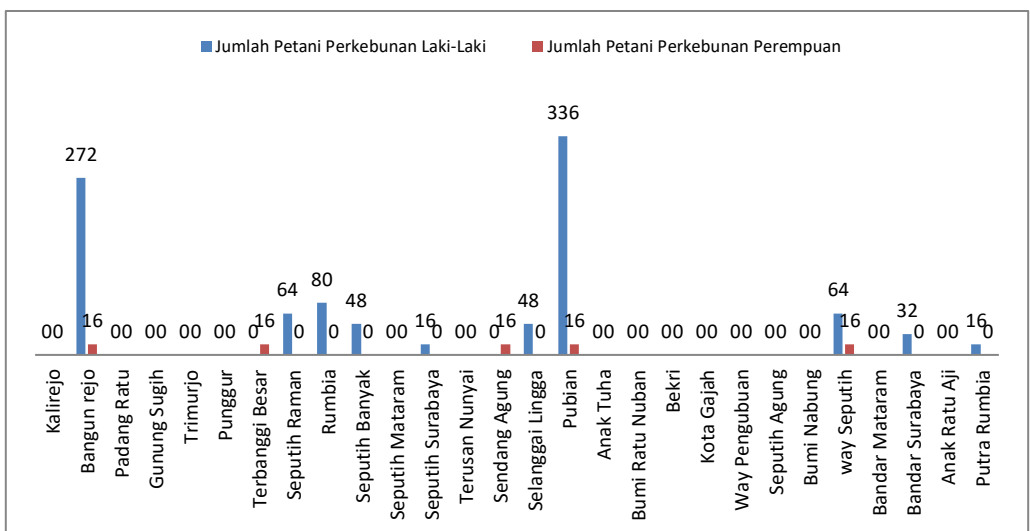
Grafik 68. Indeks Paritas PPL per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

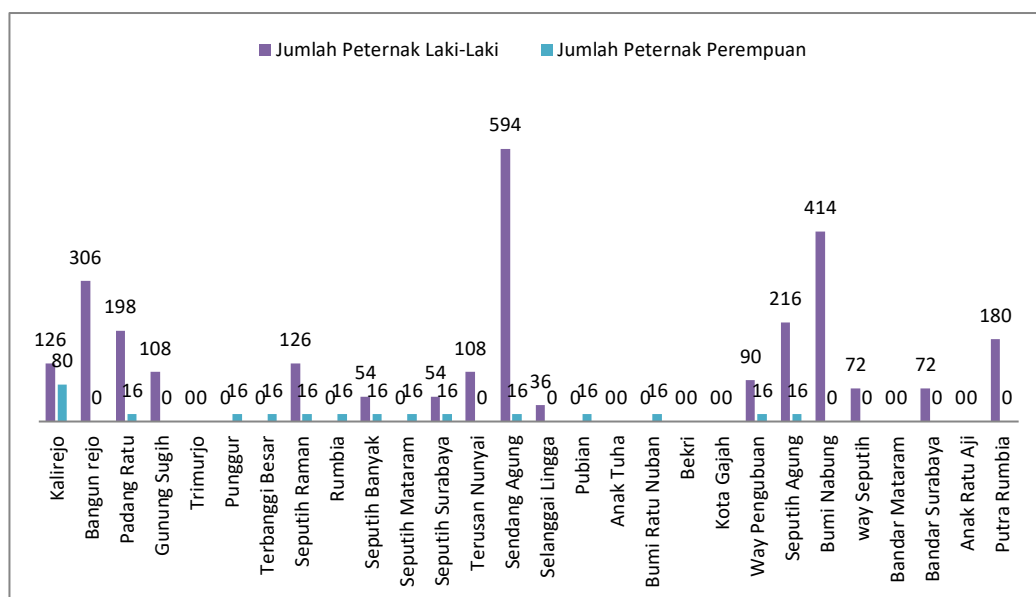
Pada bidang perkebunan jumlah paling banyak ada di Kecamatan Pubian dan Kecamatan Bangun Rejo (lihat Grafik 68). Sedangkan pada bidang peternakan, jumlah paling banyak ada di Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bumi Nabung dan Kecamatan Bangun Rejo (lihat Grafik 69).

Grafik 69. Petani Perkebunan Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 70. Peternak Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

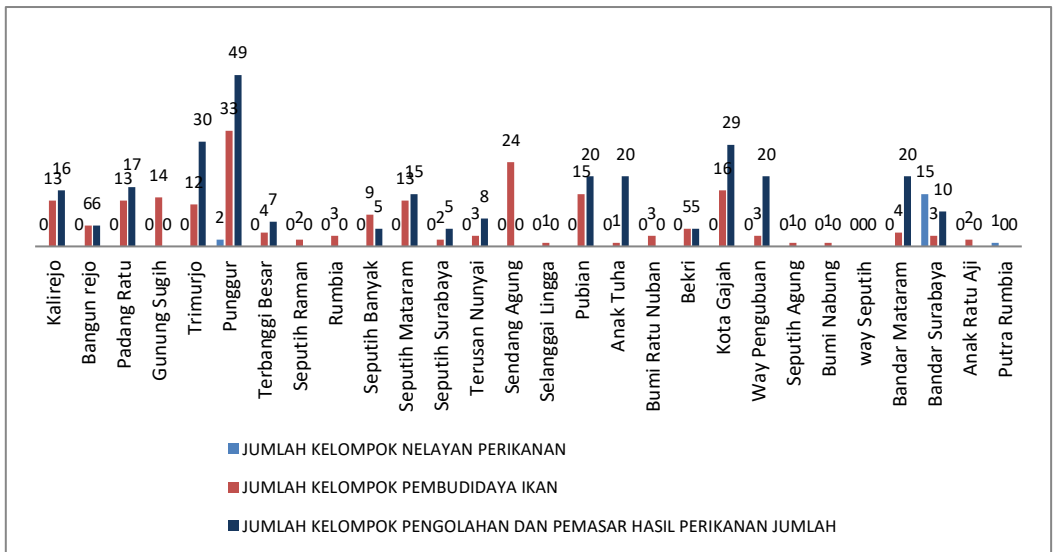


Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Analisis paritas pada bidang perkebunan menunjukkan ada kesenjangan kinerja antara perempuan dengan laki-laki dimana kinerja perempuan lebih rendah yaitu 0,08, dengan indeks disparitas kinerja gender 85 %. Begitu pula fenomena pada sektor peternakan, yaitu ada kesenjangan kinerja perempuan dan laki –laki dimana kinerja perempuan lebih rendah dengan angka 0,10, dan indeks disparitas gender sebesar 81 %.

Pada bidang perikanan, jumlah kelompok perikanan tidak begitu signifikan, hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki laut sehingga kelompok budidaya perikanan yang ada adalah perikanan air tawar. Kelompok usaha perikanan yang ditampilkan pada Grafik 62 terdiri kelompok nelayan perikanan, kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Pada bagian kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan didominasi oleh perempuan dengan indeks paritas sebesar 55,4 dan analisis disparitas menunjukkan angka 96 %. Fenomena ini bisa menjadi perhatian dinas terkait dengan memfokuskan untuk memberikan pelatihan, pendampingan dan bantuan permodalan sehingga kelompok perikanan ini bisa berkembang dan menjadi salah satu sektor yang menyumbang pendapatan serta menyerap tenaga kerja.

Grafik 71. Data Kelompok Perikanan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pramita (2017) melakukan penelitian tentang peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan sektor basis di Kabupaten Lampung Tengah. Sub sektor peternakan menjadi subsektor kunci (*leading sector*) di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan karena daya penyebarannya tinggi serta pertumbuhan yang cepat dan progresif. Keterkaitan output ke depan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan paling tinggi adalah terhadap sektor industri pengolahan, sedangkan keterkaitan ke belakang sektor tersebut terhadap sektor industri pengolahan berada ke tiga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Namun nilai pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih rendah.

Apa masukan yang bisa diberikan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan ini? Nasrul (2012) mengingatkan kembali tentang keberadaan kelembagaan pertanian, yaitu Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas.

Untuk memaksimalkan potensi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan agar mampu menyumbang peningkatan perekonomian wilayah maka perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah berbasis pada prinsip dasar, bagaimana

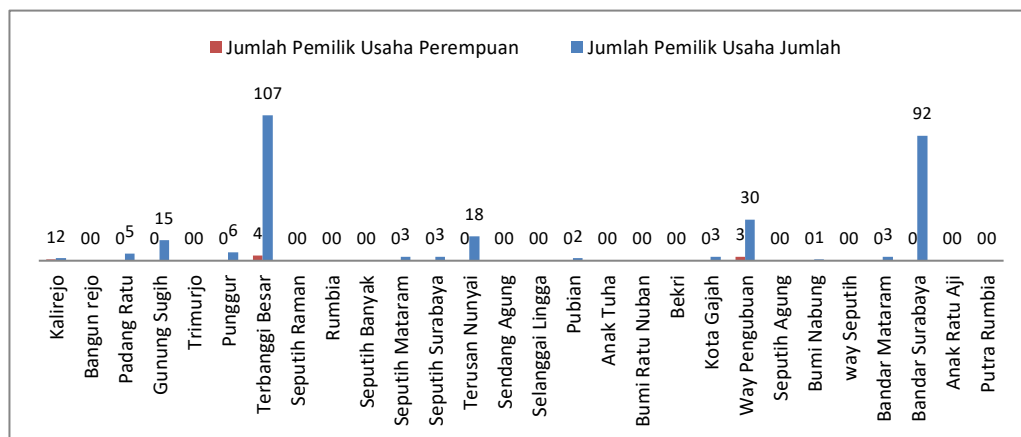
menciptakan peluang bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Upaya pemberdayaan desa seyogyanya tidak dilakukan dengan berbasis pada suatu grand scenario, karena hal yang seperti itu tidak pernah mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan (Nasrul 2012).

6) Usaha Transportasi dan Perhubungan

Pada konteks pembangunan wilayah sektor transportasi merupakan sektor yang memiliki fungsi dan peran sebagai fasilitas penunjang dan pengembang. Sarana transportasi menentukan keadaan seluruh interaksi. Sangat sedikit pertukaran barang dapat terjadi tanpa adanya transportasi. (Adisasmita 2005). Peran lainnya pada sektor transportasi darat meliputi tersedianya barang, stabilitas dan penyamaan harga, meningkatkan nilai tanah, berkembangnya usaha skala kecil, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk, mengurangi kemiskinan (Kamaludin 2013, Kadir 2006, Susanto 2013, Hengkeng 2015).

Pada konteks Provinsi Lampung, Yuliani (2014) melakukan penelitian dan menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara sektor transportasi dan perekonomian Propinsi Lampung. Setiap adanya kenaikan Rp 1 di sektor transportasi, maka akan meningkatkan perekonomian Propinsi Lampung sampai dengan 13,09 kali.

Grafik 72. Usaha Transportasi dan Perhubungan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Usaha bidang transportasi di Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 282 dan pemilik usaha perempuan sebanyak 8 orang (lihat Grafik 72). Selain transportasi darat, di Kabupaten Lampung Tengah juga berkembang usaha angkutan perairan sebanyak 99 unit usaha.

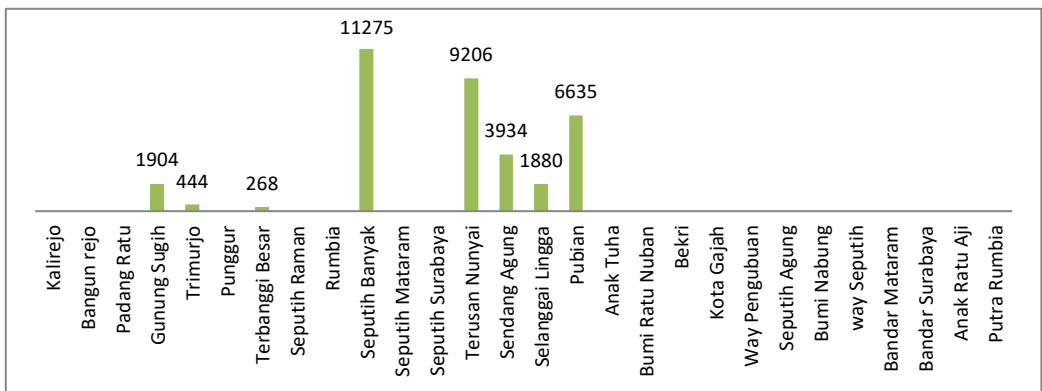
Dalam analisis gender, indeks paritas pemilik usaha transportasi perempuan dan laki-laki sebesar 0,03, yang berarti ada kesenjangan kinerja yang cukup dalam antara perempuan dan

laki-laki dimana kinerja perempuan lebih rendah. Dalam konteks disparitas gender terpisah sejauh 94,48 %.

7) Pariwisata

Menurut Kementerian Pariwisata (Kemenpar) devisa yang disumbangkan dari sektor pariwisata Indonesia tahun 2018 adalah US\$ 19,29 miliar atau hampir mencapai target US\$ 20 miliar yang dicanangkan pemerintah tahun di 2019 (Maarif 2019). Untuk Kabupaten Lampung Tengah, kunjungan wisatawan selama tahun 2019 berjumlah 35.546 wisatawan. Jumlah ini masih jauh jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan Provinsi Lampung yang berjumlah 10,7 juta wisatawan selama tahun 2019 (Sukarta 2020).

Grafik 73. Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

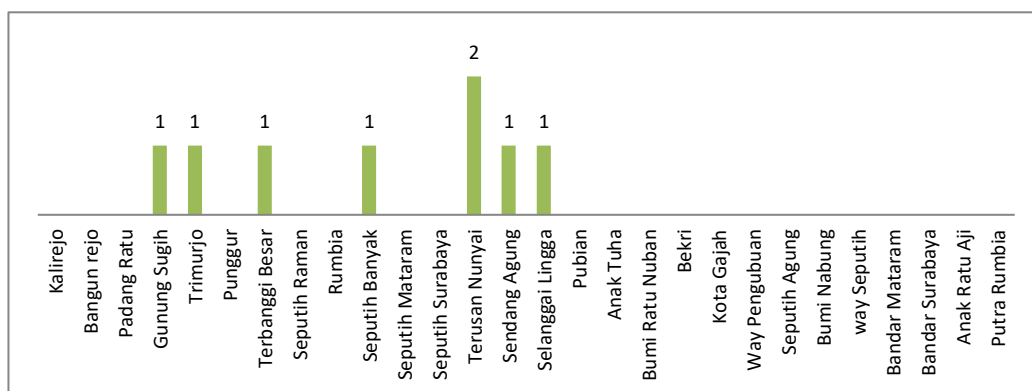
Pada skala nasional, industri pariwisata menyumbang signifikan pada pendapatan nasional, begitu juga di Provinsi Lampung. Sektor pariwisata menjadi sumber perekonomian baru di Provinsi Lampung, selain sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi pendorong sektoral peningkatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung. Sektor jasa pariwisata yang memberikan dampak pada banyak sisi, mulai dari destinasi pariwisata, pemerintahan, sampai dengan kepada penduduk setempat, dapat meningkatkan perekonomian per kapita.

Sektor jasa pariwisata memberikan *multiplier effect* (efek berantai). Perputaran kunjungan wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata membutuhkan akomodasi untuk menginap, transportasi, restoran, dan agen travel yang membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan selama berkunjung ke Provinsi Lampung. Salah satu contoh dampak perekonomian melalui sektor pariwisata di Provinsi Lampung dapat dilihat dari tingkat hunian hotel yang mengalami peningkatan. Okupansi hotel berbintang di Provinsi Lampung selama bulan Februari 2018 meningkat dan berada di posisi 51,98% atau naik 3,53 poin dibandingkan bulan Januari 2018 yang tercatat hanya 48,45% (Haryoseno, 2018).

Namun menurut Nurmansyah (2014) pariwisata membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan standar hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi dan mendorong pembangunan, meningkatkan pendapatan pajak, pengembangan infrastruktur fasilitas publik, pengembangan infrastruktur transportasi, meningkatkan kesempatan untuk belanja. menciptakan kesempatan bisnis baru, penyebaran kue ekonomi kepada masyarakat.

Selain memberikan manfaat positif secara ekonomi, pariwisata juga dapat mendatangkan dampak negatif terhadap sektor ekonomi seperti, membuat harga barang dan jasa menjadi naik, membuat harga tanah dan perumahan di lokasi obyek wisata dan sekitarnya menjadi mahal, meningkatkan biaya hidup, memberikan peluang bagi kehadiran buruh atau pekerja asing yang biasanya berpotensi menggeser kehadiran tenaga kerja lokal yang biasanya memiliki keahlian yang lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja asing, penambahan biaya untuk pembangunan atau penyediaan infrastruktur tambahan (seperti untuk air, sumber tenaga seperti listrik, bahan bakar, medis, dan sebagainya) yang biasanya membutuhkan biaya cukup besar, meningkatkan biaya perawatan jalan dan sistem transportasi, pariwisata yang bersifat musiman (hanya ramai pada waktu tertentu) akan menimbulkan resiko besar bagi terciptanya pengangguran terselubung (pada saat tidak ada kunjungan wisatawan sama sekali atau minim sekali), memunculkan persaingan yang semakin tajam dalam kepemilikan lahan atau tempat yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi, keuntungan dari bisnis pariwisata yang dikelola bersama dengan investor asing sangat berpotensi lari ke luar negeri tempat asal investor dan pekerja asing, gaji rendah terutama untuk pekerja lokal yang dianggap memiliki kualifikasi yang jauh berbeda dengan tenaga profesional dan juga pekerja asing (yang biasanya digaji sangat tinggi) (Nurmansyah 2014).

Grafik 74. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Di Kota Bandung, Dinas Pariwisata melakukan roadshow dan workshop dengan bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mengembangkan objek wisata potensial di wilayah mereka berdasarkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan membentuk Pokdarwis-nya sendiri. Setiap Pokdarwis harus mampu menghasilkan konsep pengembangan objek wisata dan bertanggung jawab atas keberlanjutan objek wisata (Bona et al 2018).

Menyerahkan pengembangan dan pengelolaan pariwisata daerah pada Pokdarwis bukan tanpa alasan, temuan Hani'ah (2017) menyebutkan bahwa Pokdarwis mampu berperan sebagai motivator yang meliputi motivasi ekonomi, motivasi berprestasi, dan motivasi sosial, fasilitator, dan peran komunikator dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya pengembangan Desa Wisata. Sedangkan faktor pendukung Pokdarwis antara lain dukungan Pemerintah Daerah, sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, peninggalan kebudayaan dan kearifan lokal yang tetap dilestarikan dan faktor penghambatnya, yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran serta aktualisasi masyarakat terhadap sapta pesona (Suryawan 2016).

Untuk mendukung sektor pariwisata menjadi sektor prioritas perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antar semua pihak, di antaranya dimulai dari akses menuju tempat-tempat wisata juga sarana serta fasilitas pendukung di objek wisata yang memudahkan dan memberikan rasa kenyamanan bagi wisatawan saat berkunjung.

Selain itu, juga memberikan rasa aman bagi wisatawan dengan berkoordinasi dengan kepolisian terhadap tindakan kriminalitas di tempat objek-objek wisata. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah setempat, dan pemangku kepentingan juga dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata. Peningkatan sumber daya manusia untuk sektor pariwisata yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, diperlukan strategi promosi yang strategis, efektif, dan tepat sasaran.

E. DATA GENDER BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK

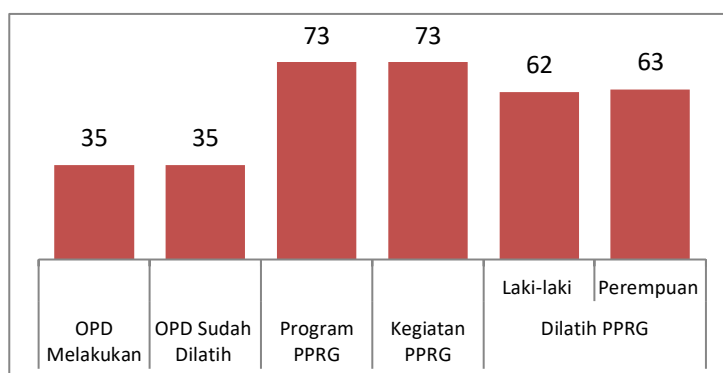
1) Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur Negara

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki-laki, dan perempuan dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, PPRG mensyaratkan adanya kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik.

Di Kabupaten Lampung Tengah telah ada 35 organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan PPRG dalam penyusunan anggaran. Selain itu terdapat 35 OPD yang telah

menjalani pelatihan PPRG, sehingga melahirkan 73 program dan 73 kegiatan yang responsif gender. Sebanyak 62 staf laki-laki dan 63 staf perempuan telah dilatih PPRG. Khusus untuk staf yang telah dilatih PPRG indeks paritas **1,01** dan indeks disparitas adalah **0,8 %**.

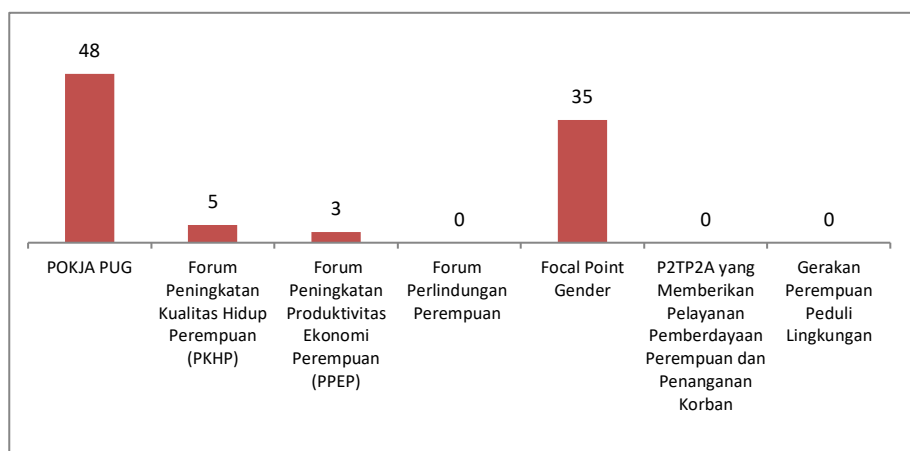
Grafik 75. Pelaksanaan PPRG di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

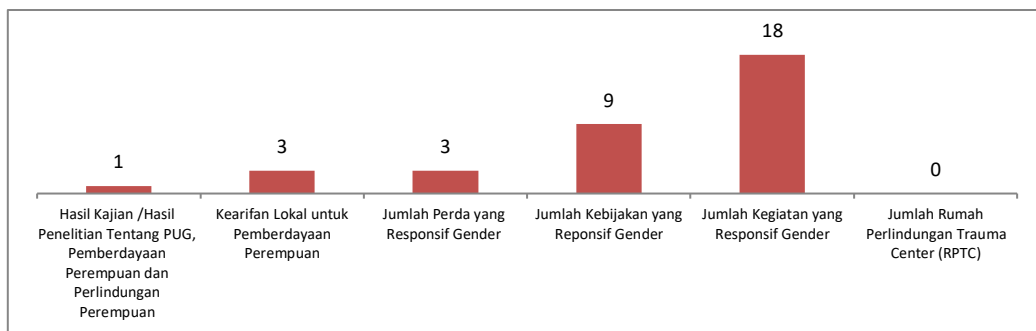
Pelembagaan PUG-Pengarusutamaan Gender dan Anak telah diimplementasikan di Kabupaten Lampung Tengah (lihat Grafik 76). Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data gender dan anak pun sudah cukup tinggi yaitu 35 instansi. Kebijakan ini dapat terus ditingkatkan tidak hanya dari kuantitas namun juga dari sisi kualitas. Dalam beberapa tahun ke depan, dapat dilakukan evaluasi dampak kebijakan, sehingga bisa disusun masukan dan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender dan anak di Kabupaten Lampung Tengah.

Grafik 76. Pelembagaan PUG dan Anak di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 77. Regulasi dan Kebijakan Daerah yang Berbasis PUG di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

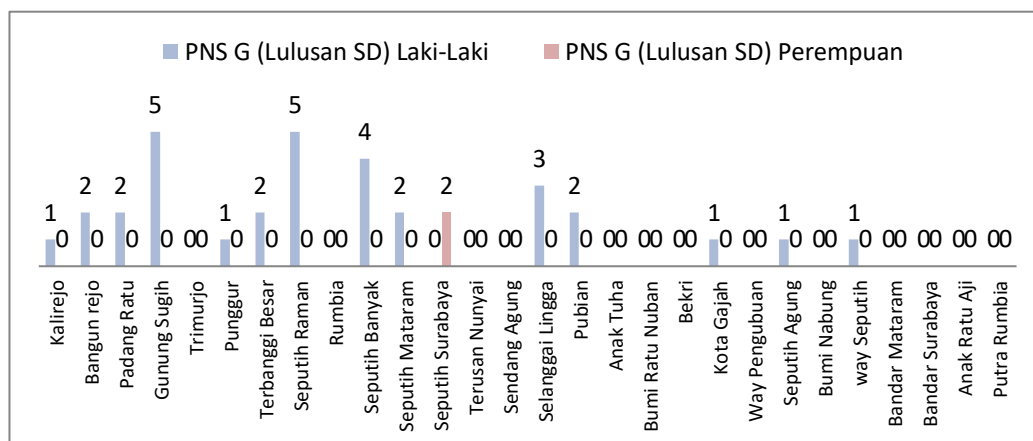


Menurut Antasari dan Hadi (2017) kebijakan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria: (1) pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor yang terkait, tetapi diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung.

Dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, maka setiap program pembangunan di berbagai sektor harus menempatkan Gender mainstreaming (GMS) atau Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai suatu strategi. Pengintegrasian tersebut harus didukung oleh 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang mana satu sama lain saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data pilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Berjalan atau tidaknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baikburuknya birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, birokrasi pemerintah sangat bergantung pada SDM aparturnya jika di Indonesia akan disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan di dalamnya sebagai aparatur penyelenggara pemerintah.

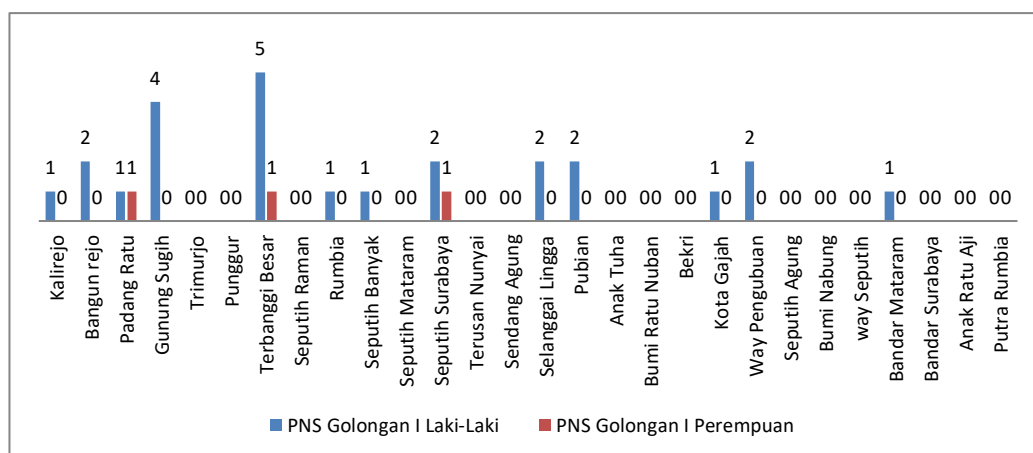
Grafik 78. PNS Lulusan SD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar masih dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebanyak 34 orang, dengan 32 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Adapun sebarannya hanya di beberapa kecamatan saja (selengkapnya lihat Grafik 78). Indeks paritas PNS dengan latar belakang pendidikan SD adalah 0,06 dan analisis disparitas 88,24 % dengan catatan terjadi kesenjangan dengan kinerja perempuan lebih rendah dari pada kinerja laki-laki.

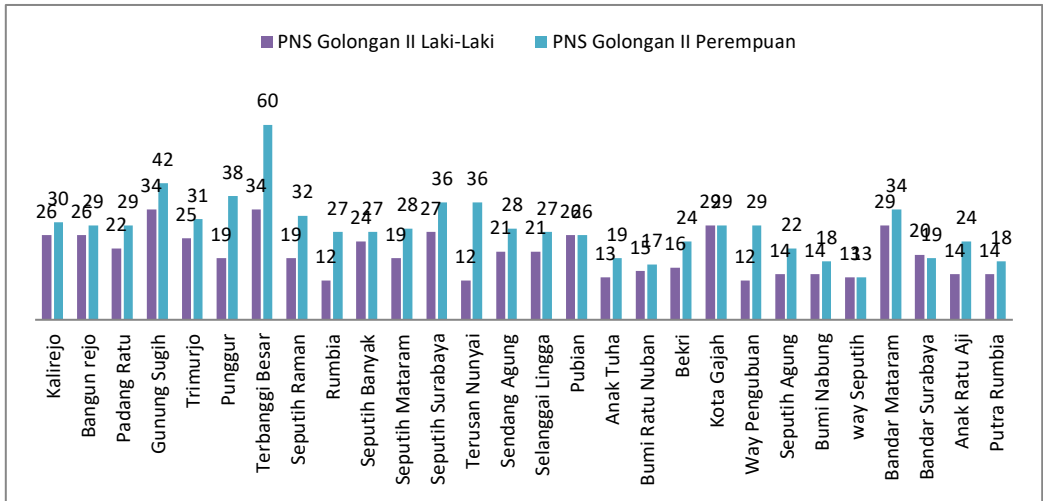
Grafik 79. PNS Gol I Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

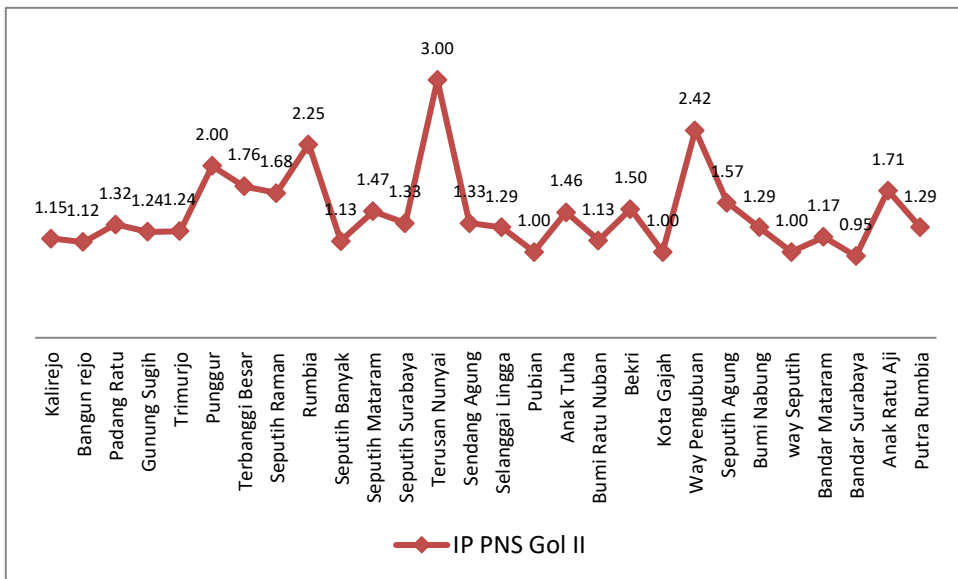
PNS dengan latar belakang Golongan I terdapat 28 orang, yaitu 25 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Indeks paritas gender 0,12 dan disparitas sebesar 78,57 % dengan kesenjangan gender terjadi akibat kinerja perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Grafik 80. PNS Gol II Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



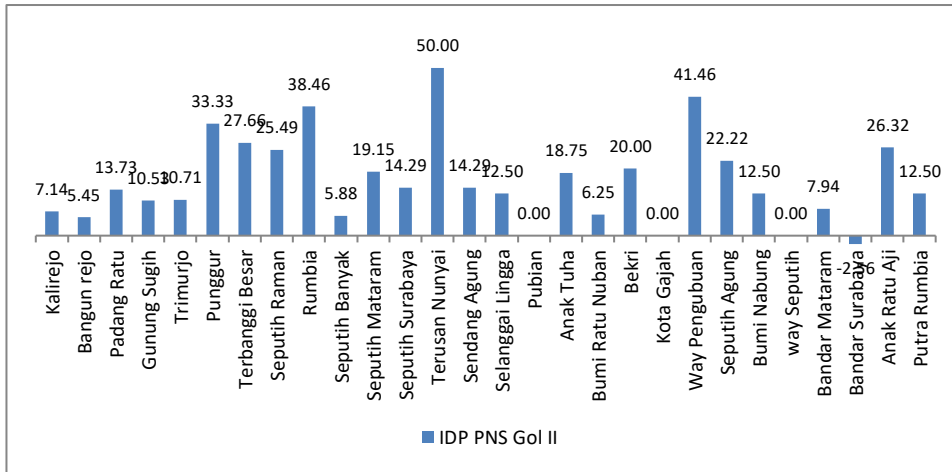
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 81. Indeks Paritas Gender PNS Gol II Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

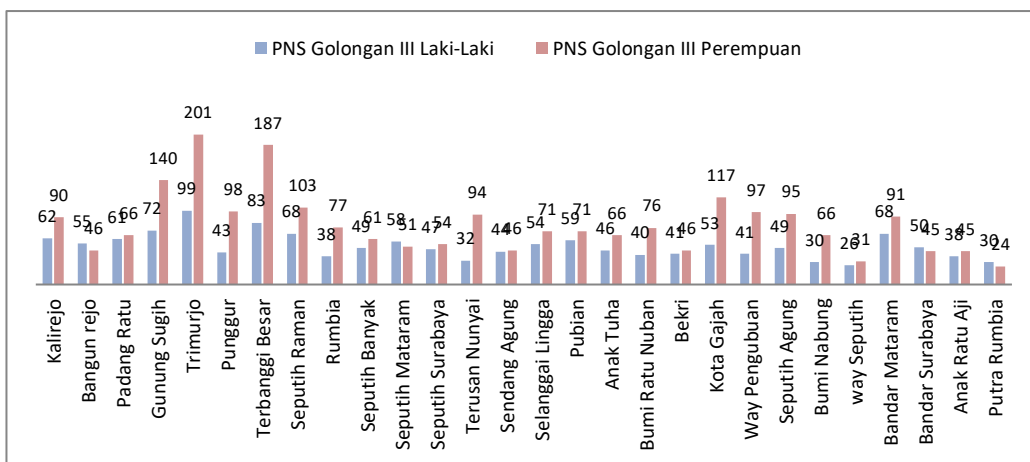
Grafik 82. Disparitas Gender PNS Gol II Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

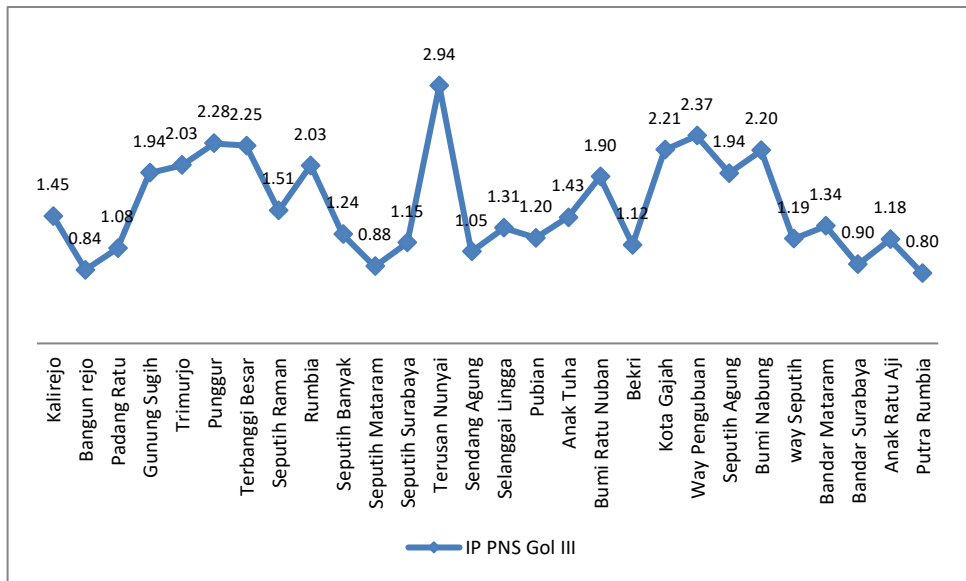
Grafik 80,81 dan 82 menyajikan data PNS Gol II di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Sebanyak 1.362 orang dengan komposisi 570 orang laki-laki dan 792 orang perempuan. Sebaran PNS Golongan II terbanyak adalah di Kecamatan Terbanggi Besar (selengkapnya lihat Grafik 80). Untuk indeks paritas yaitu 1,39 dan analisis disparitas 16,30 % dengan kesenjangan kinerja terjadi karena kinerja perempuan lebih baik dari kinerja laki-laki.

Grafik 83. PNS Gol III Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



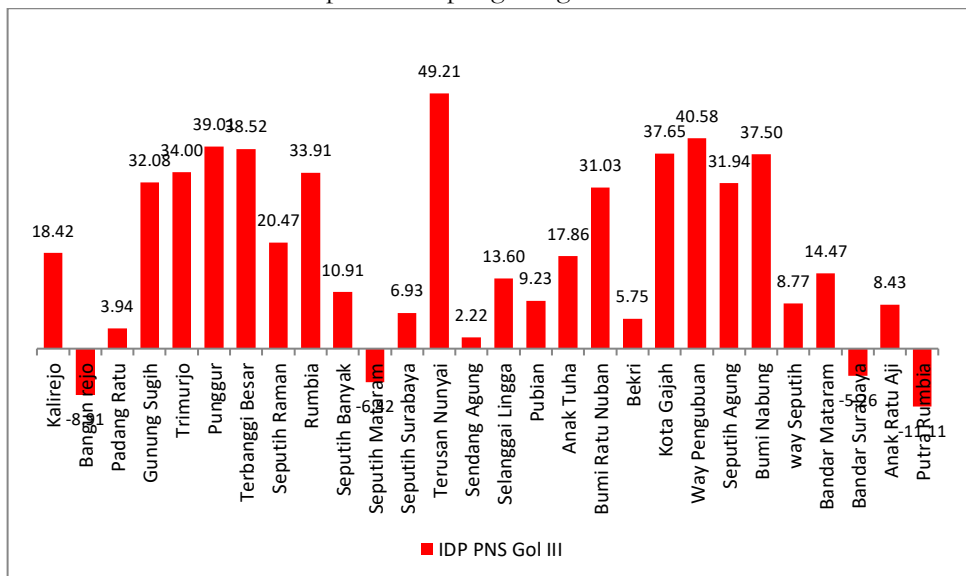
Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 84. Indeks Paritas Gender PNS Gol III Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 85. Disparitas Gender PNS Gol III Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

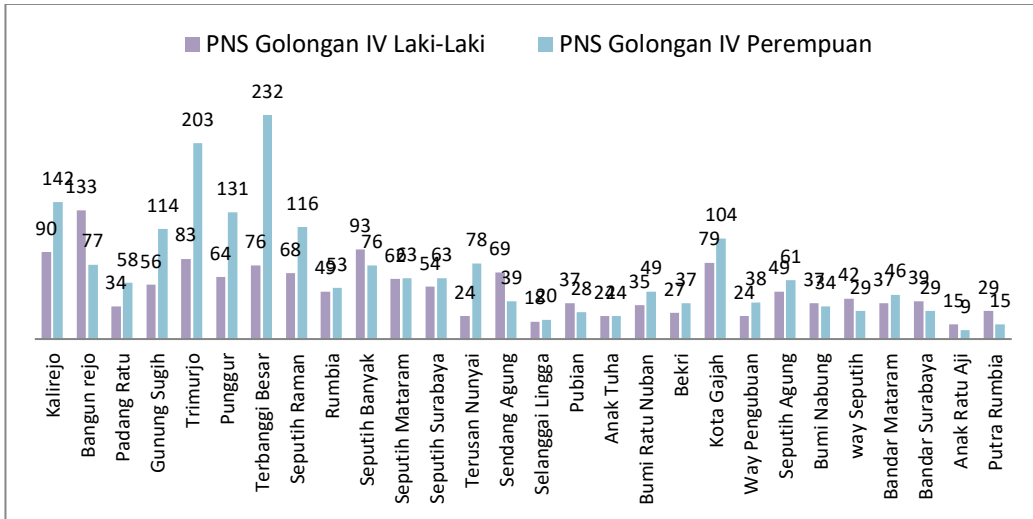


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

PNS Golongan III secara keseluruhan berjumlah 3.691 orang dengan sebaran 1.436 adalah laki-laki dan 2.255 orang adalah perempuan, dengan penempatan paling banyak di Kecamatan Trimurjo (selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 83). Grafik 8 dan 85

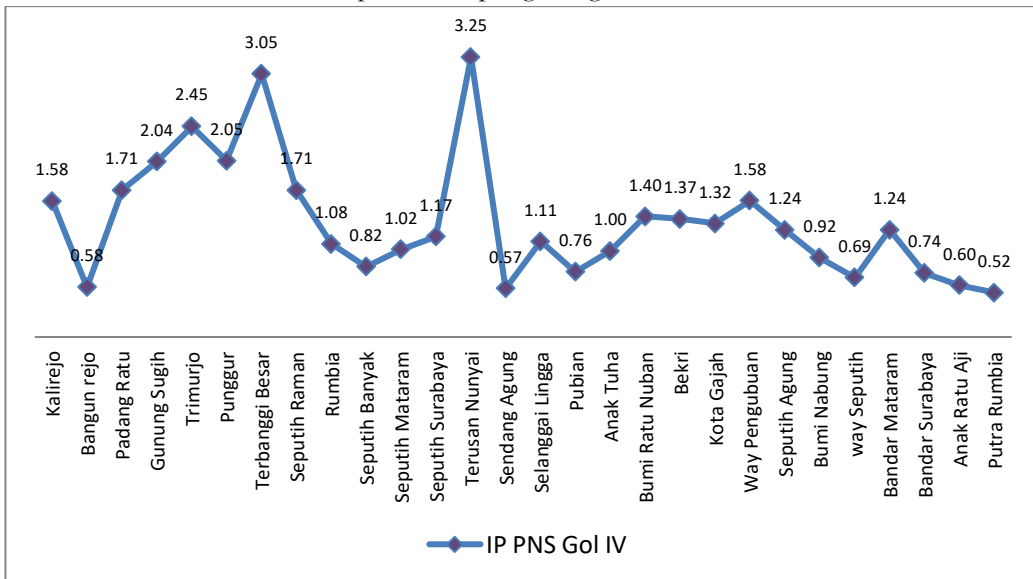
memberikan gambaran pada pembaca mengenai indeks paritas dan analisis disparitas. Adapun indeks paritas sebesar 1,57 dan disparitas sebesar 22,19 % dengan kesenjangan kinerja terjadi karena kinerja perempuan lebih tinggi dari pada kinerja laki-laki.

Grafik 86. PNS Gol IV Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



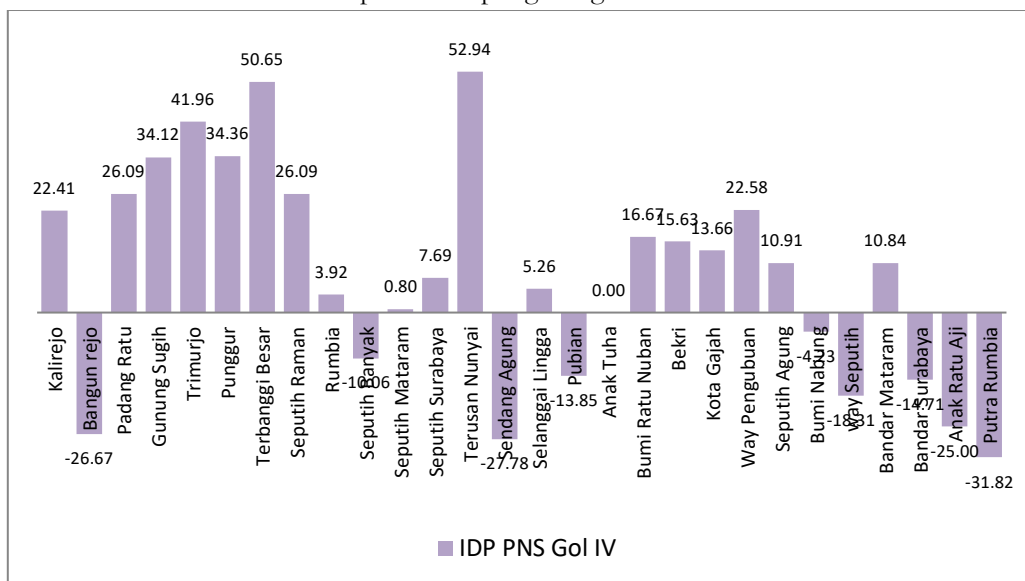
Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 87. Indeks Paritas Gender PNS Gol IV Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

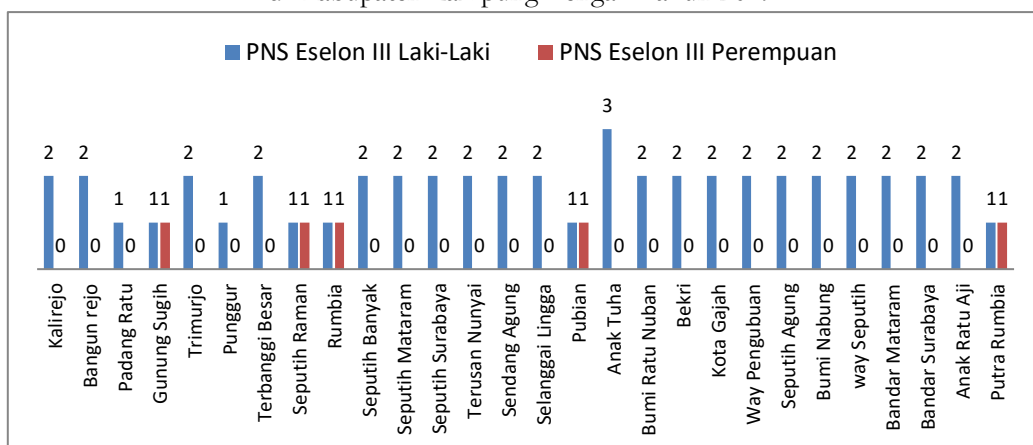
Grafik 88. Disparitas Gender PNS Gol IV Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

PNS Golongamn IV sebanyak 3.415 orang dengan komposisi 1.447 orang laki-laki dan 1.968 orang perempuan. Dengan komposisi terbesar berada di Kecamatan Terbanggi Besar (selengkapnya dapat dilihat di Grafik 86). Indeks paritas sebesar 1,36 dan disparitas sebesar 15,26 % dengan kesenjangan kinerja karena kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

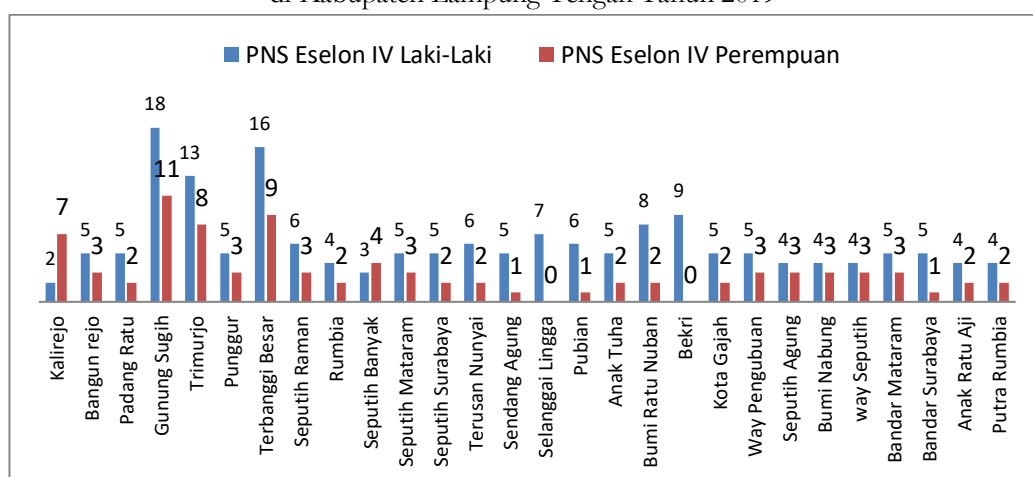
Grafik 89. Pejabat Eselon III Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

ESELON III merupakan hirarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari 2 jenjang: ESELON IIIA dan ESELON IIIB. Jenjang pangkat bagi Eselon III adalah terendah Golongan III/d dan tertinggi Golongan IV/d. Ini berarti secara kepangkatan, personelnnya juga berpangkat PEMBINA atau PENATA yang sudah mumpuni (Penata Tingkat I) sehingga tanggungjawabnya adalah MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN. Di tingkat provinsi, Eselon III dapat dianggap sebagai MANAJER MADYA SATUAN KERJA (INTANSI) yang berfungsi sebagai penanggungjawab penyusunan dan realisasi program-program yang diturunkan dari strategi instansi yang ditetapkan oleh Eselon II. Eselon III yaitu Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan lain-lain

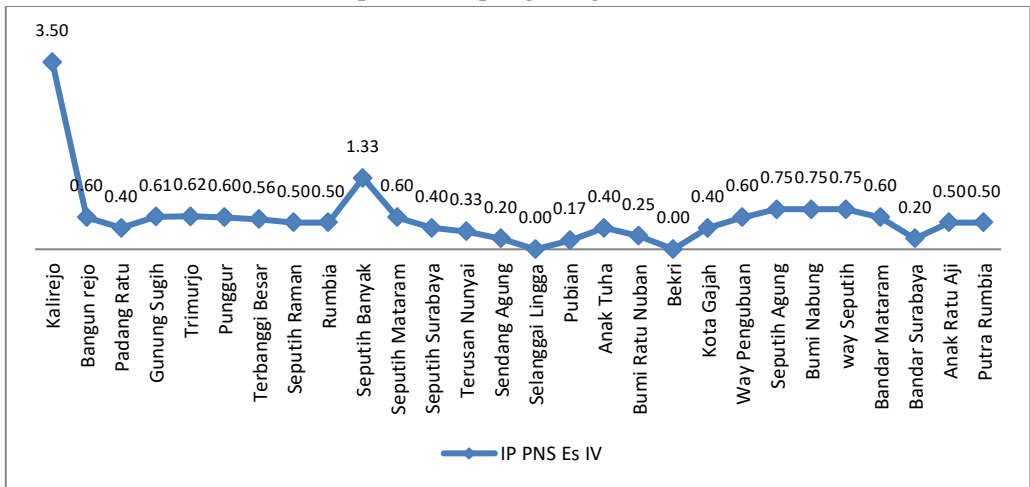
Grafik 90. Pejabat Eselon IV Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

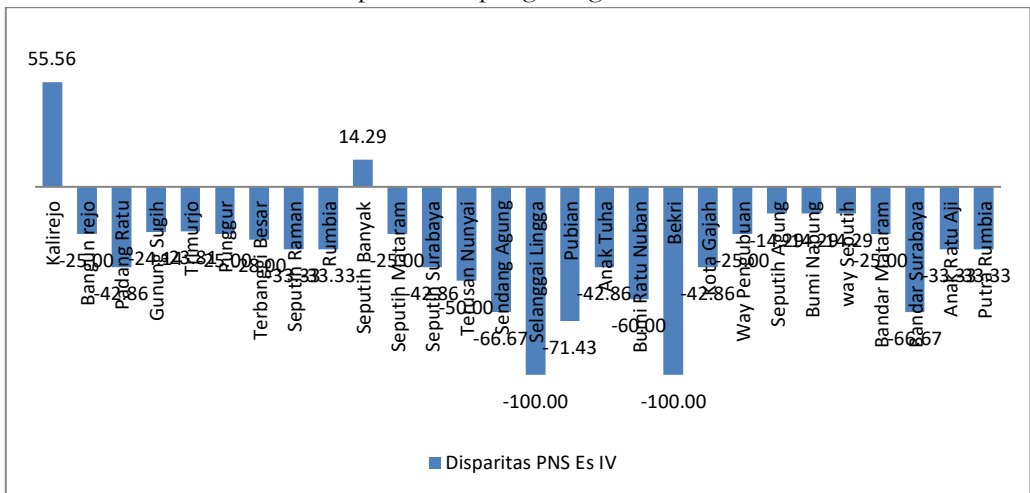
ESELON IV merupakan hirarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari 2 jenjang: ESELON IVA dan ESELON IVB. Jenjang pangkat bagi Eselon IV adalah terendah Golongan III/b dan tertinggi Golongan III/d. Ini berarti secara kepangkatan, personelnnya berpangkat PENATA yang sudah cukup berpengalaman. Makna kepangkatannya adalah MENJAMIN MUTU. Oleh karenanya di tingkat provinsi, Eselon IV dapat dianggap sebagai MANAJER LINI SATUAN KERJA (INSTANSI) yang berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan yang dioperasionalisasikan dari program yang disusun di tingkatan Eselon III. Eselon IV terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Grafik 91. Indeks Paritas Pejabat Eselon IV Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

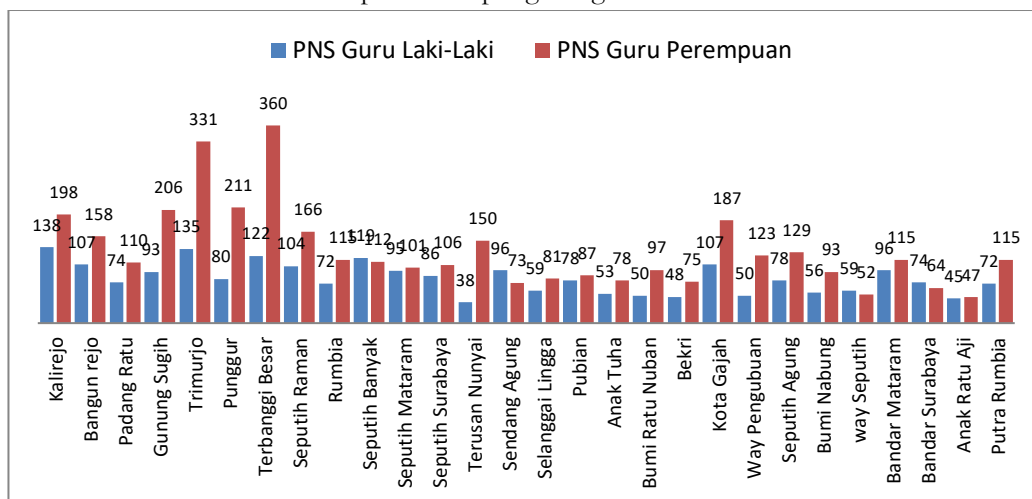
Grafik 92. Disparitas Gender Pejabat Eselon IV Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Di Kabupaten Lampung Tengah, pejabat Eselon IV sebanyak 55 orang, dengan komposisi 5 orang perempuan, dan 50 orang laki-laki. Indeks paritas yaitu 0,10 dan disparitas sebesar 81,82 % dengan kesenjangan kinerja terjadi karena kinerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebaran tiap kecamatan pejabat eselon IV dapat dilihat pada Grafik 90, dan sebaran indeks paritas dan disparitas gender setiap kecamatan dapat dilihat pada Grafik 91 dan 92.

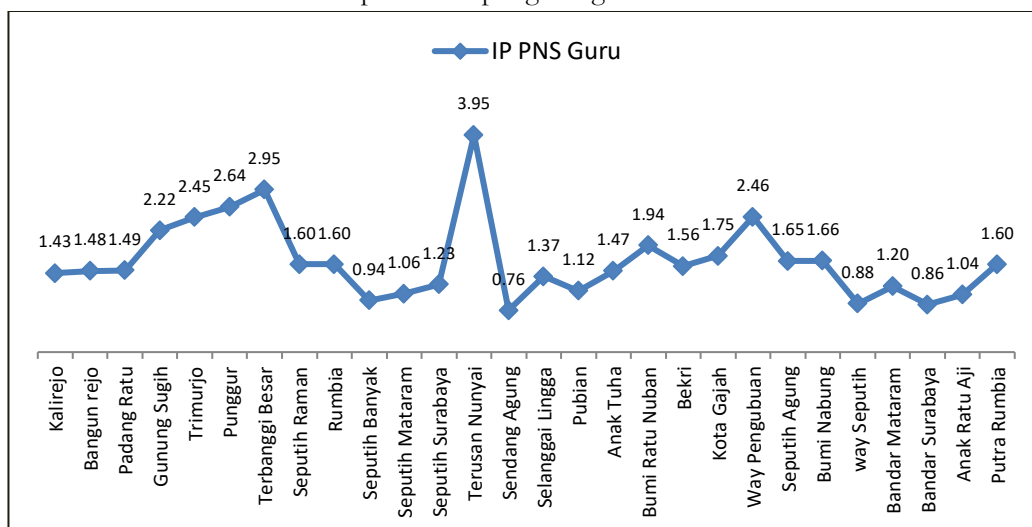
Grafik 93. PNS Guru Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

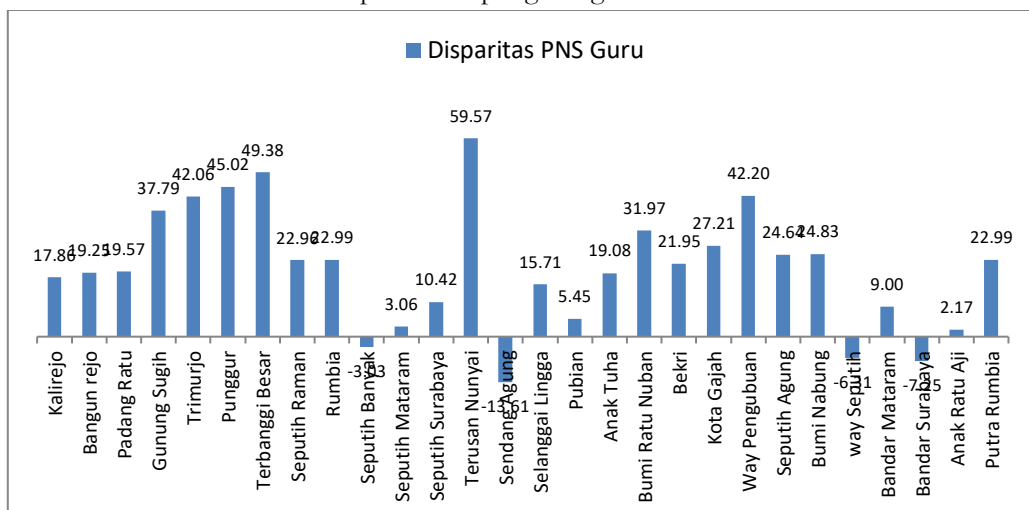
Guru di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 6.024 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.284 orang dan guru perempuan sebanyak 3.740 orang. Sebaran setiap kecamatan dapat dilihat pada Grafik 93. Secara umum, indeks paritas 1,64 dan disparitas gender sebesar 24,17 % , sehingga terjadi kesenjangan kinerja antara guru perempuan dan guru laki-laki dengan kinerja guru perempuan lebih tinggi dari guru laki-laki. Indeks paritas dan disparitas untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat selengkapnya di Grafik 94 dan 95.

Grafik 94. Indeks Paritas PNS Guru Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 95. Disparitas Gender PNS Guru Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

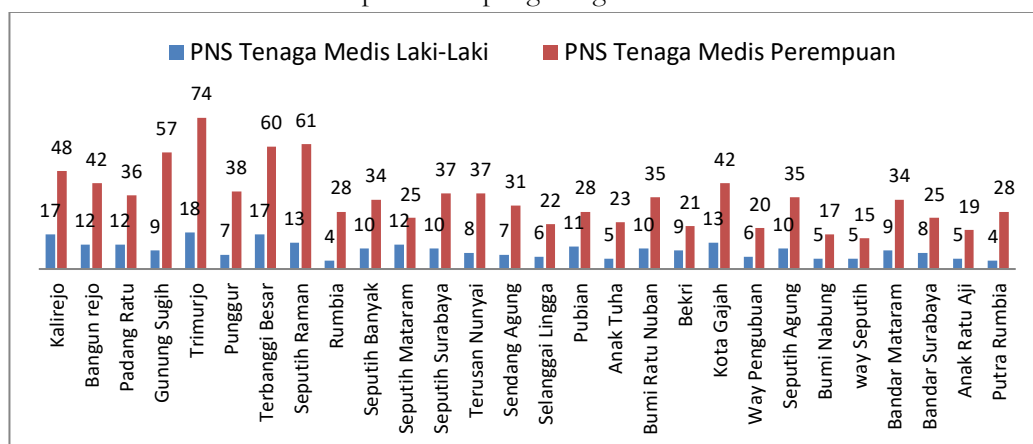
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dalam Pasal 11 Ayat 2 disebutkan jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Tenaga medis merupakan PNS yang sangat dibutuhkan oleh setiap daerah. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat ditingkat dasar di Indonesia adalah melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan unit organisasi fungsional. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dirasa semakin penting, hal ini dikarenakan masyarakat semakin selektif untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mereka sebagai pengguna jasa tidak hanya membayar namun menuntut pelayanan yang baik dan berkualitas mulai di awal hingga akhir. Oleh karena itu, dituntut peran tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dimana seluruh sarana dan prasarana kesehatan tidak akan dapat berdaya guna apabila tidak didukung oleh tenaga medis yang baik dan profesional. Tanpa tenaga medis yang handal maka pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal. Namun, semua itu terkadang terkendala dengan ketersediaan tenaga media untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil.

Pada lingkup Puskesmas, peran medis dalam pelayanan kesehatan meliputi: penataan administrasi; pemeriksaan dan pengobatan pasien; Pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah oleh tenaga medis di Puskesmas; Peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan oleh tenaga medis di lingkungan Puskemas Pembantu (Nurhayati, 2016).

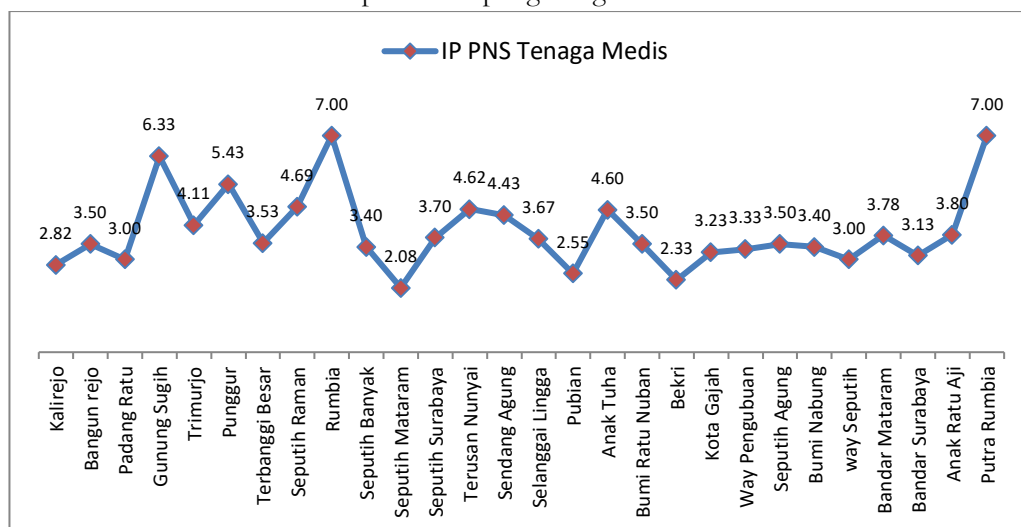
Di Kabupaten Lampung Timur terdapat 1.234 orang tenaga medis, dengan rata-rata setiap kecamatan terdapat 44 orang tenaga medis. Namun persebarannya tidak merata seperti terlihat pada Grafik 96.

Grafik 96. PNS Tenaga Medis Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

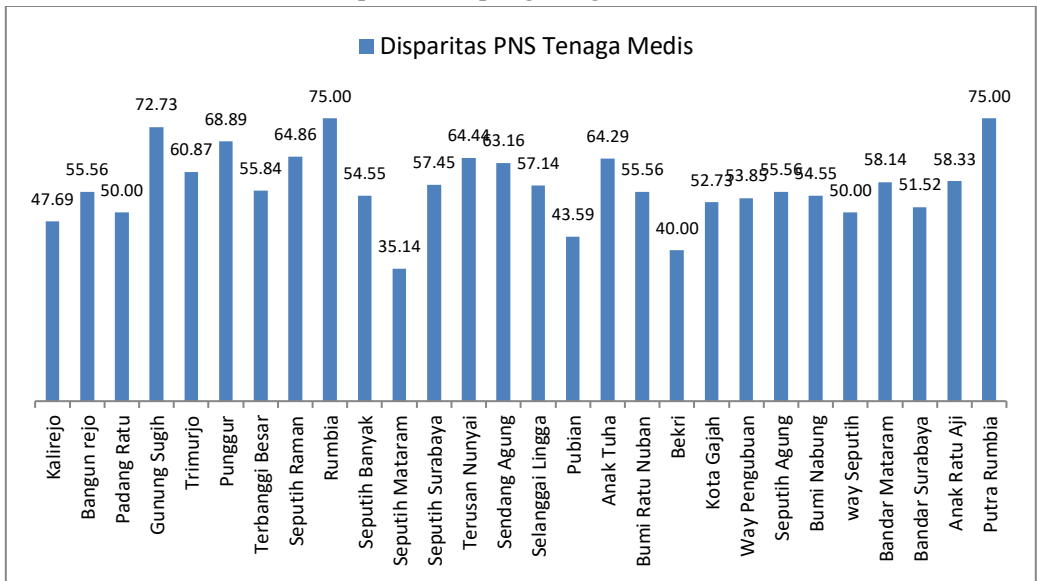
Grafik 97. Indeks Paritas PNS Tenaga Medis Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

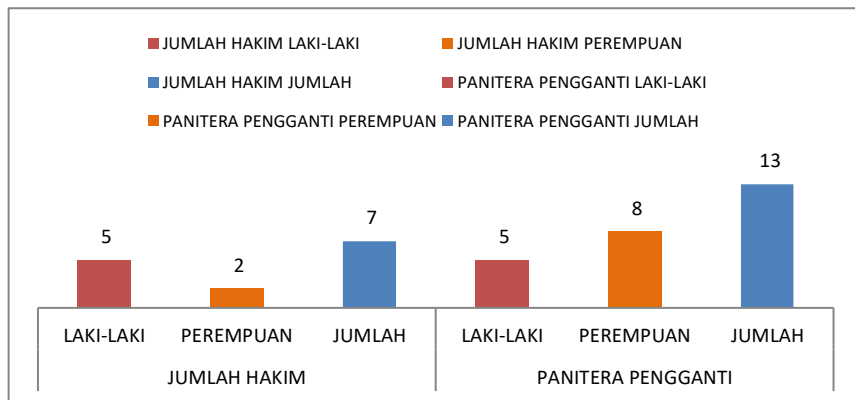
Indeks paritas tenaga medis secara umum pada lingkup Kabupaten adalah 3,71 dengan disparitas gender adalah 57,54 % dengan demikian terjadi kesenjangan gender dimana kinerja perempuan lebih tinggi dari kinerja laki-laki. Adapun indeks paritas dan disparitas masing-masing kecamatan dapat dilihat selengkapnya pada Grafik 97 dan 98.

Grafik 98. Disparitas Gender PNS Tenaga Medis Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 99. Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



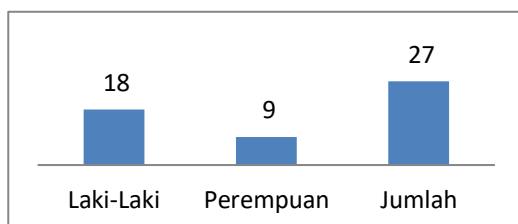
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pada Lembaga Yudikatif (Pengadilan Negeri) terdapat data yang menarik, yaitu jumlah panitera pengganti perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya perempuan di pengadilan negeri keberadaannya secara signifikan diakui oleh lembaga. Indeks paritas gender pada kinerja hakim yaitu 0,2. Dengan demikian ada keseimbangan kinerja antara perempuan dengan laki-laki dengan kinerja perempuan lebih rendah. Sedangkan disparitas gender pada bidang pekerjaan hakim sebesar 42,86 %. Pada

jenis pekerjaan panitera pengganti indeks paritas gender 1,6 dengan demikian terdapat kesenjangan gender dimana kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Sedangkan analisis disparitas menunjukkan selisih kinerja perempuan dan laki-laki sebesar 33,76 %.

Pada lembaga Kejaksaan Negeri jumlah jaksa dan petugas pembantuan adalah 27 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. Terjadi kesenjangan kinerja laki-laki dan perempuan dengan nilai 0,5 yang berarti kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan analisis disparitas menunjukkan selisih kinerja perempuan dan laki-laki sebesar 0,33 dengan kinerja laki-laki lebih besar dari perempuan. (lihat Grafik 100).

Grafik 100. Jaksa dan Petugas Pembantuan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

2) Perangkat dan Kader Pembangunan Desa

Profil perangkat desa di Kabupaten Lampung Tengah yang tersebar di 28 kecamatan seperti tertera pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Aparat Desa di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa	301
2.	Sekretaris Desa	301
3.	KAUR	903
4.	Perangkat Desa (Seksi)	602
5.	Kepala Dusun	2136
6.	Ketua RT	7130
7.	Anggota LPM	4545

Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Sebanyak 301 Kepala Desa dipilih secara demokratis di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan Kepala-kepala Desa terpilih ini mampu mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas demokratisasi lokal di desa.

Tabel 5. Tenaga Pendamping Desa di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pendamping Desa (PD/TI)	28
2.	Pendamping Desa (TA)	28

Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Jumlah pendamping desa (PD/TI) dan TA secara keseluruhan berjumlah 56 orang, yang tersebar di 28 kecamatan (lihat Tabel 5). Adapun jumlah kader penggerak desa di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 4.809 kader yang tersebar di 28 kecamatan.

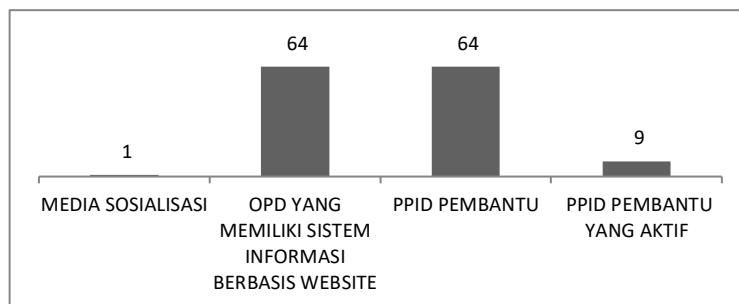
Tabel 6. Kader Penggerak Desa di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengurus Posyandu	2107
2.	Kelompok PKK Aktif	301
3.	Anggota PKK	2100
4.	Kader Desa Aktif (KPMD)	301

Sumber: diolah dari data sekunder 2019

3) Media Informasi Pelayanan Publik

Grafik 101. Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

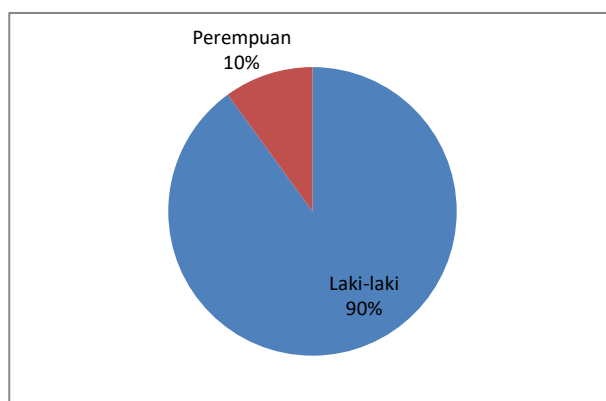
Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki web site resmi yang dikelola secara baik dan berkala, dan 64 OPD memiliki sistem informasi berbasis web.

4) Politik

Pemilu Legislatif 2019 memilih 50 anggota partai politik untuk duduk kursi legislatif. Meski telah menerapkan kebijakan *affirmative action* namun hanya 10 % saja anggota parlemen

perempuan yang berhasil duduk di DPRD. Partai politik yang berhasil mendudukkan anggota perempuannya adalah PDIP sebanyak 3 orang, Partai Golkar sebanyak 1 orang dan PKB 1 orang.

Gambar 6. Anggota DPRD 2019-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

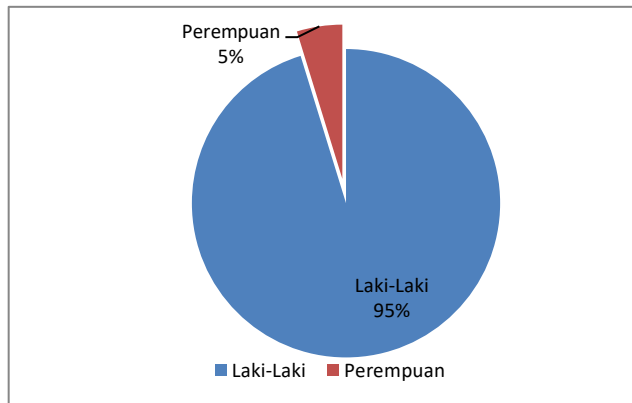
Menurut penelitian Hilman (2018) potensi kuota gender untuk meningkatkan perwakilan parlemen perempuan diyakini telah berkontribusi pada peningkatan yang stabil dalam porsi kursi parlemen perempuan, ada variasi yang signifikan di seluruh wilayah dan negara. Kearifan konvensional menyatakan bahwa faktor budaya adalah kendala utama pada potensi kuota gender untuk memberikan lebih banyak kursi bagi kandidat perempuan. Pengalaman Indonesia menyarankan sebaliknya. Meskipun faktor budaya tetap menjadi penghalang bagi masuknya perempuan Indonesia ke kantor terpilih, faktor budaya tidak menjelaskan naik turunnya representasi deskriptif (numerik) perempuan di parlemen selama dua siklus pemilu terakhir. Temuan-temuan dari studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor institusional, terutama perubahan pada sistem pemungutan suara dan konsekuensi untuk pendanaan kampanye, menghadirkan tantangan yang lebih berat bagi kemajuan perempuan dalam politik partai dan politik parlementer Indonesia. Dengan demikian, *affirmative action* ini harus dibarengi dengan pengurangan faktor-faktor penghambat yang ada.

F. DATA GENDER BIDANG HUKUM DAN HAM

Menurut Eleanor (2011) NAPZA (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkotika dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai/pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat.

Di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang tahun 2019, penyalahgunaan NAPZA sebanyak 231 kasus. Namun, sebagaimana kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya, angka ini dapat diduga merupakan puncak gunung es yang terungkap. Artinya masih tinggi angka yang tidak terungkap secara hukum. Indeks paritas gender pada penyalahgunaan NAPZA adalah 0,05 yang memiliki arti kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Angka ini diikuti dengan analisis disparitas yang memisahkan kinerja perempuan dan laki-laki sejauh 90,48 %. (lihat Gambar 7).

Gambar 7. Angka Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pada tahun 2019 terjadi delapan kasus kekerasan dengan pelaku adalah perempuan, yaitu dengan status pasangan (istri korban) sebanyak tujuh orang dan orang lain (satu orang). Lihat Tabel 7.

Tabel 7. Hubungan Pelaku Kekerasan dan Korban di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

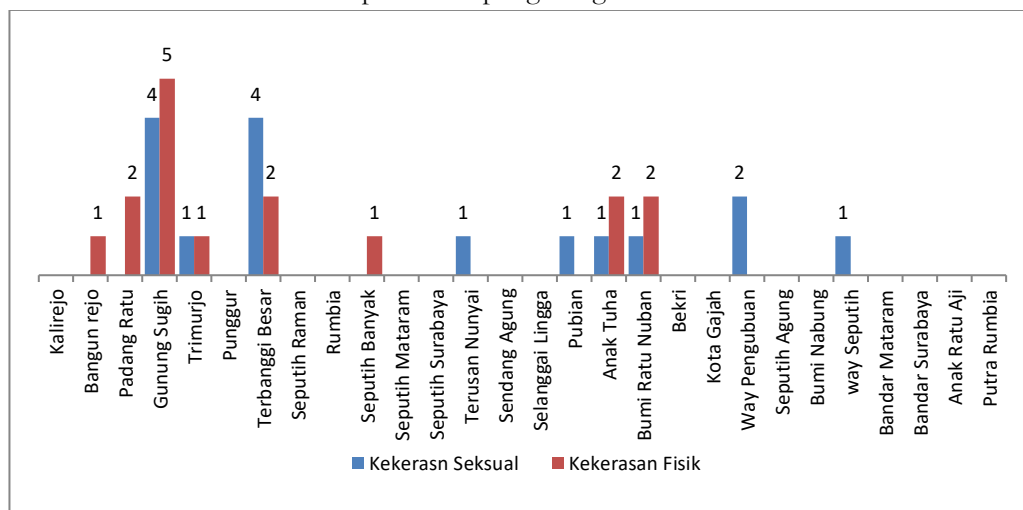
No	Kecamatan	Pelaku	
		Istri	Orang Lain
1.	Gunung Sugih	2	1
2.	Trimurjo	1	
3.	Terbanggi Besar	2	
4.	Seputih Banyak	1	
5.	Bekri	1	
Jumlah		7	1

Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Jumlah korban kekerasan fisik dan seksual di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 sebanyak 32 orang dengan jenis kelamin kesemuanya adalah perempuan. Kasus terbanyak

di Kecamatan Gunung Sugih (9 orang), di Kecamatan Terbanggi Besar (6 orang), serta Kecamatan Anak Tuha dan Bumi Ratu Nuban (masing-masing 3 orang). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 102.

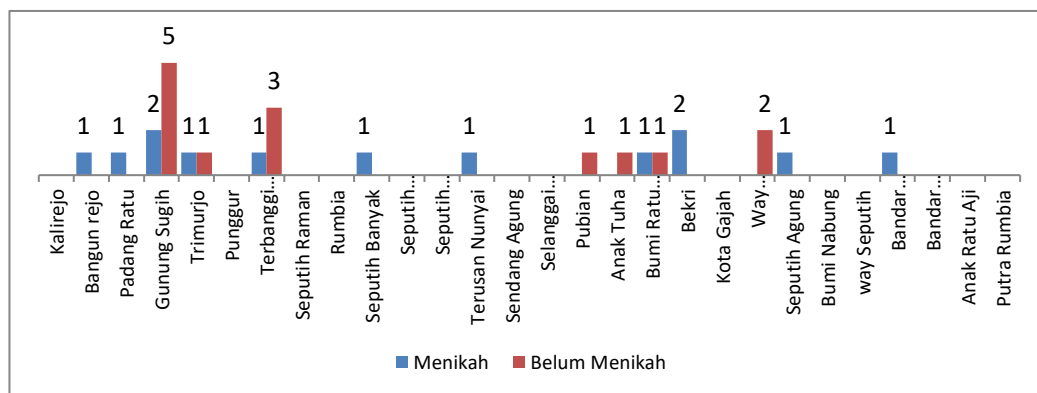
Grafik 102. Korban Seksual dan Fisik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

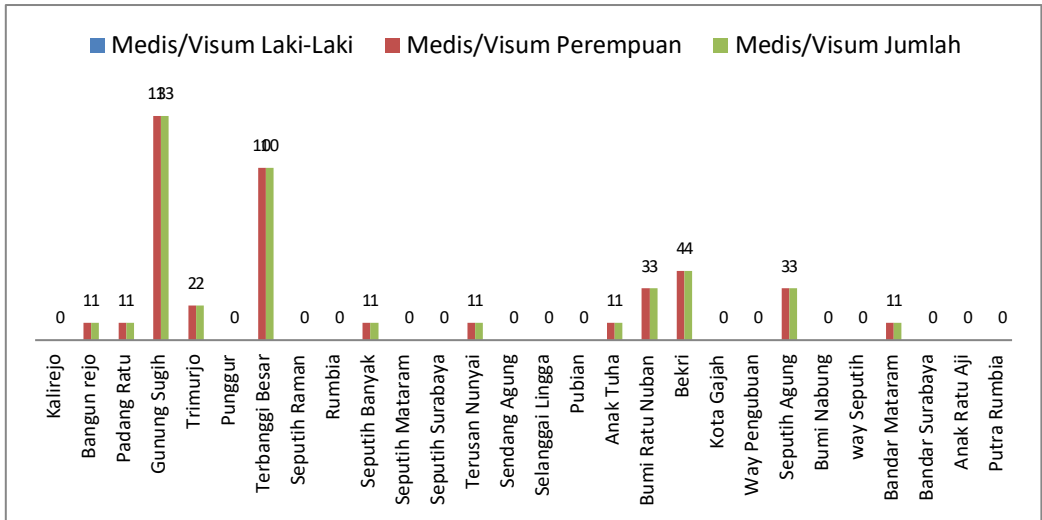
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang tahun 2019 sebanyak 27 kasus, dengan keseluruhan korban adalah perempuan. Korban dengan status sudah menikah sebanyak 13 orang dan belum menikah sebanyak 14 orang. Kasus paling banyak di Kecamatan Gunung Sugih (7 kasus), Kecamatan Terbanggi Besar (4 kasus), serta masing-masing 1-2 orang tersebar di daerah lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 103.

Grafik 103. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Status Pernikahan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 104. Pelayanan Medis/Visum pada Korban dan Pelaku Kekerasan/TPPO di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pelayanan medis/visum telah diberikan pada korban 41 korban/pelaku kekerasan dan/TPPO perempuan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, sebaran per kecamatan dapat dilihat pada Grafik 104.

Muara akhir dari sistem peradilan pidana adalah lembaga pemasyarakatan. Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Hasil penelitian (Sanusi 2019) adalah bahwa proses pemindahan narapidana ke lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Pemindahan narapidana ke lapas terbuka lebih banyak dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan permintaan dari pihak lapas terbuka akibat kekosongan/kekurangan hunian di lapas terbuka. Berdasarkan data jumlah pegawai dan warga binaan tidak rasional (4:1) artinya 4 orang pegawai melayani 1 warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan fakta di atas, maka konsep reintegrasi sosial pada lembaga pemasyarakatan terbuka belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pasal 9 ayat (2) yang memberikan kejelasan wewenang antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan terbuka dalam melaksanakan program pembinaan lanjutan tahap kedua/asimilasi kepada Lapas Terbuka.

Tabel 8. Penjaga dan Penghuni Lapas Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

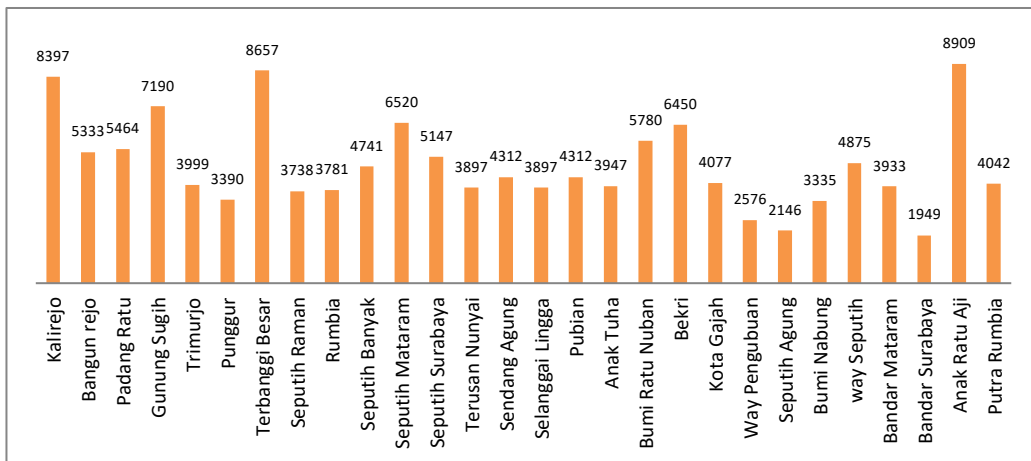
NO	Keterangan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	IP	IDG
1.	Penghuni	673	659	14	0,02	-95,84
2.	Penjaga	66	63	3	0,05	-90,91

Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

G. DATA GENDER BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kemiskinan merupakan masalah yang rumit seakan-akan menjadi persoalan abadi seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya dan selalu berputar semakin membesar serta berdampak semakin luas. Dinas Sosial merupakan instansi yang berwenang dalam mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat. Kewenangan kegiatan ketertiban sosial yang merupakan bagian dari pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Kewenangan yang luas dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang (Rinaldi 2016). (lihat Grafik 105).

Grafik 105. Keluarga Rawan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Kerawanan sosial juga bisa diakibatkan oleh bencana alam. Muzakar (2016) menganalisis dampak bencana alam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan di provinsi Jawa Tengah antara tahun 2000 dan 2014 ini menyimpulkan jumlah bencana alam memberikan efek positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mempengaruhi secara tidak langsung, jumlah bencana alam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dampak kerusakan.

Tabel 9. Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

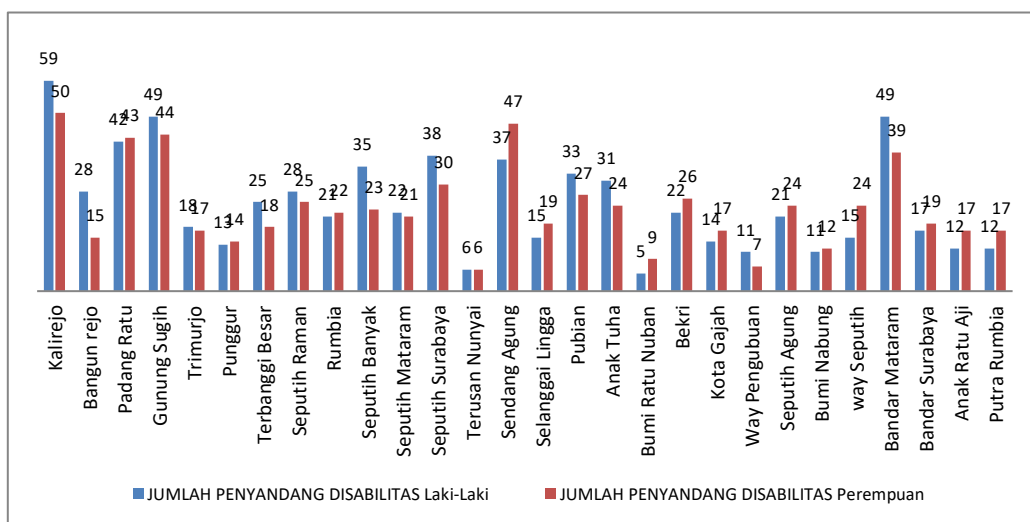
No	Jenis Bencana	Jumlah Korban		IP	IDG
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Angin Puting Beliung	68	9	0,13	-76,62
2.	Kebakaran Pemukiman	23	2	0,09	-84,00
3.	Banjir	69	9	0,13	-76,92

Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Adapun Kabupaten Lampung Tengah mengalami bencana angin puting beliung, kebakaran perumahan dan banjir. Sedangkan korban terdampak berjumlah 180 orang (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 9).

Kerawanan sosial juga bisa berpengaruh dan mempengaruhi penyandang disabilitas, karena kelompok ini merupakan kelompok rentan yang akan menjadi korban jika kerawanan sosial meningkat. Lihat potensi kerawanan sosial dari penyandang disabilitas pada Grafik 106.

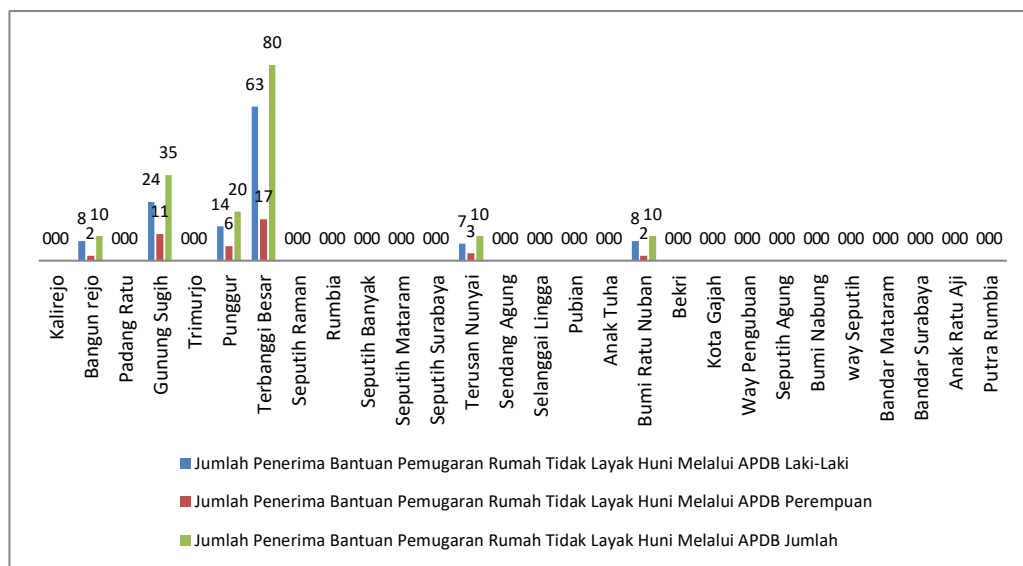
Grafik 106. Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Kelompok-kelompok rawan sosial salah satunya adalah kelompok miskin, yang salah satunya ditandai dengan status kepemilikan rumah yang tidak layak huni. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki proragm bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (dapat dilihat pada Grafik 107).

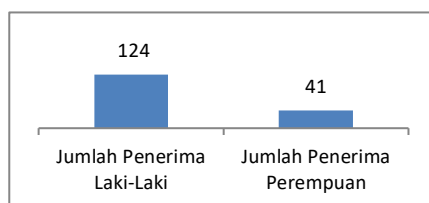
Grafik 107. Penerima Bantuan Pemugaran Rumah di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Indeks paritas 0,33 yang berarti ada kesenjangan dimana rasio kinerja penerima bantuan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan pada analisis disparitas kinerja 50,30 %.

Grafik 108. Rekapitulasi Penerima Bantuan Pemugaran Rumah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

H. DATA TERPILAH ANAK

Batasan umur anak di Indonesia memiliki rujukan yang berbeda-beda (Khoiriah 2019), antara lain:

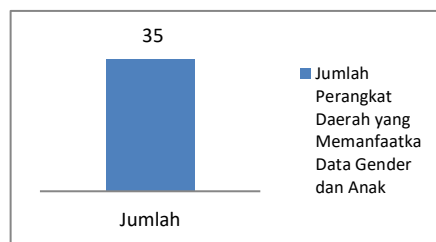
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah mereka yang berusia kurang dari 19 tahun.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara eksplisit disebut anak jika berada dibawah usia 17 tahun, sebab setelah usia 17 tahun seseorang diperkenan memiliki surat izin mengemudi.
- Pasal 330 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Karena perbedaan kategorisasi inilah, definisi anak akan disesuaikan dengan tema/pokok bahasan yang akan dibahas.

Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Grafik 109. Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Secara umum terdapat 35 instansi perangkat daerah yang telah memanfaatkan data terpilah gender dan anak di Kabupaten Lampung Tengah.

1) Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Hal sipil dan kebebasan bagi anak meliputi hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani dan beragama,

hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak akses informasi yang layak serta hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Untuk hak identitas bagi anak di Kabupaten Lampung Tengah disajikan melalui data kepemilikan akta kelahiran pada kategori usia 0-18 tahun (lihat Grafik kepemilikan akta kelahiran di seluruh kecamatan Lampung Tengah berjumlah 816.718 jiwa dengan angka kepemilikan akta kelahiran paling banyak di Kecamatan Terbanggi Besar sebanyak 75.681 orang (lihat Grafik 110). Hal ini dapat dimaklumi karena Kecamatan Terbanggi Besar memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara kecamatan lainnya.

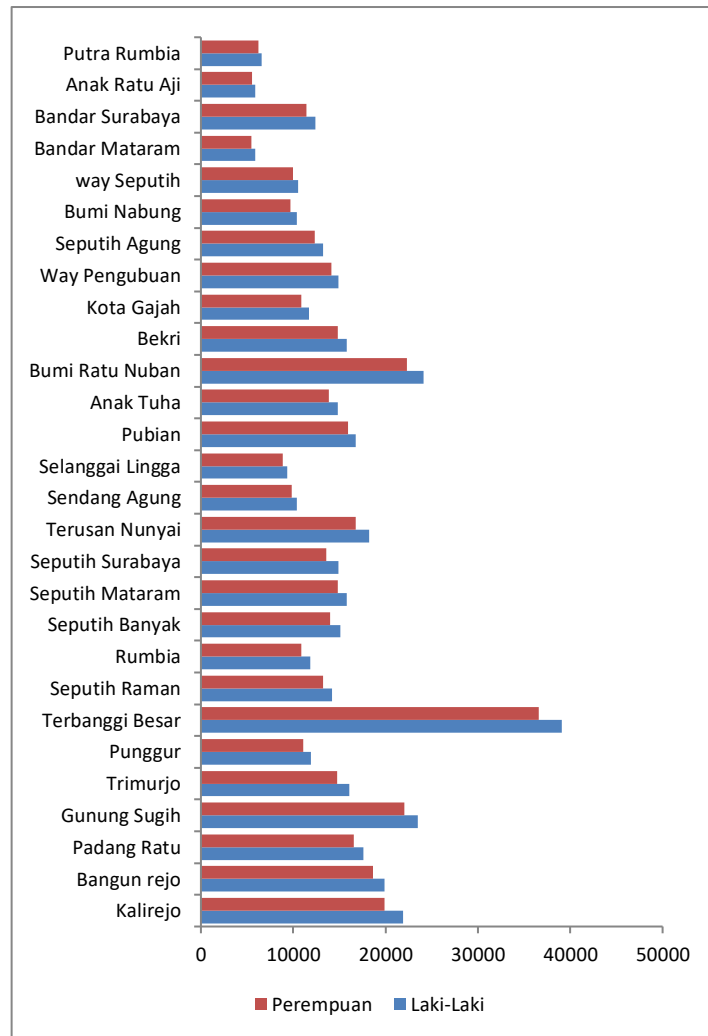
Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Selama ini pembuatan akte kelahiran diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 yang direvisi menjadi UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif penduduk. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akte kelahiran. Pasal-pasal dalam UU tersebut mengatur keharusan setiap warga negara melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi siapa yang melanggar (Iskandar 2014).

Dengan ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. Rendahnya kepemilikan akte menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan (Iskandar 2014).

Ketersediaan data terpilah gender untuk kepemilikan akta kelahiran ini kemudian dapat menghasilkan indeks paristas gender. Secara keseluruhan, rata-rata angka paritas gender kepemilikan akta di Kabupaten Lampung Tengah sebesar **0,93** yang berarti ada kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Untuk angka paritas gender per kecamatan (dapat dilihat pada Grafik 111), kecamatan yang mendekati tidak ada ketimpangan gender (indeks 0,95 – 1,05) hanya Kecamatan Way Pangubuan dengan indeks paritas gender **0,95**.

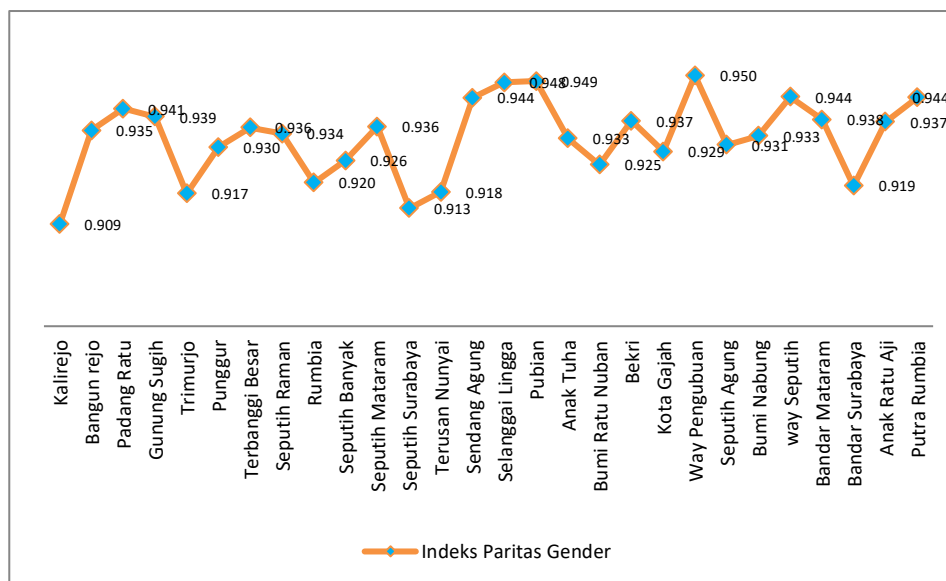
Grafik 110. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

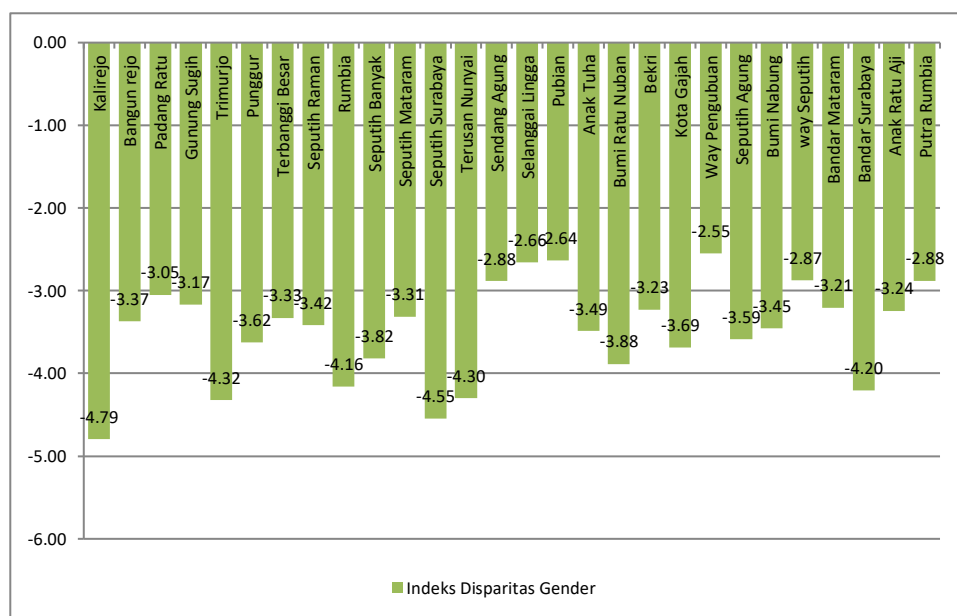
Pada aspek disparitas gender, Grafik 112 menunjukkan bahwa kinerja perempuan di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah bernilai minus dengan kesenjangan rata-rata sebesar **3,09 %**.

Grafik 111. Indeks Paritas Gender Kepemilikan Akta Kelahiran
Penduduk Usia 0-18 Tahun) di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Grafik 112. Indeks Disparitas Gender Kepemilikan Akta Kelahiran
Penduduk Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019

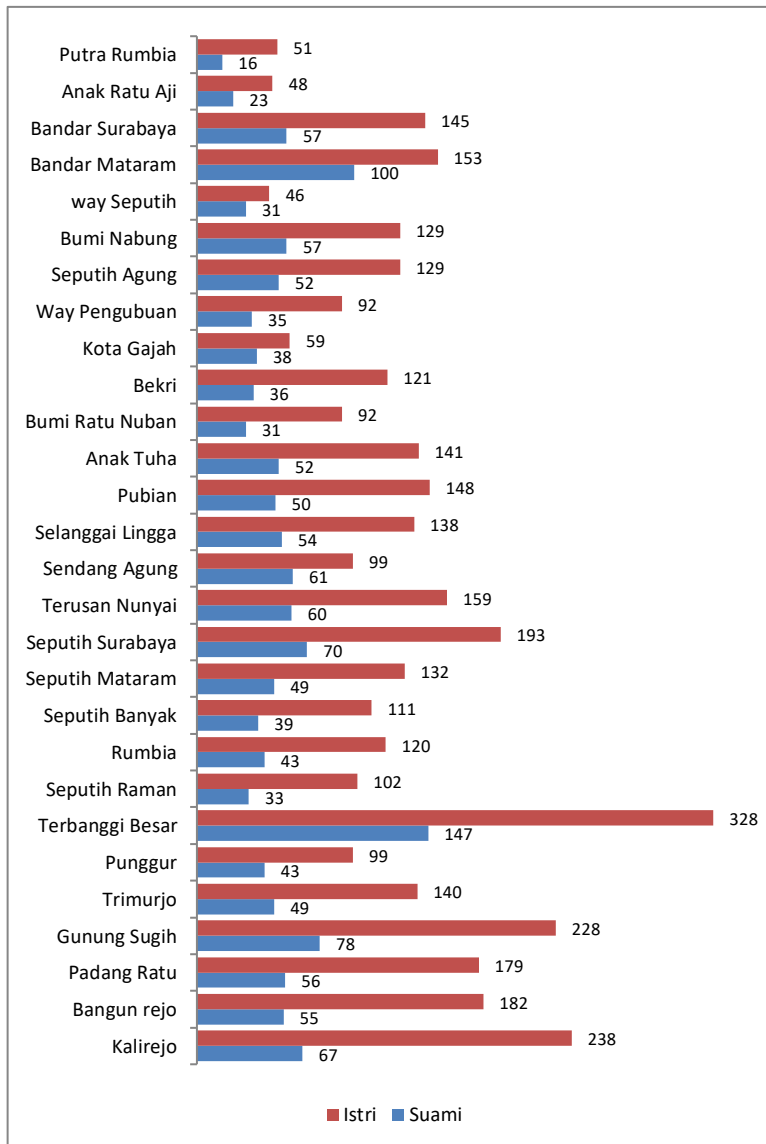


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

2) Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain meliputi perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak.

Grafik 113. Data Pernikahan Pertama Usia ≤ 21 tahun di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019

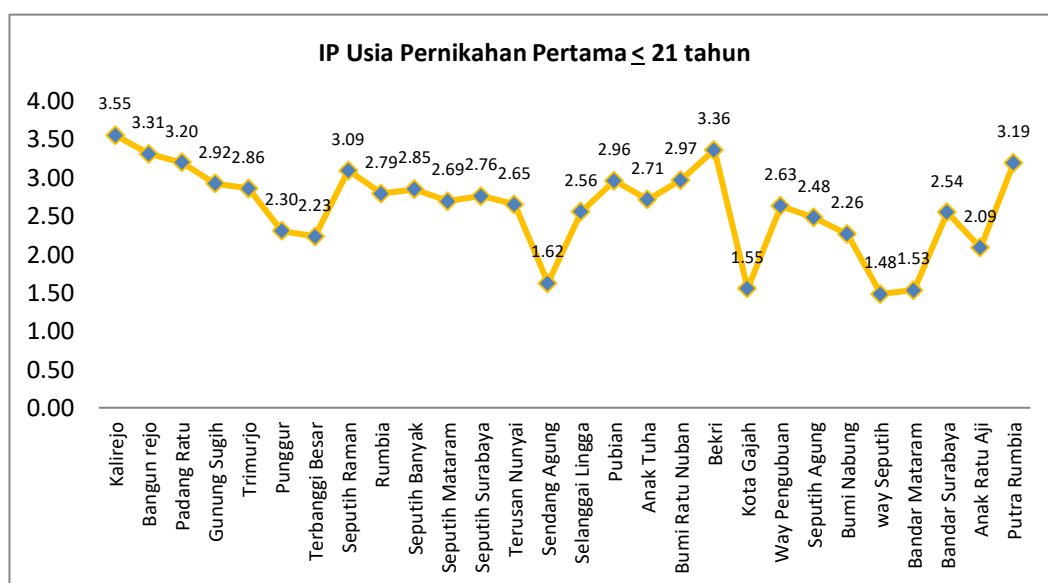


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Isu yang lain pada kluster kesehatan anak dan kesejahteraan adalah pernikahan anak. Menimbang perbedaan batas usia anak dalam hukum Indonesia dan ketersediaan sebaran data, penulis mendefinisikan usia pertama nikah kurang dari sama dengan 21 tahun pada Grafik 113. Berdasarkan data pada Grafik 113, tren pada seluruh kecamatan bahwa perempuan usia ≤ 21 tahun (3.802 orang) lebih banyak dari laki-laki usia ≤ 21 tahun (1.482 orang). Indeks paritas gender **2,57** yang berarti terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Jika disebar secara merata ke 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, maka sebaran indeks paritas gender pada isu ini seperti yang terlihat pada Grafik 114.

Kecamatan dengan indeks paritas gender paling tinggi Kecamatan Kalirejo (3,55 poin), Kecamatan Bekri (3,36 poin), dan Kecamatan Bangun Rejo (3,31). Pada isu ini, tingginya kinerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki tidak berkonotasi positif, sebab menunjukkan bahwa perempuan belum cukup umur (≤ 21 tahun) lebih banyak yang menikah dibandingkan dengan laki-laki yang belum cukup umur (≤ 21 tahun).

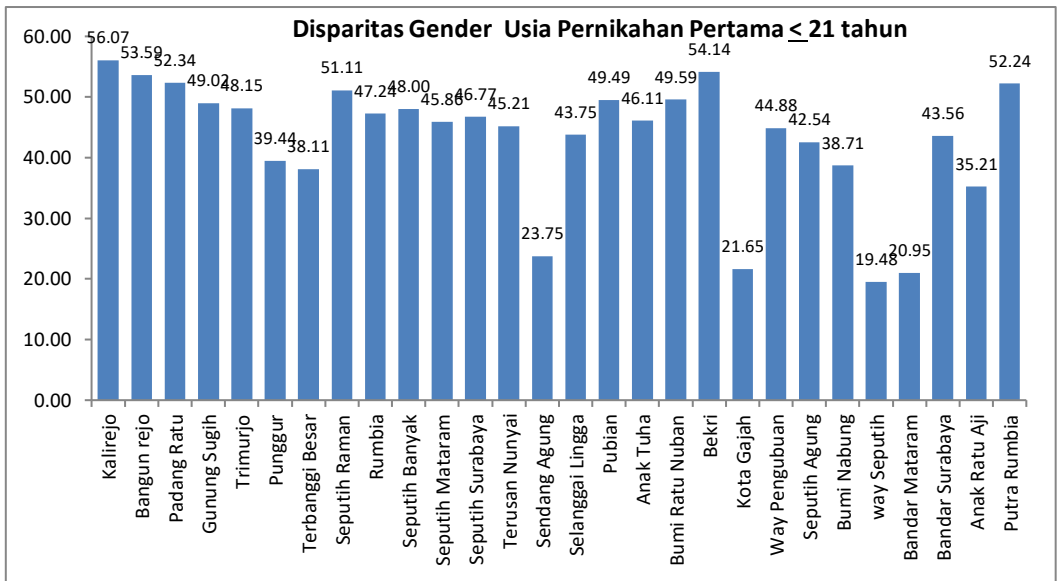
Grafik 114. Indeks Paritas Gender Usia Pernikahan Pertama ≤ 21 tahun di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Sedangkan pada indeks disparitas gender, selisih kinerja antara perempuan dan laki-laki paling tinggi pada Kecamatan Kalirejo (56,07 %), Kecamatan Bekri (54,14 %), dan Kecamatan Bangun Rejo (53,59%). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 115.

Grafik 115. Indeks Disparitas Gender Usia Pernikahan Pertama ≤ 21 tahun di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Meningkatnya jumlah anak telantar di Indonesia berbanding lurus dengan maraknya keberadaan panti asuhan. Kondisi ini menyisakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk mengawasi keberadaan anti asuhan dalam rangka menjamin pemenuhan hak serta menghindari penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan model pengasuhan alternatif bagi anak telantar yang berorientasi pada penguatan ekonomi keluarga miskin agar anak dapat tumbuh bersama keluarganya.

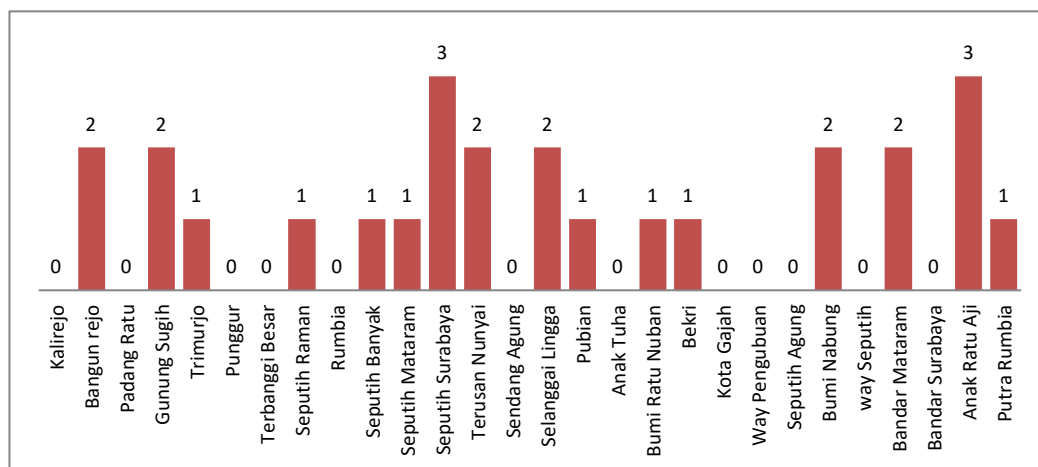
Peranan panti asuhan adalah sebagai bentuk pelayanan residual, atau pelayanan pengganti pengasuhan orang tua. Menurut Soetarso (1993:11 dalam Sudarsana 2018), peranan utama panti sosial adalah sebagai berikut: (1) Memenuhi dan tanggap terhadap kebutuhan dasar anak asuh (panti didirikan untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan mempertahankan keberadaannya), (2) Menyediakan lingkungan belajar yang dapat memberikan sejumlah besar rangsangan bagi anak asuh untuk mengembangkan minatnya belajar sendiri secara spontan, (3) Menyadarkan masyarakat akan besaran, kompleksitas, kebutuhan dan permasalahan anak terlantar, melalui informasi/penyuluhan sosial terprogram, konsisten dan sinambung, (4) Menerima, menampung, mengembangkan, menyalurkan uluran tangan masyarakat berupa keahlian, kesempatan, fasilitas dan dana, (5) Menjadi tempat belajar bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin mempelajari dan membantu penanggulangan anak terlantar, (6) Menjangkau sejumlah besar anak terlantar, di dalam maupun di luar panti, berdasarkan program yang tepat. Namun Pujiyanto (2015)

menunjukkan dari perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam bahwa pengasuhan yang terbaik anak terdapat pada orang tua. Panti asuhan adalah alternatif terakhir untuk pengasuhan anak.

Teja (2014) menyikapi masih terjadinya kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di panti asuhan anak, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah taktis. Pertama, perlu menginventarisasi seluruh panti asuh anak yang ada di Indonesia, terutama yang dikelola secara swadaya oleh lembaga masyarakat. Data panti asuhan anak yang diperoleh merupakan dasar bagi proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, pemerintah, melalui dinas sosial, perlu meningkatkan pengawasan terhadap panti asuhan anak. Pelanggaran terhadap panti asuhan yang tidak dapat memenuhi standar nasional pengasuhan yang telah ditetapkan pemerintah perlu mendapatkan sanksi tegas. Ketiga, perlu menegatkan proses perizinan pendirian panti asuhan anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah marak berdirinya panti asuhan anak yang tidak memenuhi syarat. Keempat, perlu membina tenaga pendamping/pengasuh dan pengelola panti asuhan anak agar mampu menjalankan panti dengan lebih baik melalui program pelatihan psikologis pengasuhan anak atau bahkan pelatihan pengelolaan manajemen keuangan panti asuhan.

Pola atau model pengasuhan yang berbasis keluarga diharapkan menjadi fokus utama dalam pemenuhan hak anak untuk berada dan tumbuh di lingkungan asli mereka. Pada kenyataannya, beberapa kasus anak dalam panti asuhan disebabkan persoalan perekonomian keluarga dapat mendorong orang tua memasukkan anak mereka ke panti asuhan. Pemerintah atau pihak pengelola panti asuhan anak kiranya dapat mengembangkan pendekatan berbasis penguatan keluarga dalam mengatasi permasalahan anak telantar selain cara konvensional dengan mendirikan panti asuhan anak.

Grafik 116. Sebaran Panti Asuhan Anak Per-Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



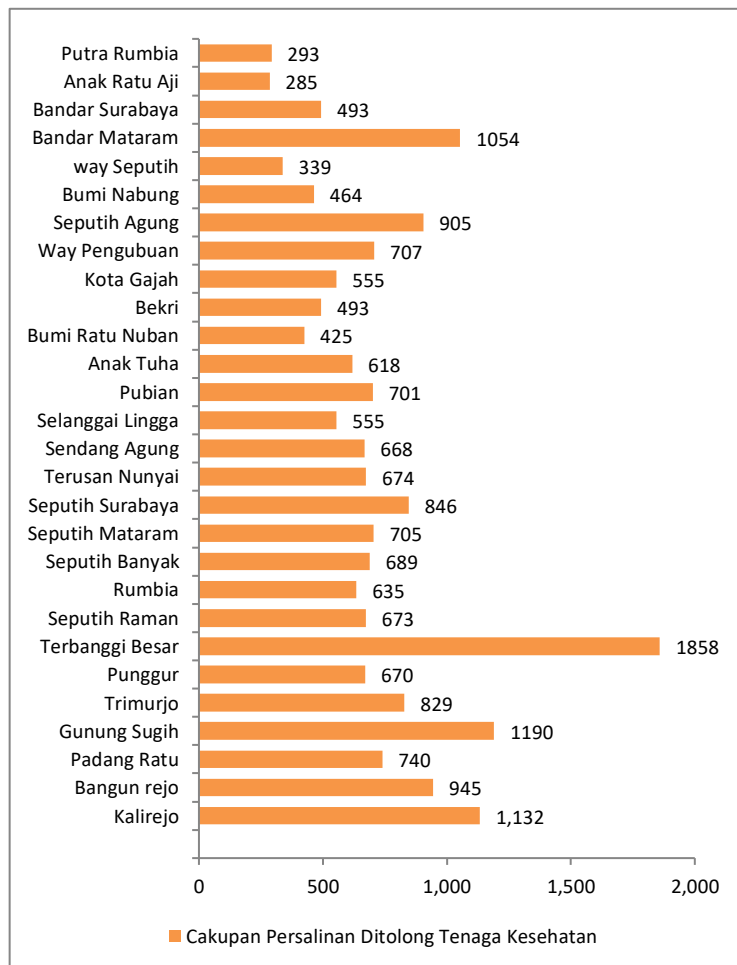
Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data terdapat 26 panti asuhan yang tersebar di sebagian besar wilayah, meski tidak semua Kecamatan memilikinya. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 116.

3) Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Isu pada kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak antara lain: persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, prevalensi status gizi balita, cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak, rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dan ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

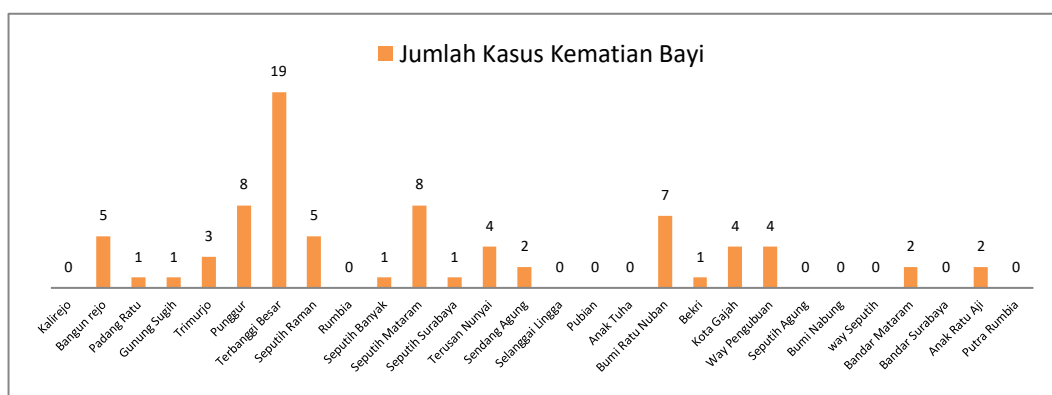
Grafik 117. Data Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Secara umum angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi, kematian neonatal 50% terjadi pada bayi berat lahir rendah (BBLR) dan lebih dari 50% kematian bayi adalah kematian neonatal dini (Abdullah et al 2012). Karakteristik demografi ibu yang disertai pula kondisi ibu saat hamil yang diduga memang memiliki risiko terhadap kematian bayi. 2. Kebanyakan kematian bayi lahir prematur. Kelahiran prematur tersebut karena aktivitas ibu yang berat saat hamil, nutrisi kurang, ibu mengkonsumsi obat, kandungan lemah, hamil kembar, dan informasi yang didapat saat pelayanan antenatal yang diberikan oleh tenaga kesehatan (bidan dan dokter) tidak jelas dan kurang lengkap. Disisi lain umur ibu, paritas dan jarak juga berisiko untuk melahirkan bayi prematur (Wandira dan Indawati 2012:40).

Grafik 118. Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



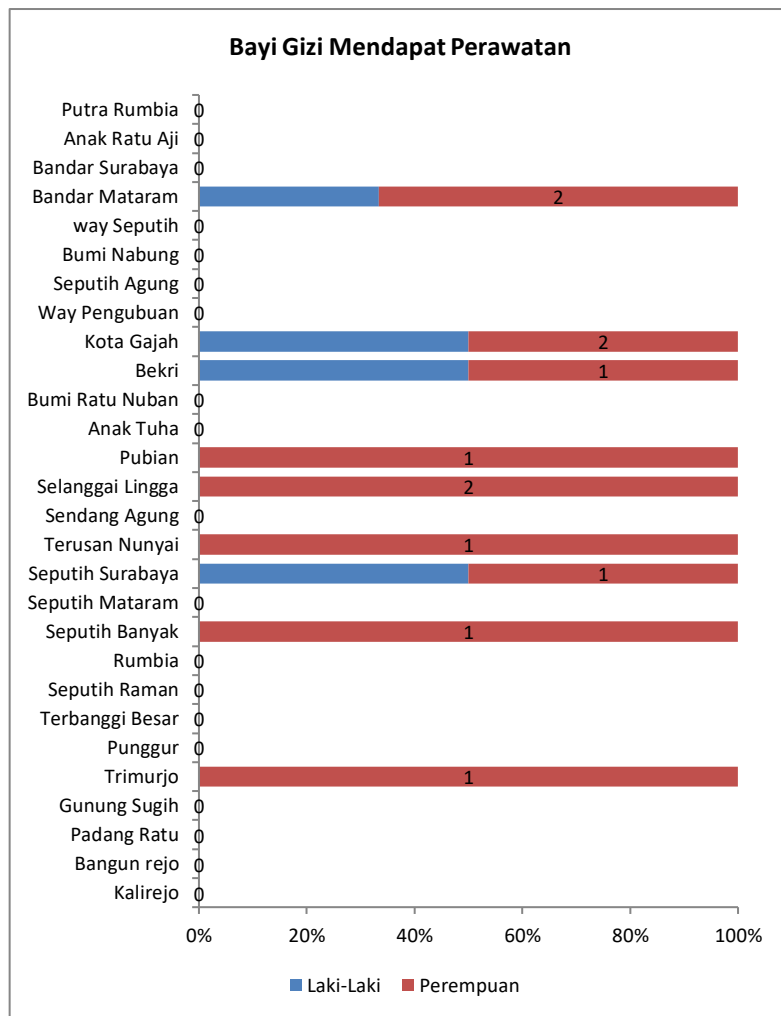
Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Berbanding lurus dengan jumlah penduduk, jumlah kehamilan maka wajar kita Kecamatan Terbanggi Besar menduduki peringkat pertama angka kematian bayi (sebanyak 19 orang), disusul kemudian oleh Kecamatan Seputih Mataram dan Kecamatan Punggur. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 118.

Data tahun 2019 menunjukkan angka gizi buruk di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 17 belas kasus. Kasus ini hanya ada di beberapa kecamatan saja yaitu dua kasus di Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Kota Gajah dan Kecamatan Selenggara Lingga, dan masing-masing satu kasus di Kecamatan Bekri, Kecamatan Pubian, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Trimurjo.

Adapun jika dilihat dalam perspektif gender, indeks paritas antara bayi perempuan dan bayi laki-laki yaitu **2,4** yang berarti terdapat kesenjangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dimana kinerja perempuan pada isu ini lebih tinggi dari pada laki-laki. Dalam aspek disparitas gender terjadi kesenjangan kinerja sebesar **41,18 %** di mana kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Grafik 119. Kasus Bayi Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Selain kematian bayi, isu yang juga penting pada kluster ini adalah status gizi pada bayi. Isu pada status gizi anak adalah gizi buruk. Gizi buruk (*severe malnutrition*) adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Beberapa penelitian menjelaskan, dampak jangka pendek gizi buruk terhadap perkembangan anak adalah anak menjadi apatis, mengalami gangguan bicara dan gangguan perkembangan yang lain. Sedangkan dampak jangka panjang adalah penurunan skor tes IQ, penurunan perkembangan kognitif, penurunan integrasi sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa percaya diri dan tentu saja merosotnya prestasi akademik di sekolah. Kurang gizi berpotensi menjadi penyebab kemiskinan melalui rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Tidak heran jika gizi buruk yang tidak dikelola

dengan baik, pada fase akutnya akan mengancam jiwa dan pada jangka panjang akan menjadi ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa (Nency 2005).

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan anak? Hasil penelitian Rahmariza et al (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemenuhan hak kesehatan anak berdasarkan karakteristik keluarga, karakteristik anak, pengetahuan gizi ibu, dan status gizi. Berdasarkan analisis regresi berganda yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak kesehatan anak adalah pendidikan ibu. Status gizi tidak dipengaruhi oleh pemenuhan hak kesehatan anak.

4) Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

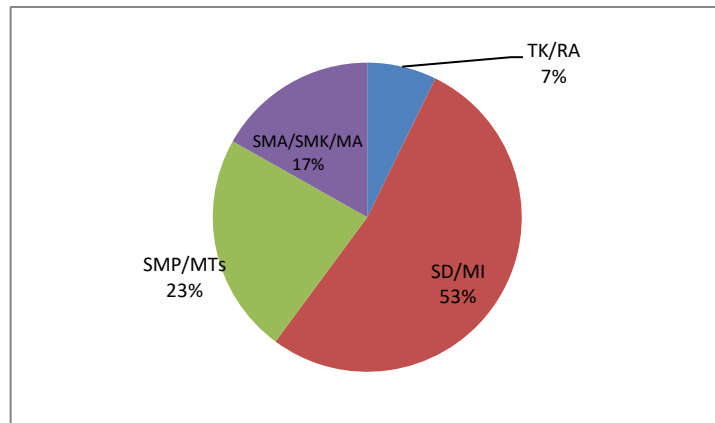
Pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini dapat diwujudkan melalui pendidikan pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI), wajib belajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak (SRA), serta tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang terus diupayakan oleh pemerintah demi memperbaiki mutu masyarakat Indonesia. Namun realitanya, masyarakat sendiri tidak sepenuhnya mendukung dalam mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan (Qomar 2012 dalam Rahmatin dan Soejoto 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai kendala dalam upaya peningkatan mutu pendidikan salah satunya karena rendahnya peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. Salah satu komponen dari tiga belas faktor yang menjadi kendala peningkatan mutu pendidikan menurut Fattah (2006 dalam Rahmatin dan Soejoto 2017) yakni masalah sosio-ekonomi masyarakat.

Rahmatin dan Soejoto (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan, tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan, serta ada pula pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah. Peningkatan kemiskinan diikuti oleh penurunan APS dan sebaliknya. Begitu pula kenaikan jumlah sekolah akan diikuti oleh penurunan APS. Meskipun jumlah sekolah lebih dominan, tetapi terdapat pengaruh kebijakan pemerintah yang mendominasi perubahan jumlah sekolah. Penurunan jumlah sekolah sebagai keputusan pemerintah dalam mengembalikan kestabilan angka APS, artinya selama APS belum meningkat maka beberapa sekolah perlu ditutup untuk memudahkan fokus pemerintah pada peningkatan APS.

Untuk konteks Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan terdapat 267.064 anak di Kabupaten Lampung Tengah yang sedang mengenyam pendidikan wajib 12 tahun, yang tersebar pada jenjang TK/RA sebanyak 19.411 anak (7 %), jenjang SD/MI sebanyak 141.147 anak (53%), jenjang SMP/MTs 61.569 anak (23 %) dan jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 44.937 anak (17 %). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 8.

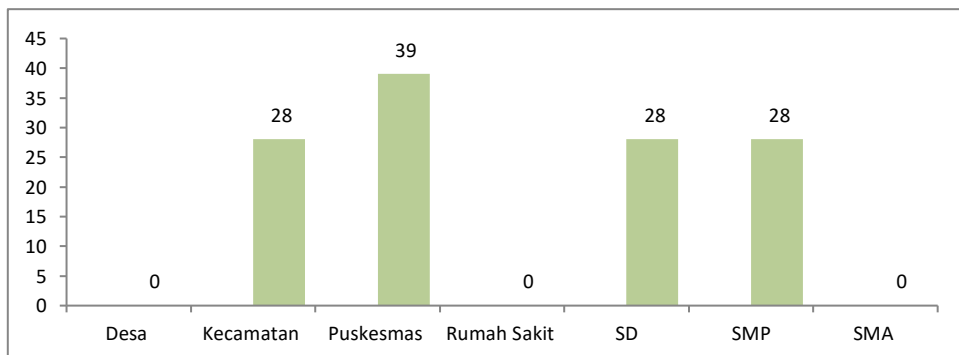
Gambar 8. Data Murid pada Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Meski belum berstatus sebagai Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak (KLA), misalnya telah terdapat 28 Kecamatan Layak Anak, 39 Puskesmas Layak Anak, 28 Sekolah Dasar Layak Anak, dan 28 Sekolah Menengah Pertama Layak Anak (lihat Grafik 120).

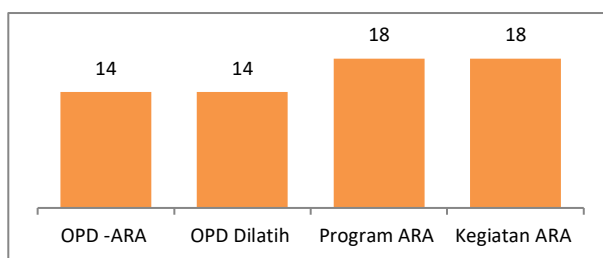
Grafik 120. Instansi Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Isu yang cukup menarik pada ranah kebijakan layak/ramah anak adalah dukungan berupa anggaran dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2019 telah ada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerapkan anggaran ramah anak (ARA). Selain itu, terdapat 14 OPD yang telah menjalani pelatihan bagaimana menyusun anggaran ramah anak, terdapat 18 program ramah anak dan 18 kegiatan ramah anak (lihat Grafik 121).

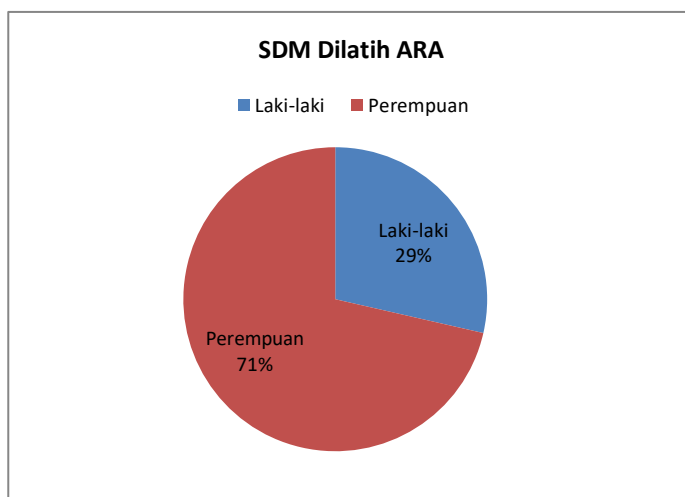
Grafik 121. Anggaran Ramah Anak
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Dari 14 staf yang telah mengikuti pelatihan Anggaran Ramah Anak (ARA), sebanyak empat orang laki-laki (29%) dan 14 orang perempuan (71%). Dari data tersebut indeks paritas sebesar **2,5** poin di mana terdapat kesenjangan, yaitu kinerja perempuan lebih tinggi dari kinerja laki-laki. Pada aspek disparitas gender kesenjangan dimana kinerja perempuan lebih **42,86 %** dibandingkan dengan kinerja laki-laki. (lihat gambar 9).

Gambar 9. SDM yang Dilatih Anggaran Ramah Anak (ARA)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

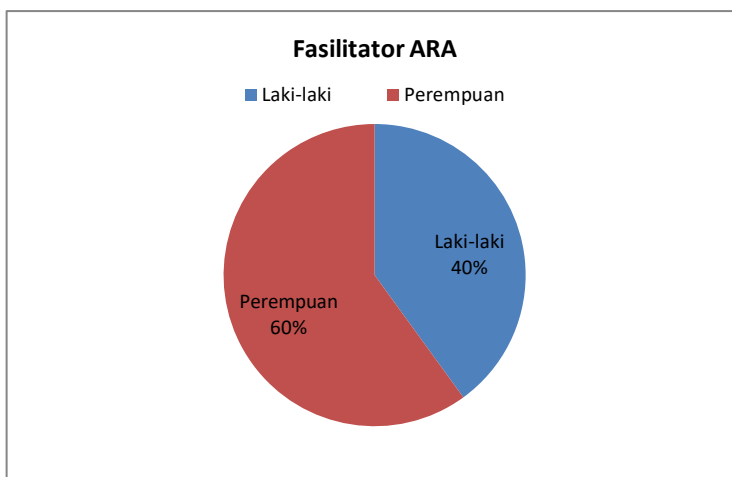


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Selain SDM yang telah dilatih ARA, terdapat juga fasilitator ARA di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data tahun 2019 Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki 5 fasilitator dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak dua orang (40%) dan perempuan sebanyak 3 orang (60%) (lihat Gambar 10). Dari data tersebut indeks paritas gender sebesar **1,5** dimana terjadi kesenjangan gender

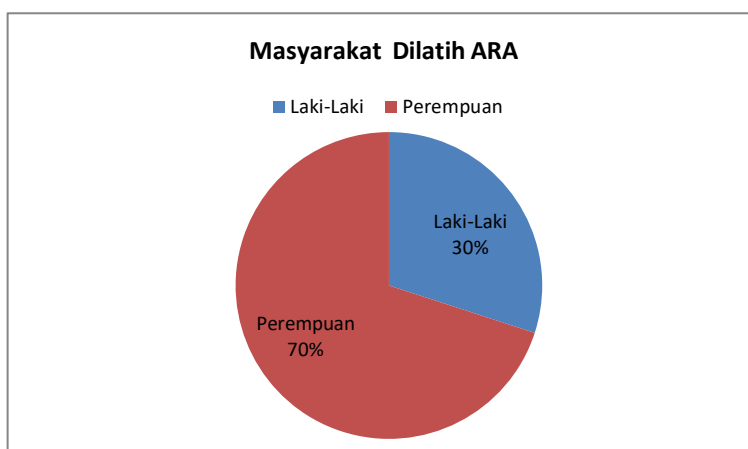
dengan kinerja perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan pada aspek disparitas gender tercipta kesenjangan kinerja sebesar **20 %**.

Gambar 10. Fasilitator Anggaran Ramah Anak (ARA)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Gambar 11. Masyarakat yang Dilatih Anggaran Ramah Anak (ARA)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

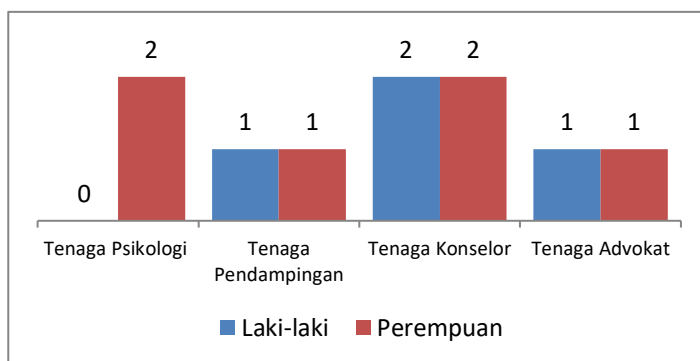


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Tidak hanya staf pemerintahan, namun masyarakat juga dilatih anggaran ramah anak (ARA). Secara keseluruhan terdapat 500 orang yang telah dilatih pada tahun 2019, dengan komposisi laki-laki 30 % (150 orang) dan perempuan 70 % (350 orang) (lihat Grafik 11). Pada aspek paritas gender, terdapat kesenjangan dengan kinerja perempuan **2,33** lebih besar dari kinerja laki-laki. Dari aspek disparitas gender, perbedaan kinerja sebesar **40 %**.

Selain pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam perspektif ARA, terbentuk pula 28 satgas perlindungan anak berbasis kecamatan dan 28 satgas perlindungan anak berbasis kelurahan. Pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat 10 SDM yang menjadi tenaga PPT/P2TP2A. Adapun komposisinya antara lain tenaga psikologi 2 orang, tenaga pendamping 2 orang, tenaga koselor 4 orang, dan tenaga advokat 2 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 112.

Grafik 122. Tenaga PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

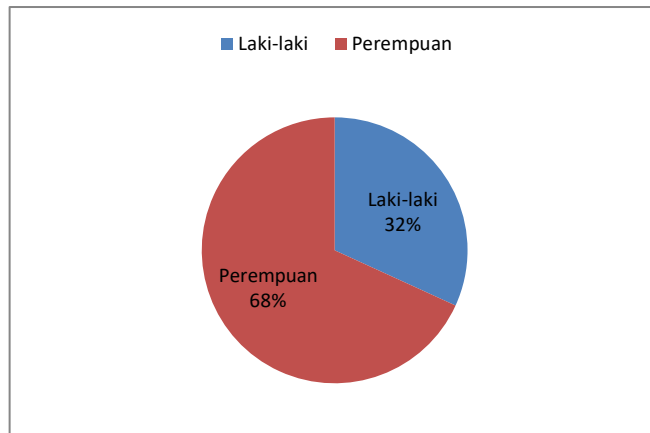


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Secara umum, indeks paritas pada tenaga PPT/P2TP2A sebesar **1,5** dengan demikian terdapat kesenjangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan lebih tinggi dengan dari laki-laki. Adapun indeks disparitas gender sebesar **20 %**.

Di antara dukungan pemerintah adalah disediakannya motor keliling (torlin) sebanyak 2 buah dan mobil keliling (molin) 1 buah yang digunakan untuk media penyuluhan dan sosialisasi. Adapun dengan molin dan torlin ini telah terseleggara kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sebanyak 7 kali. Dengan sarana molin dan torlin ini terungkap pengakuan korban sebanyak 22 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 7 orang (32 %) dan korban perempuan sebanyak 15 orang (68 %) (lihat Gambar 12).

Gambar 12. Pengakuan Korban berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

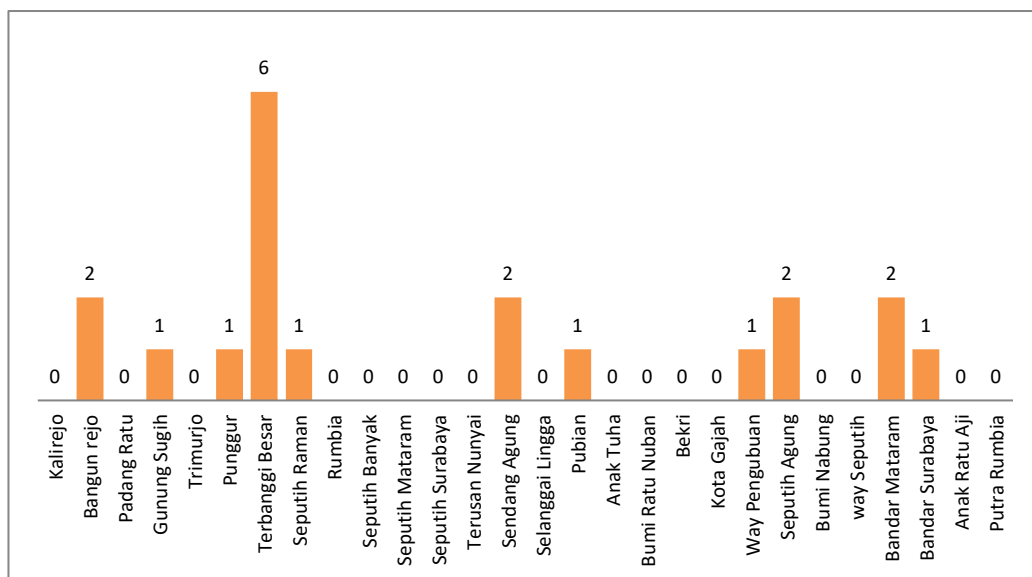
Aspek paritas gender pada data pengakuan korban melalui sarana torlin dan molin menunjukkan angka paritas gender sebesar **1,24** dengan arti terdapat kesenjangan kinerja dimana kinerja perempuan lebih besar dari laki-laki. Sedangkan disparitas gender sebesar **36 %**.

5) Kluster Perlindungan Khusus

Pada kluster perlindungan khusus ini, beberapa hak-hak anak antara lain perlindungan pada anak korban kekerasan dan penelantaran, perlindungan pada anak untuk dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA), perlindungan anak dari pornografi, NAPZA dan infeksi HIV/AIDS, perlindungan pada anak korban bencana dan konflik, pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi, hak anak korban jaringan terorisme, hak perlindungan pada anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersefat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002). Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak (Rumtianing, 2013). Tomlinson dkk (2017) mengatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah-menengah, anak-anak rentan mengalami kekerasan. Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan.

Grafik 123. Anak yang Menjadi Korban Kekerasan atau Diperlakukan Salah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah



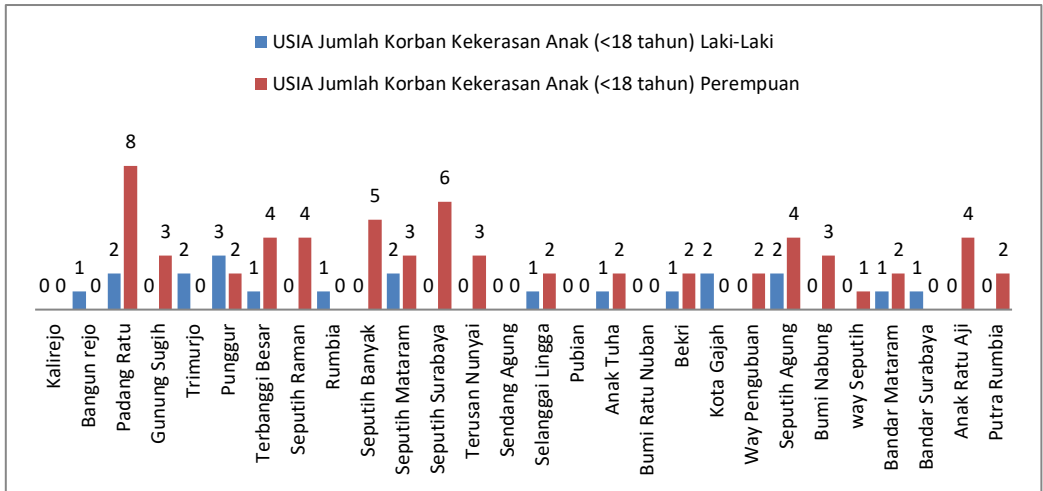
Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Anak menjadi korban kekerasan dalam sajian data ‘hanya’ berjumlah 20 orang, namun seperti fenomena kejahatan yang sifatnya domestik dan diperlakukan secara permisif, angka kekerasan yang sesungguhnya bisa diduga lebih dari yang terdata secara resmi. Kecamatan Terbanggi Besar berada pada posisi nomor satu dengan angka kekerasan terhadap anak sebanyak 8, kemudian Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, dan Kecamatan Bandar Mataram masing-masing sebanyak 2 orang. Enam kecamatan lain dengan angka korban satu orang yaitu Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Pubian, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Bandar Surabaya (lihat Grafik 123).

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain: 1) tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak; 2) hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat; dan 3) kemiskinan. Untuk mengatasi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, maka instansi pemerintahan terkait dan lembaga-lembaga pemerhati anak dan perempuan dapat berkolaborasi merumuskan program atau kegiatan yang dapat meminimalisir faktor-faktor kekerasan terhadap anak.

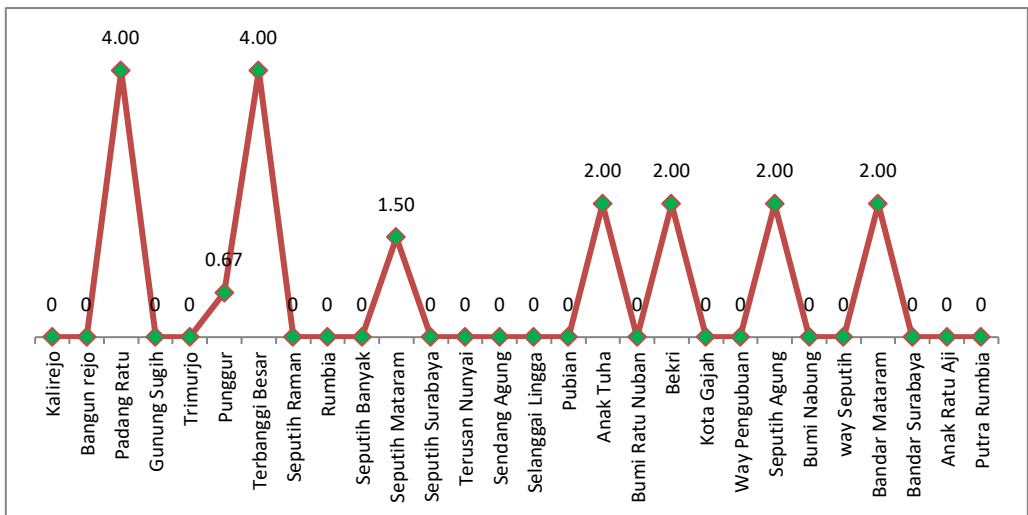
Data berikut memperlihatkan lebih rinci korban-korban kekerasan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Usia korban kekerasan kurang dari 18 tahun paling banyak di Kecamatan Padang Ratu sebanyak 10 orang, Kecamatan Seputih Surabaya sebanyak 6 orang, dan Kecamatan Seputih Banyak sebanyak 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 124.

Grafik 124. Usia Korban Kekerasan < 18 Tahun
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



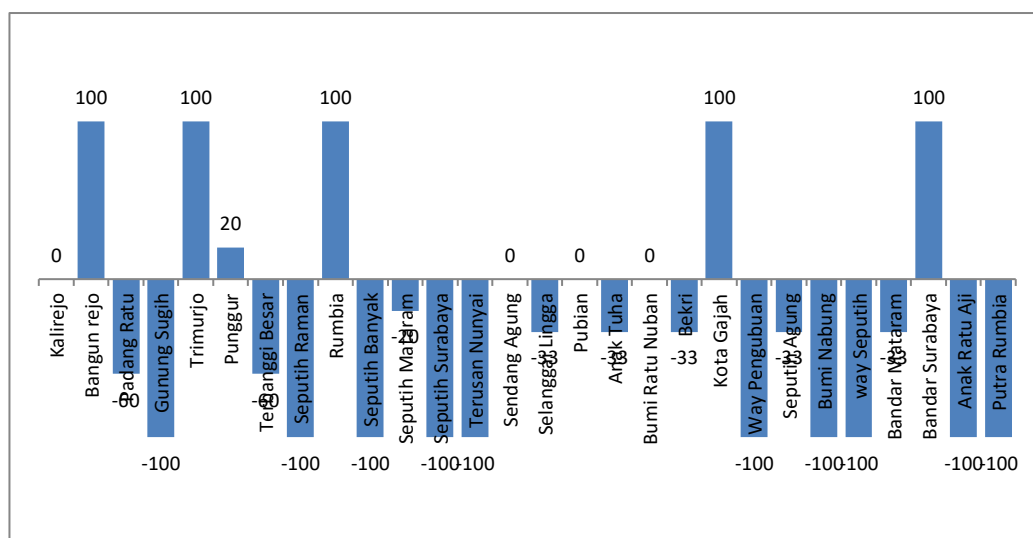
Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grafik 125. Indeks Paritas Korban Kekerasan < 18 Tahun
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

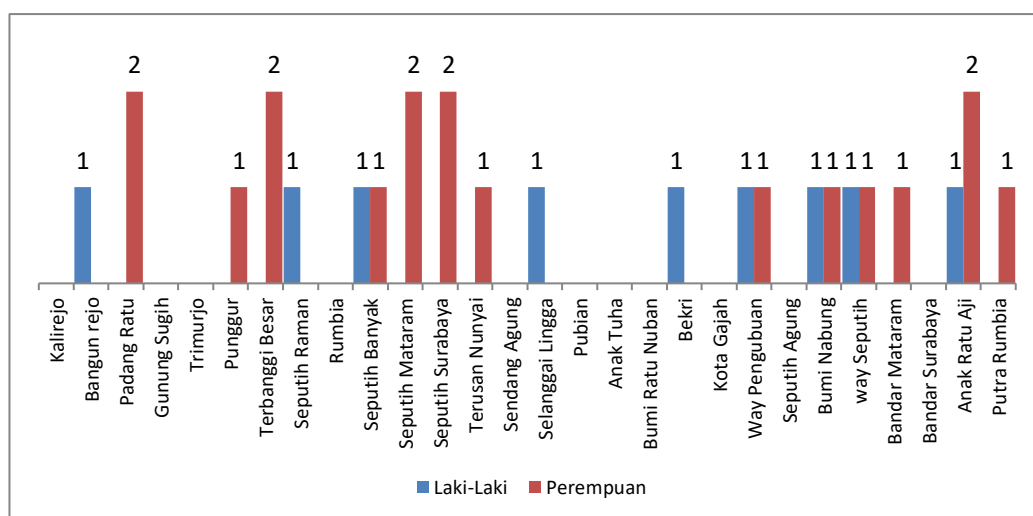
Grafik 126. Indeks Disparitas Gender Korban Kekerasan < 18 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Indeks paritas gender secara umum pada kasus korban kekerasan dengan usia di bawah 18 tahun adalah **2,95** dimana terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki dan aspek disparitas gender **49,40 %**. Untuk data per kecamatan dapat dilihat pada Grafik 125 dan Grafik 126.

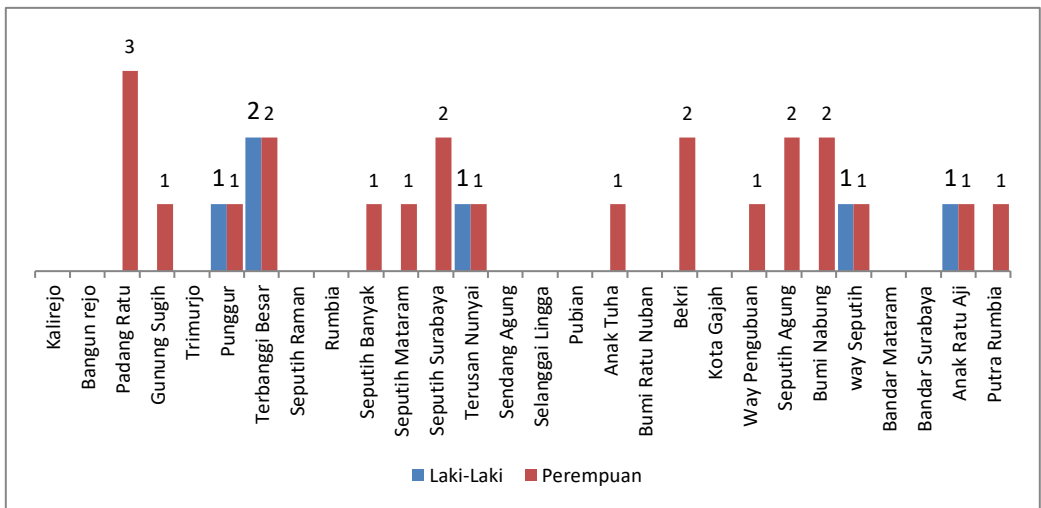
Grafik 127. Tingkat Pendidikan Korban Kekerasan (SD) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Tingkat pendidikan korban kekerasan (Sekolah Dasar) paling banyak terjadi pada kasus kekerasan di Kecamatan Terbanggi Besar (3 orang) dan Kecamatan Anak Ratu Aji (3 orang). Selengkapnya lihat pada Grafik 127. Dalam konteks tingkat kabupaten, indeks paritas gender pada isu korban berpendidikan Sekolah Dasar adalah **2** dimana terdapat kesenjangan gender kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki, dan indeks disparitas gender sebesar **33,33 %**.

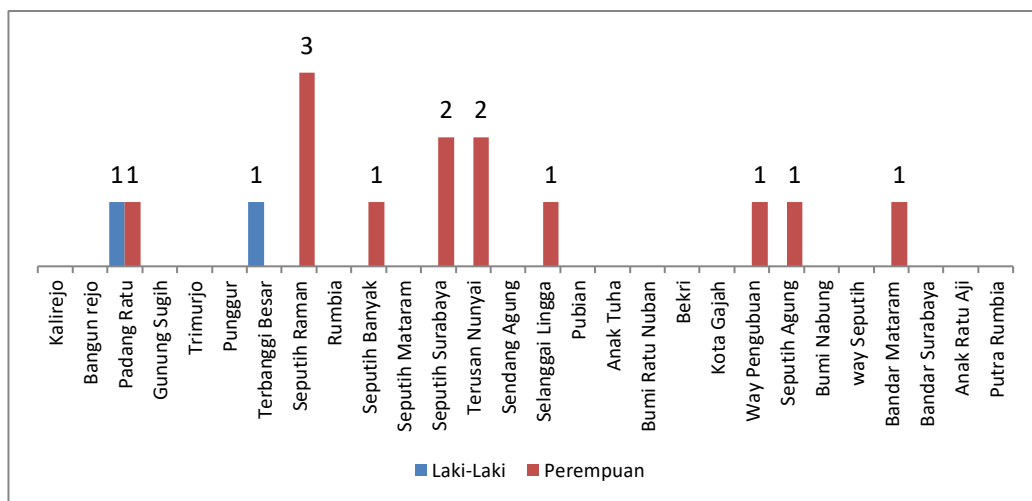
Grafik 128. Tingkat Pendidikan Korban Kekerasan (SMP)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Pada tingkat pendidikan korban kekerasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling banyak terjadi pada kasus kekerasan di Kecamatan Terbanggi Besar (4 orang) dan Kecamatan Padang Ratu (3 orang). Selengkapnya lihat pada Grafik 128. Dalam konteks tingkat kabupaten, indeks paritas gender pada isu korban berpendidikan SMP adalah **3,83** dimana terdapat kesenjangan gender kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki, dan indeks disparitas gender sebesar **56,62 %**.

Grafik 129. Tingkat Pendidikan Korban Kekerasan (SMA)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Pada tingkat pendidikan korban kekerasan Sekolah Menengah Pertama (SMA) paling banyak terjadi pada kasus kekerasan di Kecamatan Seputih Raman (3 orang) dan Kecamatan Seputih Surabaya dan Terusan Nunyai masing-masing 2 orang. Selengkapnya lihat pada Grafik 129. Dalam konteks tingkat kabupaten, indeks paritas gender pada isu korban berpendidikan SMA adalah **6,50** dimana terdapat kesenjangan gender kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki, dan indeks disparitas gender sebesar **73,33 %**.

Status “anak” dan “perempuan” merupakan status rentan di Kabupaten Lampung Tengah. Data yang tersaji pada beberapa Grafik 127, 128, dan 129 menunjukkan anak perempuan merupakan korban kekerasan yang sering muncul di berbagai kecamatan. Indeks paritas gender secara umum pada kasus korban kekerasan dengan usia di bawah 18 tahun adalah **2,95** dimana terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki dan aspek disparitas gender **49,40 %**. Untuk data per kecamatan dapat dilihat pada Grafik 129.

Bagaimana solusi atau penanganan terhadap fenomena kekerasan terhadap anak – perempuan ini? Dalam penelitiannya Pabalbessy (2010) mengungkapkan solusi terhadap penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan mesti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training).
- Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional;

- c) Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
- d) Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis dan didukung oleh karingan yang mantap;
- f) Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anakanak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM;
- g) Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h) Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan negara;
- i) Membentuk lembaga penyalut korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis;
- j) Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak..

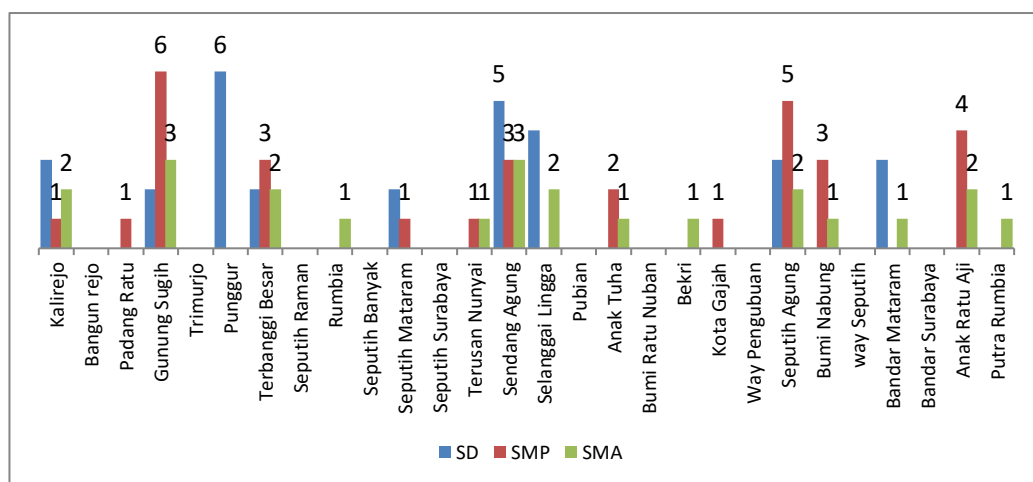
**

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya (Sumara et al 2017). Kenakalan remaja merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial. Menurut Paul Moedikdo,SH kenakalan remaja adalah : 1. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. 2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. 3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Kekerasan yang dilakukan oleh anak juga merupakan kategorisasi dari kenakalan remaja. Di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019, tercatat 84 pelaku kekerasan anak, dengan status pelaku merupakan pelajar. Grafik 130 menunjukkan pelaku kekerasan dengan pendidikan SD 30 orang, pendidikan SMP sebanyak 31 orang dan tingkat SMA sebanyak 23 orang.

Mengapa anak-anak bisa menjadi pelaku kekerasan? Salah satunya dikemukakan oleh Nindya dan Margaretha (2012) yang menemukan bahwa adanya hubungan antara kekerasan emosional dalam keluarga dan kecenderungan kenakalan remaja. Meski nilai korelasi antara variabel kekerasan emosional dan kenakalan remaja ini lemah, kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang perlu digali.

Grafik 130. Tingkat Pendidikan Pelaku Kekerasan (SD, SMP, SMA) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

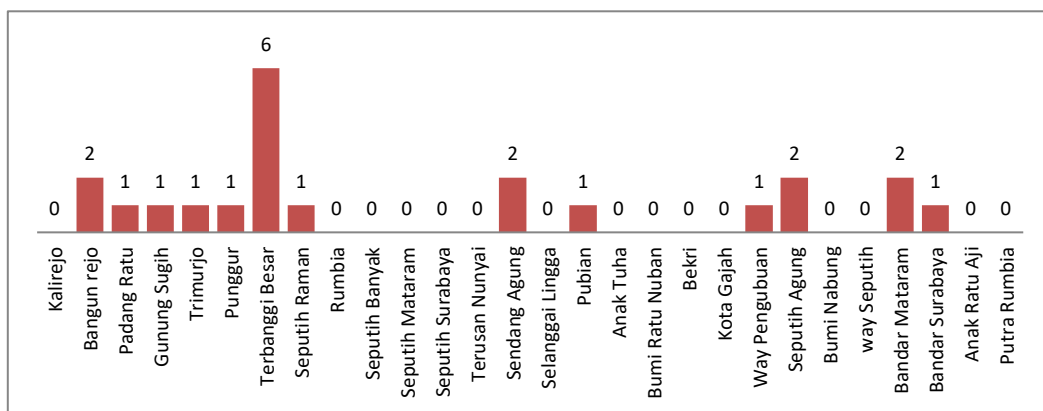
Dalam mengatasi kenakalan remaja yang paling dominan adalah dari keluarga merupakan lingkungan yang paling pertama ditemui seorang anak. Di dalam menghadapi kenakalan anak pihak orang tua kehendaknya dapat mengambil dua sikap bicara yaitu: 1. Sikap/cara yang bersifat preventif yaitu perbuatan/tindakan orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk menjauhkan si anak daripada perbuatan buruk atau dari lingkungan pergaulan yang buruk. Dalam hat sikap yang bersifat preventif, pihak orang tua dapat memberikan/mengadakan tindakan sebagai berikut : a) menanamkan rasa disiplin dari ayah terhadap anak. b) memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak oleh ibu. c) pencurahan kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anak. d) menjaga agar tetap terdapat suatu hubungan yang bersifat intim dalam satu ikatan keluarga.

Disamping keempat hal yang diatas maka hendaknya diadakan pula: a) Pendidikan agama untuk meletakkan dasar moral yang baik dan berguna. b) Penyaluran bakat si anak ke arab pekerjaan yang berguna dan produktif. c) Rekreasi yang sehat sesuai dengan kebutuhan jiwa anak. d) Pengawasan atas lingkungan pergaulan anak sebaik-baiknya. 2. Sikap/cara yang bersifat represif Yaitu pihak orang tua hendaknya ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kenakalan anak seperti menjadi anggota badan kesejahteraan keluarga dan anak, ikut serta dalam diskusi yang khusus mengenai masalah kesejahteraan anak-anak. Selain itu pihak orang tua terhadap anak yang bersangkutan dalam perkara kenakalan hendaknya mengambil sikap sebagai berikut: a) Mengadakan introspeksi sepenuhnya akan kealpaan yang telah diperbuatnya sehingga menyebabkan anak terjerumus dalam kenakalan. b) Memahami sepenuhnya akan latar belakang daripada masalah kenakalan yang menimpa anaknya. c) Meminta bantuan para ahli (psikolog atau petugas sosial) di dalam mengawasi perkembangan kehidupan anak, apabila dipandang perlu d) Membuat catatan perkembangan pribadi anak sehari-hari.

Menurut Wahyudi (2015) anak selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak ada kalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak. Penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan sejak adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selain kekerasan terhadap anak, pelantaran anak, isu yang cukup penting dibahas adalah isu anak berhadapan dengan hukum (ABH). Secara umum data menunjukkan 22 orang anak berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2019. Angka tertinggi adalah di Kecamatan Terbanggi Besar sebanyak 6 orang, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, dan Kecamatan Bandar Mataram masing-masing dua kasus. Selebihnya beberapa kecamatan hanya terdapat satu kasus atau tidak ada sama sekali (selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 131). Seperti juga angka kekerasan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum ini juga merupakan fenomena gunung es. Bahwa kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak masuk ke ranah hukum karena tidak dilaporkan atau terjadi diskresi dalam penanganannya, menjadi salah satu penyebab statistik ini masih memiliki peluang *dark number* yang cukup besar.

Grafik 131. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Per-Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

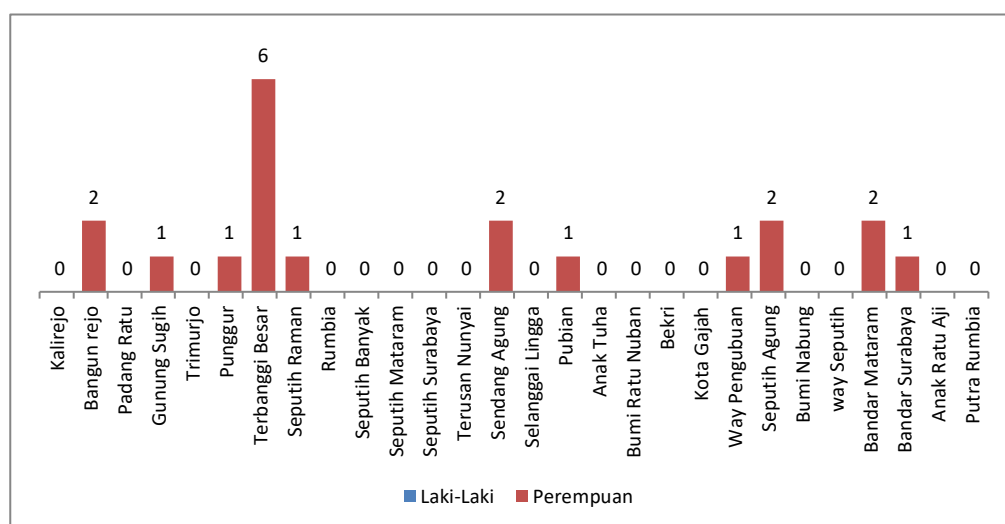


Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Apa penyebab anak berhadapan dengan hukum? Hasil penelitian Astuti (2011) menunjukkan bahwa anak berhadapan dalam asuhan ibu/bapak tiri, nenek, atau paman. Disamping itu keluarga tersebut kebanyakan berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Anak menjadi nakal atau berhadapan dengan hukum karena pengasuhan dalam keluarga yang diterima anak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuh yang baik. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar lembaga yang terlibat dalam penanganan anak nakal yang berhadapan dengan hukum menjadikan keluarga sebagai sasaran intervensi melalui bimbingan pengasuhan anak (*parenting skill*).

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat berujung pada proses peradilan/litigasi. Menurut Pangalila (2018) proses litigasi atau peradilan anak secara khusus sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam proses litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Itulah sebabnya walaupun status anak sebagai tersangka tidak boleh dikurangi hak-hak anak tersebut. Sistem peradilan tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap kejiwaan dari pada si anak, itulah sebabnya dalam peradilan anak harus juga menghormati hak-hak anak termasuk hak untuk bermain serta tumbuh dan berkembang dan hak untuk belajar.

Grafik 132. Perlindungan Khusus Per-Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

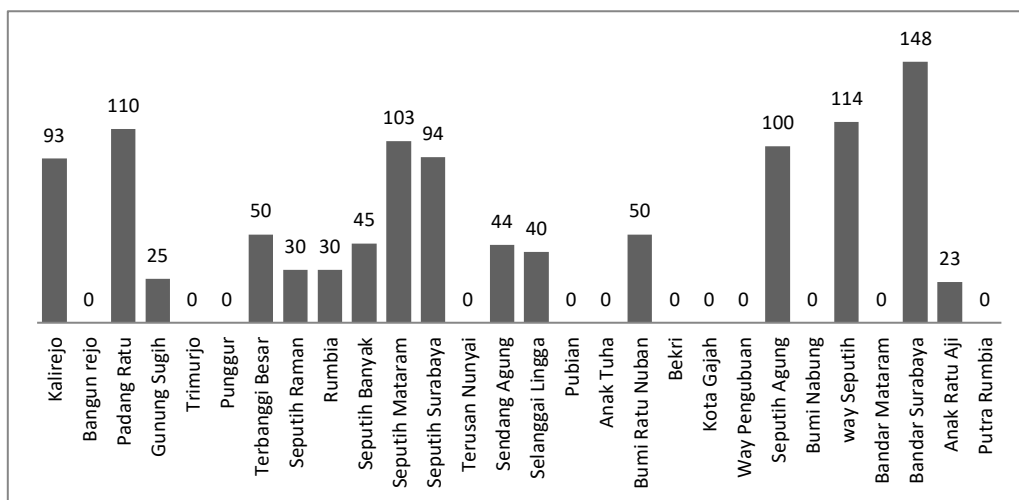
Anak-anak dengan status tertentu, misalnya anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban kekerasan, anak yang menjadi saksi dalam proses hukum membutuhkan perlindungan khusus. Secara keseluruhan, pada tahun 2019 terdapat 20 anak yang

membutuhkan perlindungan di Kabupaten Lampung Tengah (lihat Grafik 132). Kesemuanya adalah anak perempuan. Jika dicermati angka pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sama dengan anak yang menjadi korban kekerasan, namun pada isu perlindungan khusus ini dilengkapi dengan jenis kelamin.

Selain isu kekerasan terhadap anak, isu penelantaran anak juga termasuk ke dalam kluster perlindungan khusus ini. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014, pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, maupun spritual. Pengertian lain oleh Suryanto (2013:229 dalam Multaza 2016:72) menyebutkan penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan).

Di Kabupaten Lampung Tengah, data tahun 2019 menyebutkan terdapat 1.099 anak terlantar. Jumlah kasus penelantaran anak paling tinggi terjadi di Kecamatan Bandar Surabaya (148 kasus), Kecamatan Padang Ratu (110 kasus) dan Kecamatan Seputih Mataram (103 kasus). Selengkapnya lihat Grafik 133 di bawah ini.

Grafik 133. Anak Terlantar Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

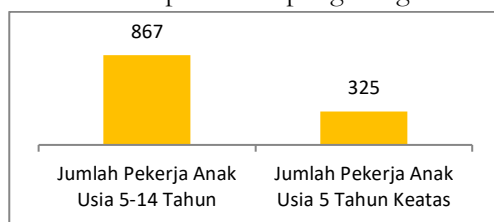
Rahakbauw (2016) dari hasil temuan penelitian mendapat gambaran bahwa faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian orang tua dan perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua yang rendah. Dampak perceraian dan perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Situasi ini akhirnya mendorong

anak melakukan aktivitas di luar rumah dengan menjadi pedagang asongan, tukang cuci kuburan, pekerja rumah tangga dan tukang ojek. Dengan melaksanakan kegiatan atau aktivitas di luar rumah yang menyita waktu dan tenaga, mereka tidak memiliki waktu untuk bersekolah.

Menurut Sukadi (2013) kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak, Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antar organisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik

Isu yang cukup menarik adalah pekerja anak. Dalam ketentuan pasal 64 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor informal maupun sektor formal. Di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan penelitian terdapat 867 anak yang berstatus sebagai pekerja anak dengan rentang usia 5-14 tahun (lihat Grafik 134). Angka pekerja anak ini jangan dilihat besar atau kecilnya, namun ketika masih ada anak yang bekerja dengan demikian pelanggaran terhadap pasal 64 UU No. 39/1999 telah terpenuhi.

Grafik 134. Pekerja Anak
di Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: diolah dari data sekunder 2019

Grootaert dan Kanbur (1995 dalam Nurwati 2008), ada empat faktor penentu (*determinants*) anak yang bekerja yaitu; faktor pertama, jumlah anak dalam rumah tangga merupakan faktor penentu yang potensial (*potential determinants*) penawaran pekerja anak di pasar kerja. Hasil penelitian yang dilakukan di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa makin besar jumlah keluarga akan mengurangi partisipasi sekolah anak-anak dan mengurangi investasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan kata lain, makin besar jumlah anggota keluarga akan meningkatkan risiko anak-anak untuk bekerja.

Faktor penentu kedua, yang menyebabkan anak-anak bekerja adalah yang berkaitan dengan risiko rumah tangga jika anak-anak ditarik dari pasar kerja. Pada rumah tangga miskin mengijinkan anak-anak masuk pasar kerja merupakan strategi untuk meminimalkan terhentinya arus pemasukan pendapatan rumah tangga dan mengurangi dampak anggota keluarga yang kehilangan pekerjaan. Pada rumah tangga yang termasuk ke dalam kategori miskin, biasanya tidak memiliki aset yang dapat dijual serta tidak memiliki jaringan untuk meminjam uang, dan kehilangan pekerjaan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup keluarga. Karena itu, menjadi jelas mengapa pekerja anak lebih banyak terjadi pada keluarga miskin.

Faktor penentu ketiga, adalah struktur pasar kerja yaitu yang berkaitan dengan pengupahan. Dalam pasar kerja yang kompetitif, upah bersifat fleksibel, pekerja anak dapat mensubstitusi pekerja dewasa. Dalam berbagai penelitian di negara berkembang, ditemukan bahwa jenis pekerjaan tertentu pengusaha lebih menyukai pekerja anak dari pada pekerja dewasa dengan alasan pekerjaan itu justru tidak efektif jika dikerjakan oleh orang dewasa .

Faktor penentu keempat, adalah peranan teknologi. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa, perubahan teknologi terbukti mengurangi jumlah pekerja anak. Pada masa revolusi industri, penggunaan mesin pintal (*spinning*) dan *weaving* telah mengurangi permintaan pekerja anak. Namun demikian, sejalan dengan perubahan teknologi juga bisa mendorong munculnya pekerja anak, misalnya untuk menekan pengeluaran perusahaan melakukan *subcontracting*, yaitu menyerahkan sebagian proses produksi suatu barang kepada penduduk yang berada di sekitar perusahaan untuk dikerjakan di rumah. Hal ini merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi berbagai biaya seperti listrik, asuransi, dan berbagai fasilitas pekerja. Pekerjaan subkontrak (*home workers*) ini biasanya dikerjakan oleh perempuan dan melibatkan anak-anak terutama anak perempuan.

Menurut Hanandini (2005) persoalan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak di larang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh Undang-undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Maka berdasarkan pasal 69 Undang-undang Ketenagakerjaan diperbolehkan pengusaha memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan dengan memenuhi persyaratan:

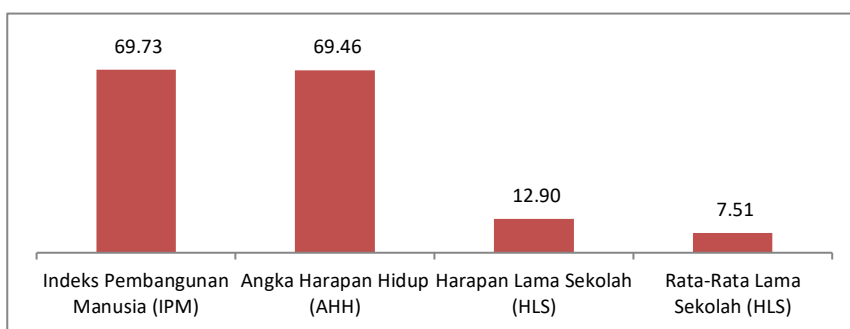
- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada waktu siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan pekerja anak merupakan fenomena hasil interaksi antara anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha di pihak lain, serta dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan (Endrawati 2012).

I. OVERVIEW

Grafik 135. Indeks Pembangunan Manusia
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019



Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu tolok ukurnya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mirza 2012). Pada grafik 135 tergambar IPM di Kabupaten Lampung Tengah mencapai angka 69.73. Angka IPM Provinsi Lampung (tahun 2018) adalah 69.02 (BPS Provinsi Lampung 2018) yang berarti Kabupaten Lampung Tengah 0.71 poin lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi. Sedangkan jika dibandingkan angka IPM nasional tahun 2018 yang sebesar 71.39 (BPS Republik Indonesia 2018) maka Kabupaten Lampung Tengah tertinggal 1.66 poin dari angka nasional.

Istilah *gender* digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat

bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Pada bab sebelumnya, telah disajikan dalam spektrum yang luas data-data yang berhubungan dengan kinerja gender antara perempuan dan laki-laki, kesenjangan yang tercipta di antara keduanya dan berbagai informasi yang relevan dalam pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai rangkuman atas perbandingan kinerja antara perempuan dan laki-laki, maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Grafik 136 mengungkapkan mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lampung Tengah.

Grafik 136. Indeks Pembangunan Gender
di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019

No	Keterangan	IPM	Indeks Pembangunan Gender	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,49	67,43	71,38
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90	12,80	12,91
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)	7,51	8,03	7,09
4.	Pengeluaran Perkapita	-	73,73	66,04
Indeks		69,73	89,57	

Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Grafik 137. Indeks Pemberdayaan Gender
di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019

No	Keterangan	Indeks
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,52
2.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	4%
3.	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi	53,60%
4.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan /kerja	31,43%

Sumber: diolah dari data sekunder 2019.

BAB IV

ANALISIS GENDER DAN ANAK

A. ANALISIS GENDER: GAP DAN POP

Analisis GAP dan POP dilakukan melalui lima tahapan sebagai berikut:

Tahap I : Analisis Kebijakan yang responsif Gender

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis kebijakan responsif gender. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk selanjutnya mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi: a) Identifikasi tujuan dan/atau sasaran kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada saat ini b) Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan c) Analisis sumber terjadinya dan/atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender d) Identifikasi masalah-masalah gender

Tahap II : Formulasikan Kebijakan Responsif Gender

Dalam tahap kedua, kebijakan/program/kegiatan yang sudah dianalisis, kemudian dirumuskan kembali sehingga responsif gender.

Disamping itu, untuk mengetahui apakah kebijakan baru sudah responsif gender maka dibuat indikator gender. Tahap kedua mencakup langkah-langkah sebagai berikut: a) Rumuskan kembali kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang baku yang responsif gender b) Identifikasi Indikator Gender

Tahap III : Rencana Aksi Responsif Gender

Tahap ketiga merupakan tahap untuk menyusun rencana kegiatan yang sudah responsif gender. Langkah-langkah dalam tahap ini adalah: a) Penyusunan rencana aksi b) Identifikasi sasaran-sasaran (kuantitatif dan/atau kualitatif) untuk setiap rencana aksi

Tahap IV : Pelaksanaan Kegiatan

Tahap keempat merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang sudah responsif gender

Tahap V : Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk semua tahap, baik mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap IV.

Tabel 10. Kerangka Analisis Gender GAP dan POP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
Lansia perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan lansia laki-laki	Total lansia perempuan 16,3 % dibandingkan dengan lansia laki-laki 13,92 % dari total penduduk	Status dalam rumah tangga status kawin lama sakit dalam seminggu, ada atau tidaknya tanggungan, ada atau tidaknya tunjangan hari tua, tingkat pendidikan	Lama sakit dalam seminggu, ada tidaknya tunjangan hari tua	Lama sakit dalam seminggu, ada tidaknya tunjangan hari tua	Meningkatkan kesejahteraan lansia perempuan melalui kepesertaan pada Program Keluarga Harapan dan Jaminan Kesehatan	Mengikut sertakan lansia pada PKH; Mengikutsertakan lansia perempuan pada Jaminan Kesehatan Nasional Program pendampingan /motivasi spiritual untuk meningkatkan rasa bangga atas capaian hidup di masa lansia	Lansia perempuan 16,3 % dari total penduduk	Kualitas hidup lansia perempuan meningkat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
Presentase perempuan yang belum/tidak pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan dengn laki-laki	Total perempuan yang belum/tidak pernah sekolah usia 5 tahun ke atas sebesar 7,28 %.	Status sosial ekonomi, status pernikahan, akses pendidikan formal, akses pendidikan kesetaraan, izin orang tua, izin suami, motivasi untuk sekolah	Motivasi untuk sekolah	Status sosial ekonomi, izin orang tua	Meningkatkan angka lulussekolah dan memiliki ijazah pendidikan formal bagi perempuan di atas usia 5 tahun	Mengikutsertakan perempuan pada Wajib Belajar 12 tahun, Mengikut sertakan perempuan yang belum memiliki ijazah untuk ikut serta dalam program pendidikan kesetaraan bagi yang tidak usia sekolah	Perempuan tidak/belum pernah sekolah usia 5 tahun ke atas 7,28%	Angka pendidikan yang ditamatkan perempuan meningkat.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
Angka perempuan pelaku usaha pertanian/ perikanan/peternakan sangat rendah dalam mengakses pelatihan dan permodalan	Petani perempuan 4.928 orang; Poktan perempuan 2,78 persen; Jumlah KWT mendapat pelatihan, pendampingan dan bantuan modal sangat rendah	Kurangnya informasi; Kurang percaya diri; Kelompok usaha perempuan dianggap bukan pekerjaan utama; Terhambat akses informasi	Kurangnya informasi; Kurangnya percaya diri	Terhambat akses modal; Dianggap bukan pekerjaan utama; Terhambat akses informasi	Perempuan pelaku usaha pertanian mendapat bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan	Melakukan pelatihan, pendampingan dan bantuan permodalan khusus kepada pelaku usaha pertanian perempuan	Petani perempuan 4.928 orang; Poktan perempuan 2,78 persen; Jumlah KWT mendapat pelatihan, pendampingan dan bantuan modal sangat rendah	Pelaku usaha perempuan mendapatkan akses yang sama untuk pelatihan, permodalan dan pendampingan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
PNS perempuan belum memiliki peluang yang sama menjadi <i>top level manajemen</i>	PNS perempuan golongan III (61,09%), PNS perempuan Gol IV (57,63%); PNS perempuan eselon IV (33%), PNS perempuan eselon III (10%)	Lemahnya pengembangan kepegawaian, baik dalam rekrutmen, rotasi, mutasi maupun penjenjangan struktural.	Motivasi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural rendah; Tingkat pendidikan	Sistem dan manajemen kepegawaian; Lingkungan kerja yang tidak kondusif; Politik birokrasi; Hambatan keluarga (suami-anak)	Meningkatnya PNS perempuan dalam jabatan struktural	Perbaikan manajemen dan sistem pengembangan kepegawaian	PNS perempuan golongan III (61,09%), PNS perempuan Gol IV (57,63%); PNS perempuan eselon IV (33%), PNS perempuan eselon III (10%)	PNS perempuan dapat berpartisipasi secara luas dan tanpa hambatan dalam <i>top level manajemen</i> birokrasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
Minimnya keterlibatan perempuan dalam parlemen masih rendah (5 %) atau 5 orang dari 50 anggota DPRD	Pada Pemilu Legislatif 2019 hanya ada 5 anggota legislatif yang terpilih, yaitu dari PDIP, PKB dan Golkar.	Budaya patriarkal; Persepsi arena politik adalah untuk laki-laki; Proses seleksi dalam partai politik Opini media massa	Persepsi arena politik adalah untuk laki-laki	Budaya patriarkal; Seleksi dalam partai politik; Opini media massa	Meningkatnya keterlibatan parlemen sesuai dengan <i>affirmative action</i> 30 % dari keseluruhan anggota dewan terpilih	Kontrak politik dengan parpol untuk mendukung 30% kuota perempuan di parlemen; Lokakarya dan FGD pengurus partai politik	Pada Pemilu Legislatif 2019 hanya 5 % anggota legislatif perempuan yang terpilih,	Meningkatnya anggota legislatif perempuan sebesar 30 % atau 15 orang pada Pileg 2024 yang akan datang

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
Keluarga Berencana dilakukan oleh perempuan	97 persen peserta Keluarga Berencana adalah perempuan	Tingkat pendidikan dan pengetahuan; Jumlah anak Pendapatan keluarga; Budaya Patriarki	Tingkat pendidikan dan pengetahuan.	Jumlah anak pendapatan keluarga	Meningkatnya peserta KB laki-laki	Sosialisasi, penyuluhan	97 persen peserta Keluarga Berencana adalah perempuan	Perempuan memiliki pilihan bebas untuk menentukan sebagai akseptor KB atau bukan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan / isu gender yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
Kekerasan pada perempuan meningkat	Korban kekerasan perempuan 32 orang; Korban TPPO perempuan 27 orang	Tingkat pendidikan dan pengetahuan; Perlindungan diri; Proses hukum yang tidak ramah perempuan; Budaya patriarkhi	Tingkat pendidikan dan pengetahuan; Perlindungan diri	Proses hukum yang tidak ramah perempuan; Budaya patriarkhi	Turunnya angka kekerasan dan TPPO terhadap perempuan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas	Sosialisasi, penyuluhan	Korban kekerasan perempuan 32 orang; Korban TPPO perempuan 27 orang	Angka kekerasan dan korban TPPO perempuan menurun

B. ANALISIS ANAK: KERANGKA KEBUTUHAN ANAK

- 1) Penilaian Situasi Mencakup: perumusan masalah, menentukan besarnya masalah, pilih indikator (dengan mempertimbangkan sasaran daerah) Dilaksanakan dengan metode partisipatif dan lintas sektor (stakeholders termasuk kel sasaran ibu dan anak.
- 2) Analisis Kausalitas
 - a) Penyebab langsung: hal-hal yang terkait dengan dampak langsung b) Penyebab tidak langsung: terkait penyampaian pelayanan, akses, perilaku 1) Masyarakat 2) akar Penyebab: masalah struktural (kondisi sosek, kebijakan, ketidakmerataan sumber daya, tata kelola & situasi politik.
- 3) Analisis Pola Peran. Mengidentifikasi dua peran: pemegang hak dan pengembangan kapasitas– serta memahami hubungan keduanya. Hubungan antara pemegang hak dan pengembangan tugas mencakup Peran untuk: a) menghormati hak; b) Melindungi hak; dan c) memenuhi hak.
- 4) Analisis Kesenjangan Kapasitas. Analisis ini akan menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas pengembangan tugas dalam melaks perannya utk memenuhi hak. Untuk setiap pemegang hak, ditelaah juga kapasitasnya dalam menuntut hak. Dibuatkan matrik analisis untuk setiap permasalahan dan setiap pengembangan tugas serta pemegang hak.
- 5) Aksi-aksi kunci. Diarahkan utk meningkatkan kapasitas pemegang hak dalam menuntut haknya dan kapasitas pengembangan tugas dlm menjalankan tugas untuk memenuhi hak. Usulan aksi harus mengarah pada aksi yang dapat meningkatkan tanggung jawab, wewenang, sumber daya, dan kapasitas utk mengambil keputusan dan komunikasi. Sasaran usulan aksi ada pada setiap tingkat pengembangan tugas dan pemegang hak, yaitu dari keluarga, masyarakat, sampai pemerintah.
Diperlukan utk mengimplementasikan aksi-aksi kunci dikelompokkan ke 5 hal: advokasi dan mobilisasi sosial, penyampaian informasi, pelatihan dan pendidikan, penyediaan layanan, perumusan kebijakan dan peraturan, dan lain-lain.
- 6) Pengembangan Kemitraan. Diperlukan karena sumber daya pemerintah terbatas. Proses pengembangan dengan identifikasi mitra potensial, dan menemukan strategi utk mengembangkan kemitraan dengan mereka. Proses pemetaan pemangku kepentingan harus melalui diskusi dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan.
- 7) Rancangan program/kegiatan, yaitu mengidentifikasi sasaran (goal/impact): mengidentifikasi hasil antara (intermediate result). menguraikan input/masukan untuk setiap kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai setiap keluaran/output.; membuat alur yang berurutan mulai dari input hingga output, termasuk bagaimana output suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan lain.

Hal ini dapat digambarkan output suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan lain. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk rantai hasil (result chain) yang menggambarkan rangkaian Input-Proses-Output-Outcome-Impact/Goal.

Tabel 11. Matrik Analisis Pembangunan Anak dengan Pendekatan Perlindungan Anak

Program/ Kebijakan	Situasi Anak	Penyebab	Bentuk Intervensi	Reformulasi Tujuan	Penanggung jawab	Indikator	Data Dasar
Kepemilikan Akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran anak perempuan lebih rendah dari pada anak laki-laki	Budaya patriarkhi; Kesadaran orang tua kurang; Hambatan infrastruktur; Kurangnya sosialisasi	Program jemput bola, yaitu faskes persalinan membuat data base dan melaporkan ke Disdukcapil	Terjaminnya hak sipil anak perempuan dalam kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas PP dan PA	Naiknya angka kepemilikan akta kelahiran pada anak perempuan secara khusus, dan anak-anak secara umum	Akta kelahiran anak perempuan 42,28%
Kekerasan terhadap anak	Angka kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun	Budaya patriarkhi; Perlindungan hukum belum optimal; SDM dan infrastruktur belum menunjang	Penyuluhan Pendampingan Pembentukan forum Kabupaten Layak Anak	Terjaminnya perlindungan hukum bagi anak, baik dalam lingkup domestik maupun publik	Dinas PP dan PA	Turunnya angka kekerasan terhadap anak Terbentuknya forum Kabupaten Layak Anak	Korban kekerasan anak 63 orang; anak korban kekerasan seksual 16 orang; anak korban TPPO 14 orang.
Anak terlantar	Meningkatnya angka anak jalanan	Kemiskinan keluarga; Kehidupan sosial keluarga; Disorganisasi keluarga	Penyuluhan Pendampingan Pembentukan forum Kabupaten Layak Anak	Terjaminnya kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan, dan kesejahteraan bagi anak jalanan	Dinas PP dan PA	Turunnya angka anak terlantar; Terbentuknya forum Kabupaten Layak Anak	Anak terlantar 1.099 orang
Anak Berhadapan	Meningkatnya angka anak berhadapan	Kemiskinan keluarga;	Penyuluhan Pendampingan	Terjaminnya perlindungan hukum	Dinas PP dan PA	Turunnya angka ABH;	Anak Berhadapan

dengan Hukum (ABH)	dengan hukum	Kehidupan sosial keluarga; Disorganisasi keluarga	Pembentukan forum Kabupaten Layak Anak	dan jaminan sosial lainnya bagi anak berhadapan dengan hukum		Terbentuknya forum Kabupaten Layak Anak	dengan Hukum (ABH) 22 orang
Pernikahan Anak	Meningkatnya pernikahan anak, yaitu kurang dari 18 tahun.	Kemiskinan keluarga; Kehidupan sosial keluarga; Disorganisasi keluarga	Penyuluhan Pendampingan Pembentukan forum Kabupaten Layak Anak	Terjaminnya perlindungan hukum dan jaminan pendidikan, kesehatan bagi anak yang menikah dibawah umur 18 tahun	Dinas PP dan PA	Turunnya angka pernikahan anak; Terbentuknya forum Kabupaten Layak Anak	Jumlah pernikahan pertama kurang dari 18 tahun 37 %
Pekerja Anak	Masih adanya pekerja anak	Kemiskinan keluarga; Kehidupan sosial keluarga; Disorganisasi keluarga	Penyuluhan Pendampingan Pembentukan forum Kabupaten Layak Anak	Terjaminnya perlindungan hukum dan jaminan pendidikan, kesehatan bagi anak yang menikah dibawah umur 18 tahun	Dinas PP dan PA	Turunnya angka pekerja anak; Terbentuknya forum Kabupaten Layak Anak	Pekerja anak berjumlah 1.192 orang

Sumber: dioah oleh peneliti

BAB V

REKOMENDASI

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian baik berupa kasus, gejala maupun dampak dari suatu keadaan yang mengarah pada ketidaksetaraan gender. Semuanya dituangkan dalam bidang-bidang pembangunan sebagai berikut ini:

Aspek Kependudukan

Potensi bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Indonesia secara umum harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh stakeholder yang ada. Usia produktif yang mendominasi struktur kependudukan dapat menjadi boomerang berupa angka pengangguran yang tinggi, tingkat kriminalitas, kondisi kesehatan yang menurun jika tidak dibarengi dengan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan untuk membuat technopark dimana kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Perguruan Tinggi untuk mencetak wirausahawan-wirausahawan muda di Kabupaten Lampung Tengah.

Aspek Pendidikan

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, optimalisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan peningkatan mutu kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dapat menjadi jembatan pemanfaatan bonus demografi. Selain pendidikan formal, Pemerintah Daerah harus membuka peluang pendidikan informal (kursus) untuk menambah skill lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

Aspek Kesehatan

Angka kematian ibu dan bayi yang masih terjadi (meski kecil) selayaknya menjadi perhatian dinas terkait. Pelayanan kesehatan yang paripurna, terlebih adanya Jaminan Nasional Kesehatan seharusnya mampu meningkatkan akses pada faskes dan angka kunjungan ibu hamil (K4). Persentase akseptor Keluarga Berencana laki-laki juga masih rendah, yaitu 3 %, hal ini dapat diintervensi dengan penyuluhan dan sosialisasi yang masif tentang pentingnya partisipasi laki-laki pada program Keluarga Berencana.

Aspek Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Perempuan yang terlibat pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan seringkali tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang berdampak pada tidak dibayarnya upah terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan. Pelatihan, pendampingan dan bantuan permodalan pada usaha mikro kecil dan menengah/usaha dagang/Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dimiliki oleh perempuan masih rendah. Untuk itu diperlukan intervensi khusus dari Dinas-dinas terkait agar usaha perempuan mendapat porsi yang sama dalam akses pelatihan, pendampingan dan permodalan.

Aspek Politik dan Pengambilan Keputusan

Potensi Pegawai Negeri Sipil perempuan untuk menjadi *top level management* sangat besar, karena PNS perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun kenyataannya, pejabat Eselon III dan IV didominasi oleh laki-laki. Dibutuhkan intervensi khusus dalam membuka peluang PNS perempuan untuk ikut pelatihan, pengembangan diri, studi banding, dan ujian kompetensi yang lain sehingga memiliki peluang yang sama untuk menjadi *top level management*.

Aspek Tindak Kekerasan

Pelaku kekerasan dominan adalah laki-laki dengan korban adalah perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan kesadaran bersama bahwa apa yang dianggap kebiasaan dalam masyarakat (memukul istri/anak) merupakan tindakan melanggar hukum. Penyadaran ini tidak hanya diberikan kepada pelaku (dalam hal ini laki-laki) namun juga pada perempuan dan masyarakat. Karena budaya yang dianut sebagian besar masyarakat, bahwa tindakan kekerasan dari suami/kepala rumah tangga adalah hal yang tabu untuk dibicarakan pada publik.

Aspek Anak

Hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Tanggung jawab pemenuhan hak-hak ini juga ada di masyarakat. Tim penulis merekomendasikan keterpaduan gerakan dan kebijakan dengan kerangka Kabupaten Layak Anak, dan pembentukan Forum Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Andi Zulkifli, M. Furqaan Naiem, Nurul Ulmy Mahmud 2012. “Faktor Risiko Kematian Neonatal Dini di Rumah Sakit Bersalin”. *Kesmas: National Public Health Journal* Vol. 6 No. 6 Juni 2012 DOI: <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v6i6.83>
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Aini, Ela Nur, Ifa Isnaini, Sri Sukamti, Lolita Noor Amalia, 2018. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang”. *Technomedia Journal*, Vol 3 No 1 (2018). DOI: <https://doi.org/10.33050/tmj.v3i1.333>
- Anggadini, Fima. 2015. “Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013”. *Katalogis* Vol 3, No 7 (2015). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6373>.
- Antasari, Rr. Rina dan Abdul Hadi. 2017. Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kota Palembang”. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017: 132-161.
- Arsanti, Tuti A. 2013. “Perempuan dan Pembangunan Sektor Pertanian” *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 3(1), 63-74. (doi:<http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v3i1.88>).
- Asfriyati, 2003. “Pengaruh Keluarga Terhadap Kenakalan Anak” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3699/fkm-asfriyati1.pdf?sequence=1>
- Astuti, Mulia. 2011. “Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)” *Informasi*, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011: 1-16.
- Badan Standar Nasional (BSN). Tanpa tahun. “Standar Nasional Indonesia SNI 7495:2009 tentang Perpustakaan umum kabupaten/kota”. Jakarta: Bandar Standar Nasional.
- Bakti, Galih Pramulu dan Kodoatie, Johanna Maria. 2012. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

- Benazir, Bona P., Roy Robert R. dan Putri Limilia. 2018. "Sustainable Tourism Communication Through Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) In West Bandung District" *Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS)* Faculty of Social and Political Sciences Muhammadiyah University of Jakarta, Indonesia: 461-465.
- Brown, Lisanne, Kate Macintyre, Lea Trujillo. 2003. "Interventions to Reduce HIV/AIDS Stigma: What Have We Learned?" *AIDS Education and Prevention*: Vol. 15, No. 1, pp. 49-69. (<https://doi.org/10.1521/acap.15.1.49.23844>).
- Darmayanti, Nur dan Indrawaty Lipoeto. 2019. "Gambaran Pemenuhan Hak Anak serta Faktor-Faktor yang Mendukung pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bukittinggi tahun 2019". *Jurnal Kesehatan Andalas* 8(4) 2019:44-55 (DOI: <https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1107>).
- Ekarini, Sri Madya Bhakti. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)" *Jurnal Hukum* Vol 25, No 1 (2011).
- Endrawati., Netty 2012. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12, No 2 (2012): 270-283. (DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47>).
- Hanandini, Dwiyaniti. 2005. "Tindak kekerasan di lingkungan pekerja anak sektor informal Kota Padang". *Jurnal Sosiologi SIGAI*, Vol.06 No.09, Februari 2005.
- Hani'ah, Jamilatun. 2017. "Peran Pokdarwis Pancoho Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Pancoho, Turi, Sleman". *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1*. Vol 6, No. 6 Tahun 2017.
- Hajji, Muhammad Shun, Nugroho, 2013. "Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011. *Diponegoro Journal of Economics* , Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/3159>).
- Hamdan, Opan Fauzan. 2019. Pekerja Perempuan Indonesia, Potret Pekerja Tidak Dibayar (Analisis Data Sakernas 2018). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* Volume 6, No. 2, November 2019:138-154.

- Hanoeboen, Bin Raudha Arif, Pudjihardjo, dan Sasongko. 2012. "Strategi Pengembangan Usaha Perempuan Pelaku Umkm Di Kota Ambon" *IQTISHODUNA (VOL 8, NO 1; 2012)* (DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/iq.v0i0.1762>).
- Haruna, Cenny Ningsih. 2018. "Efektivitas Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Dan C Oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia Di Kabupaten Pangandaran". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)*. DOI: <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i3.1693>.
- Haryanto, Sindung. 2017. "Perceptions and adoption of male contraceptives among men in Indonesia". *International Journal of Biomedical and Advance Research* 7(8):292-299.
- Haryoseno, Ikhsan, Masdeddy Hidayatullah, Yuli Setiawati, dan Yuana Yualit. 2018. "Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Lampung." *Lampungpost.co*, Aug 14, 2018 <https://www.lampost.co/berita-kontribusi-pariwisata-terhadap-perekonomian-lampung.html>.
- Hayuni, Rahimah, Nurizzati Nurizzati 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Kunjungan di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang" *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 6, No 1 (2017)*.
- Hengkeng, Hoin 2015. "Analisis Peran Retribusi Transportasi Darat terhadap Perekonomian di Kabupaten Poso" *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 8, Agustus 2015 hlm 28-37.
- Hermanik, E. 2014. "Perempuan dan Koperasi (Studi Model Pemberdayaan Perempuan Melalui KWSU Setia Budi Wanita Malang)". *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, v. 2, n. 2, Maret 2014.
- Hillman, Ben 2018. "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia". *Journal of Contemporary Asia*, 48:2, 322-338, (DOI: [10.1080/00472336.2017.1368092](https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092)).
- <https://www.kompasiana.com/gemblonk/54f43226745513a42b6c87d2/empat-ancaman-yang-kudu-dilibas-demi-bonus-demografi?page=all>.
- Idrus Abdullah, Lalu Husni, RR. Cahyowati. 2018. "Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia" . *Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility*. (<http://www.prosiding-pkmsr.org/index.php/pkmsr/article/view/84>).
- Ilma, Naufal. 2015. "Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa". *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2015 Halaman 82-87 (<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi>).

- Indioworo, Hawik E. 2016. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kinerja UMKM" *Jurnal Equilibria Pendidikan* Vol. 1, No. 1, 2016 40.
- Isa, Muzakar. 2016. "Bencana Alam: Berdampak Positif atau Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?" *The 3rd University Research Colloquium (URECOL) 2016* (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/6725>).
- Jolianis, et al. 2013. "Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Sumatera Barat.". *Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Kadir, Abdul, 2006. "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Wahana Hijau* 2006. Volume 1.
- Kamaludin, Rustian, 2003. *Ekonomi Transportasi, Karakteristik, Teori dan Kebijakan*. Jakarta Penerbit Ghalia Indonesia.
- Khoiriah, Siti. 2019. "KONTROVERSI KECAKAPAN ANAK DALAM HUKUM". *Wacana Publik* Vol,13, No. 1,2019: 13-18 (DOI: <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.14>).
- Kinasih, Intan Ayu. 2015. "Kebijakan Semu: Sebuah Analisis Tentang Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata Mandala di PKBM Pratama Kecamatan Batang Kabupaten Batang". *SOLIDARITY* Vol 4 No 1 (2015).
- Lia, Lusiyani. 2018. *Efikasi Diri Pada Orang Dewasa yang Mengikuti Kejar Paket C di PKBM Prima Sejahtera Klaten Utara*. Tugas Akhir Thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Lingga Pos, 2019. "Delapan Pasien MOW dan MOP Dioperasi". *Lingga Pos Online* 15 Juli 2019 (<https://www.linggaupos.co.id/delapan-pasien-mow-dan-mop-dioperasi/>)
- Maarif, Nurcholis. 2019. "Pariwisata Sudah Sumbang US\$ 19,29 Miliar untuk Devisa Indonesia". *detiknews.com* 17 Agu 2019. <https://travel.detik.com/travel-news/d-4669424/pariwisata-sudah-sumbang-us-1929-miliar-untuk-devisa-indonesia>.
- Maman S, Abler L, Parker L, Lane T, Chirowodza A, Ntogwisangu J, 2009. "A comparison of HIV stigma and discrimination in five international sites: The influence of care and treatment resources in high prevalence settings". *Journal of Social Science & Medicine*. 2009; 68 (12): 2271-8.
- Mindarti, Lely I, dan Diko Bagus Manggoro. 2016. "Peningkatan Daya Saing Umkm Perempuan Melalui Comparative Advantage: Study pada UMKM "Keripik Tempe

- Rohani” di Sentra Keripik Sanan, Kota Malang”. *Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol.VI No.1 Tahun 2016.
- Misti, P. 2020. “Gratis, 292 Akseptor Ikuti MOP dan MOW di Kabupaten Mojokerto”. *Berita Jatim* 16 Februari 2020 (<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gratis-292-akseptor-ikuti-mop-dan-mow-di-kabupaten-mojokerto/>).
- Mujiyati dan Heppy Purbasari. 2014. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf, Dan Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 Dan 2011”. *Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS*, 25 JUNI 2014 (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4603>).
- Multaza, Muhammad, Zulihar Mukmin, dan Hasbi Ali. 2016. “Peran Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah Aceh dalam Usaha Pembinaan Moral Anak-Anak Terlantar”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, Nomor 1: 71-79 Agustus 2016.
- Muslim, Mohammad R. 2014. “Pengangguran Terbuka dan Determinannya”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 15, Nomor 2, Oktober 2014, hlm.171-181.
- Nailufar, Nibras N. 2020. "Koperasi: Pengertian, Fungsi, Prinsip, dan Asasnya", available at <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/140000169/koperasi-pengertian-fungsi-prinsip-dan-asasnya?> .
- Nasrul, Wedy 2012. “Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan Pertanian”*MENARA Ilmu* Vol. III No.29, Juni 2012:166-174.
- Nency, Yetty dan Muhamad Thohar Arifin. 2005. “Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang” *INOVASI* Vol.5/XVII/November 2005:61-64.
- Nihayah, Ana Z. 2015. “Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan *Poverty Reduction* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2. 2015:1-24.
- Nindya, P. N. 2012. “Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja” *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol.1.No.02.,Juni 2012: 1-9.
- Noor, Munawar. 2015. “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN BONUS DEMOGRAFI”. *Serat Atinya* 4(1) 2015:121-128.

- Nurmansyah, Agung. . 2014. “Potensi Pariwisata dalam Perekonomian Indonesia” . *Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan* Vol. III, No. 1, Januari 2014: 44-61.
- Nurhayati, Martina, 2016. “Peran Tenaga Medis dPelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pembantu Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat”. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2016, 4 (1) :2127 - 2140
- Nurwati, Nunung 2008. “Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Pekerja Anak dalam Membantu Keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2, Juli 2008 : 112 – 121.
- Pangalila, Anna E. 2018. “Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 4/Jun/2018: 94-100.
(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19835/19432>).
- Pujianto, M. Bagus. 2015. *Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang)*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Pramita, Maria. 2017. *Peranan sektor pertanian, kebutuhan dan perikanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Tesis).
- Pratama, Herwanda (ed). 2019. “4170 Warga Lampung Terkena HIV/AIDS, Mayoritas Akibat Seks Bebas”. *Kupastuntas* 26 November 2019
(<https://www.kupastuntas.co/2019/11/26/4170-warga-lampung-terkena-hiv-aids-mayoritas-akibat-seks-bebas/>).
- Purnama, Sumedi C. 2019. “Kemkop dan UKM Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM Untuk PDB”. *beritasatu.com* Senin, 9 Desember 2019.
(<https://www.beritasatu.com/ekonomi/589706/kemkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-untuk-pdb>).
- Purnamawati, Ruri. 2009. “Kontribusi Sumber Daya Manusia Petani Perempuan Dalam Kehidupan Pertanian di Desa” *Dimensia*, Volume 3, No. 2, September 2009: 15-32.
(<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3416/2900>).
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. “Studi dan Analisis HIV AIDS”. 1 Desember 2014.
- Rahakbauw, Nancy. 2016. “Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon).” *INSANI* Vol. 3 No. 1 Jun 2016. doi:10.31219/osf.io/zmjrp.

- Rahmariza, Emilia, Ikeu Tanziha, dan Dadang Sukandar. 2016. Analisis Determinan Karakteristik Keluarga dan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak serta Dampaknya terhadap Status Gizi” *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* Vol 12, No 3 Juni 2016 (DOI: <http://dx.doi.org/10.30597/mkmi.v12i3.1073>).
- Rahmatin, Umy Z dan Ady Soejoto. 2017. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol.1 No. 2 November 2017 Hal.127:140.
- Rinaldi, Kasmanto.2017. “Dinamika Kerawanan Sosial Menuju Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru” *Jurnal Akrab Juara*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 80-91, Apr. 2017. ISSN (<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/10>).
- Risnawati. 2016. *Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDB) di Kabupaten Jeneponto*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rizka, Andriani and hadi Hamam. 2014. *Hubungan antara Status Ekonomi dengan Keikutsertaan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta Tahun 2014*. Thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
- Rumtaning, Irma. 2014. “Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27, Nomor 1 Februari 2014.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Sanusi, Ahmad. 2019. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka”. *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum* Vol 13, No 2 (2019) (DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>).
- Shaluhiah, Zahroh, Syamsulhuda Budi Musthofa, Bagoes Widjanarko. 2015. “Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan HIV/AIDS” *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 9, No. 4, Mei 2015: 333-339. (DOI: <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v9i4.740>).
- Sinaga, Anggiat. 2013. *Analisis Tenaga Kerja Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Tenaga Kerja di Kota Medan*. Masters thesis, UNIMED.
- Simangunsong, Septi K, Titik Kartika dan Yorry, Hardayani. 2019. *Kontribusi Perempuan Pekerja Tidak Dibayar (Unpaid Workers) dalam Reproduksi Sosial Keluarga*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2007. “Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. (http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf).

- Sudarsana, I Ketut. 2018. "Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Pendidikan Agama Hindu bagi Anak Panti Asuhan". *Journal of Character Education Society*. Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hal. 41-51.
- Sumara, Dadan, Sahadi Humaedi, Meilanny, dan Budiarti Santoso. 2017. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya" *Jurnal Penelitian & PPM* Vol 4, No: 2: 346-353. Juli 2017
- Sunartiningsih, Agnes. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditia Media - Universitas Gajah Mada.
- Sukadi, Imam. 2013. "Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol 5, No 2 Desember 2013 (DOI:<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>).
- Supriyanto, Bambang (ed). 2019. "Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka, Zaman Siapa Lebih Baik?." *bisnis.com* 11 Agustus 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190811/12/1135052/perbandingan-tingkat-pengangguran-terbuka-zaman-siapa-lebih-baik>
- Sukesi, Keppi. 2008. "Disparitas Gender dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur Tahun 2008". Disampaikan pada *Sosialisasi PUG Bidang Pendidikan untuk Guru dan Komite Sekolah di Kabupaten Kediri*, 20 Desember 2008. 1-33
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryawan, Agung. 2016. "Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendang Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung)" *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1*. [Vol 5, No. 6 Tahun 2016](#).
- Susantono, Bambang. 2013. *Transportasi dan Investasi*. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara.
- Swastuti, Endang. 2013. "Peran Serta Perempuan dalam Pengelolaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) di Jawa Tengah" *Media Ekonomi dan Manajemen* Vol 27. No 1 Januari 2013: 12-25. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/200>
- Syahban, Bayu, F. Fauziah, Rahmawati. 2018. "Status Sosial Ekonomi dengan Penggunaan KB Implan pada Wanita PUS di Wilayah Kerja Puskesmas Loa Buah Tahun 2017.". *Bunda Edu-Midwifery Journal*, Vol. 1, No. 1, 2018:19-22.

- Sukarta, Agus Wira. 2020. "10,7 juta wisatawan kunjungi Lampung pada 2019". *Antaranews*. Senin, 10 Februari 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1287598/107-juta-wisatawan-kunjungi-lampung-pada-2019>
- Teja, Mohammad. 2014. "Pelindungan Terhadap Anak Telantar di Panti Asuhan" *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. VI, No. 05/I/P3DI/Maret/2014: 9-12.
- Pasalbessy, Jhon D. 2010. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya" *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010:8-13
- Tomlinson, Mark, Mark Jordans, Harriet MacMillan, Theresa Betancourt, Xanthe Hunt, Christopher Mikton. 2017. "Research priority setting for integrated early child development and violence prevention (ECD+) in low and middle income countries: An expert opinion exercise". *Child Abuse & Neglect* 72 (2017) 131–139. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.021>.
- Wahyudi, Dheny. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, 1 Feb. 2015.
- Wandira, Arinta Kusuma dan Rachmah Indawati. 2012. "Faktor Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Sidoarjo" *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2012 : 33-42
- Winarni, Sri, et al. "Hubungan Beberapa Karakteristik Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Suntik di Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Triwulan I Tahun 2013". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 22 Oct. 2013.
- Winata, I Nyoman Mursa, 2011. "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Setara Sma) Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Widya Sentana" Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2011/2012". *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* Vol 2, No 2 (2011).
- Yuliani, Apri .2014. "Pengaruh Sektor Transportasi Dan Perekonomian Provinsi Lampung" *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 26, Nomor 502 9, September 2014: 501-508.